

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 910/492/30
 170/4879/10

TANGGAL 11 Agustus 2022

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : SRI MULYANI
 Jabatan : Bupati Klaten
 Alamat Kantor : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HAMENANG WAJAR ISMOYO
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Klaten
 Alamat Kantor : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten
- b. Nama : TRIYONO
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
 Alamat Kantor : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten
- c. Nama : MARJUKI
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
 Alamat Kantor : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten
- d. Nama : HARIYANTO
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
 Alamat Kantor : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Klaten, 11 Agustus 2022

Bupati Klaten
Selaku,
PIHAK PERTAMA



SRI MULYANI

Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten
Selaku,
PIHAK KEDUA



HAMENANG WAJAR ISMOYO
KETUA

TRAYONO
WAKIL KETUA

MARJUKI
WAKIL KETUA

HARIYANTO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2023	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS.....	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	I-3
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	II-1
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-1
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	IV-1
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	IV-1
4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.....	IV-1
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	V-1
5.1 Rencana Penerimaan Pebiayaan	V-1
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Tabel 3.5 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	
Lampiran 2 Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023	II-1
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	III-2
Tabel 3.2 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	III-17
Tabel 3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.....	III-110
Tabel 3.4 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	III-138
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	IV-1
Tabel 5.1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa Rancangan PPAS disusun dengan tahapan;

- 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- 3) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Sebagai tindaklanjut dari penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan PPAS Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan salah satu syarat utama dalam tahapan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang telah disusun dijadikan sebagai landasan perencanaan kebijakan keuangan dan perkiraan kemampuan keuangan yang disusun secara sistematis.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dokumen PPAS Kabupaten Klaten berisikan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Substansi dokumen PPAS meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-masing program

dan kegiatan yang didasarkan pada KUA, dan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan, perangkat daerah serta berdasarkan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Klaten Tahun 2023 menggunakan pendekatan *money follow program priority*, dan *program priority follow outcome* dengan kriteria:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023;
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
4. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk melaksanakannya;
5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2023 tersusun, selanjutnya Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Dokumen PPAS memiliki kedudukan yang penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

I.2 Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

I.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Klaten Tahun 2023, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
 29. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 30. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
34. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
35. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
36. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
37. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana pemutakhiran

- kedua melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 46. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
 51. Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa;

52. Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;
53. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Struktur APBD sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu (1) tahun anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pendapatan daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebesar Rp2.535.531.396.829,00. Sementara itu penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp306.603.501.581,00. Selengkapnya target-target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023

No Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4	PENDAPATAN	2.535.531.396.829
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	303.140.818.200
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	126.537.540.200
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	17.325.109.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.586.842.000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.691.327.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.219.350.578.629
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.052.081.936.922
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	167.268.641.707
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.040.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.040.000.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	306.603.501.581
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	306.603.501.581

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni:

- 1) Kondisi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
- 2) Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;
- 3) Langkah-langkah strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi perannya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang didasarkan pada hasil perumusan teknokratis, partisipatif, politis dan juga dilakukan melalui pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) serta atas bawah (*top-down*).

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2023 yang perlu mendapatkan dukungan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2023
Misi 1: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian		
1	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian	▪ Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 0,68 Indeks

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator	Target 2023
	pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan.		
	1) Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan ✓ Persentase perda dan perkada yang ditegakkan 	<p>100%</p> <p>92,80%</p>
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi			
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Reformasi Birokrasi 	60,62 indeks
	1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) ✓ Peringkat/ Nilai SAKIP ✓ Opini Laporan Keuangan ✓ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ✓ Indeks Penerapan Sistem Merit ASN 	<p>81 indeks</p> <p>62,5 Nilai WTP Opini</p> <p>3,4 Indeks</p> <p>200 Indeks</p>
	2) Meningkatnya kualitas pelayanan public	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 	82,5 Indeks
Misi 3: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan			
1	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan Ekonomi 	3,51 %
	1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan ✓ Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan ✓ Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan ✓ Pertumbuhan PAD sektor pariwisata 	<p>2,24%</p> <p>1,79 %</p> <p>2,68%</p> <p>3,44%</p>
	2) Meningkatnya investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persentase peningkatan investasi PMDN ✓ Persentase peningkatan investasi PMA 	<p>10%</p> <p>1%</p>
Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah Yang Berkualitas Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah			
1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktur wilayah kondisi baik ▪ Rasio konektivitas 	<p>76,72%</p> <p>0,12 Rasio</p>

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator	Target 2023
	1) Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	✓ Persentase jalan dalam kondisi mantap	91,26%
		✓ Persentase drainase dalam kondisi baik	61,48%
		✓ Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	43,6%
	2) Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100)	✓ Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	98,87%
	3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	✓ Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	88,6%
	4) Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan	✓ Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	0,61 Nilai
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender			
1	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ✓ Persentase Penduduk Miskin ✓ Indeks Pembangunan Gender 	76,88 Indeks 11,69% 96,75 Indeks
	1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Harapan Lama Sekolah (HLS) ✓ Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ✓ Persentase pemajuan kebudayaan 	13,62 Tahun 8,72 Tahun 5%
	2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	✓ Usia Harapan Hidup (UHH)	76,89 Tahun
	3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persentase PMKS yang tertangani ✓ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ✓ Indeks Desa Membangun 	68% 4,97% 0,6934 Indeks
	4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ✓ Skor Kabupaten Layak Anak 	73,67 Indeks 740 Nilai
Misi 6: Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
1	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	▪ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,01 Indeks
	1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indeks Kualitas Air ✓ Indeks Kualitas Udara ✓ Indeks Kualitas Tutupan Lahan 	36,87 Indeks 78,29 Indeks 43,08 Indeks
	2) Meningkatnya penanganan	✓ Indeks Kinerja Pengelolaan	61,95 Indeks

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2023
dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Sampah (IKPS)	
3) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	✓ Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,92 Indeks

Sumber : Rancangan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023 diarahkan untuk **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkelanjutan”**. Penekanan “Pertumbuhan Ekonomi” mengandung makna bahwa kemampuan daerah dalam mengembalikan pergerakan pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang telah diupayakan pemulihannya akibat pandemi covid-19 di Tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diarahkan melalui penguatan sumber daya manusia dan sarana prasarana wilayah di semua sektor. Sedangkan makna “Penguatan Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana Wilayah” diarahkan untuk pengembangan/optimalisasi sektor/produk unggulan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam penjabarannya, dirumuskan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing. Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan, pengembangan daya Tarik wisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan dan pengembangan produk asli Kabupaten Klaten. Hal ini untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan Investasi Daerah. Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni Ekonomi.

Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan melalui program unggulan: Klaten Mapan, Klaten Keren, Klaten Laris dan Klaten Santer.

- 1) **Klaten Mapan**, Mapan singkatan dari Mandiri Pangan. Mandiri Pangan yang dimaksud adalah Kabupaten Klaten mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok utama (Padi dan Jagung) masyarakat secara mandiri dan menjadi penyangga kebutuhan pangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Mandiri Pangan juga dapat diartikan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan. Klaten Mapan dengan fokus sebagai berikut:

- (1) Pengembangan dan branding padi Rojolele varietas Srinar dan Srinuk; pengembangan ternak unggul berbasis potensi lokal; peningkatan dan pengembangan produk unggulan perkebunan;
 - (2) Pengembangan pertanian organik; intensifikasi pengolahan; pembangunan pertanian berbasis kawasan dan teknologi; intensifikasi usaha tani; penggunaan benih bermutu dan bersertifikat; pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi; pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian; pencegahan, pengendalian, dan penanganan pasca panen serta promosi pemasaran;
 - (3) Pengembangan infrastruktur pertanian;
 - (4) Pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - (5) Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian, revitalisasi penyuluhan pertanian dan penguatan kelompok tani,
 - (6) Peningkatan dan pengembangan Lumbung Pangan; dan penguatan kelembagaan pangan;
 - (7) Pemberdayaan usaha nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil; peningkatan fasilitasi usaha; pengembangan produk olahan ikan; dan meningkatkan konsumsi ikan dikalangan masyarakat
 - (8) Penyediaan dan pendistribusian benih unggul; restocking di perairan umum; penguatan teknologi pemasaran produksi perikanan
 - (9) Kemudahan perijinan dengan optimalisasi teknologi informasi dan mall pelayanan publik; dan penyediaan basis data informasi investasi.
 - (10) Peningkatkan iklim investasi dan promosi investasi berkelanjutan sesuai potensi dan peluang investasi; peningkatan kapasitas SDM; pengembangan pola kemitraan dan kerjasama investasi.
- 2) **Klaten Keren**, Keren berarti Kabupaten Klaten memiliki berbagai daya Tarik wisata dan ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan dan membelanjakan uangnya di Klaten, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Katen. Klaten Keren dengan fokus sebagai berikut:
- (1) Pengembangan Kawasan Pariwisata, desa wisata dan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan program nasional dalam menciptakan Klaten sebagai salah satu daerah tujuan wisata (single destination tourism) dan peningkatan kemitraan antar pelaku industri pariwisata.

- (2) Penerapan CHSE (Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan)); penyelenggaraan event budaya dan MICE; promosi digital dan partisipasi dalam pemasaran pariwisata tingkat nasional dan internasional.
 - (3) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan didukung basis data ekonomi kreatif yang terintegrasi.
- 3) **Klaten Laris**, Laris berarti sebuah ajakan untuk membeli dan mencintai produk asli Kabupaten Klaten diharapkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Klaten Laris dengan fokus sebagai berikut:
- (1) Penguatan sentra industri dan 11 klaster industri; fasilitasi pemberdayaan IKM, mengintensifkan pembinaan teknologi produksi, perijinan usaha dan akses pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City; fasilitasi sertifikasi pekerja industri, serta pengembangan pola kemitraan industri kecil dengan industri menengah dan besar
 - (2) Membranding produk unggulan dan penguatan gerakan “Aku Cinta Produk Klaten” dan pengembangan basis data koperasi dan UKM
 - (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; penguatan kelembagaan koperasi dan UKM; pemberdayaan Klaster UKM berbasis teknologi informasi; fasilitasi akses permodalan dengan program subsidi bunga; dan serta peningkatan daya saing UKM dan koperasi.
- 4) **Klaten Santer**, Santer singkatan dari Sahabat Investor, dimana Kabupaten Klaten merupakan wilayah strategis yang berada diantara Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, yang memiliki keunggulan kepariwisataan, pertanian dan zona Industri, serta memiliki konektivitas yang terintergrasi dan Kabupaten Klaten merupakan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN). Klaten Santer dengan fokus sebagai berikut:
- (1) Pengembangan kemitraan pemasaran produk unggulan daerah; mengembangkan promosi dan pameran; meningkatkan pengawasan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat; pengendalian ijin pasar modern dan perlindungan konsumen
 - (2) Peningkatan kualitas pasar tradisional
 - (3) Penambahan display khas produk klaten; Pemutakhiran basis data Industri Kecil Menengah; dan pengembangan kawasan peruntukan industri yang selaras dengan tata ruang.

2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni kemiskinan dan pengangguran.

Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan data verval BPS menunjukkan kenaikan persentase rumah tangga miskin dan peningkatan rumah tangga miskin serta Isu strategis lain terkait penanggulangan kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada sinergitas dan harmonisasi penanganan kemiskinan berbagai sektor dan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perluasan lapangan pekerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM tenaga kerja. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan melalui program unggulan: Klaten Subur, Klaten Cetar, dan Klaten Tangkis.

- 1) **Klaten Subur**, Subur singkatan dari Subsidi Bunga Ringan, berarti memberikan kemudahan akses permodalan usaha bagi UMKM dengan cara memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 80% dari bunga bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Klaten Subur dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan aset desa;
 - (2) Pembentukan dan penguatan tata kelola BUMDes dalam pengembangan potensi unggulan desa, dan mengembangkan kerjasama antar desa.
 - (3) Pemberian kemudahan akses permodalan usaha bagi UMKM.
- 2) **Klaten Cetar**, Cetar singkatan dari Cerdas dan Trampil, berarti meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Klaten dari sisi *soft skill* dan *hard skill* dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi pasar kerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja/beriwirausaha. Klaten Cetar dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Peningkatan jenis pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dunia usaha dan industri melalui Balai Latihan Kerja; Peningkatan peran lembaga pelatihan kerja swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas; pelatihan wirausaha; perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya; tenaga kerja mandiri (TKM); terapan teknologi tepat guna (TTG); tenaga kerja sukarela (TKS);
 - (2) Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui Job fair dan Bursa Kerja online; fasilitasi hubungan industrial ketenagakerjaan dan industri; peningkatan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri, serta kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- 3) **Klaten Tangkis**, Tangkis singkatan dari Tangani Kemiskinan oleh seluruh perangkat daerah, didukung peran serta dunia usaha dan masyarakat. Penanganan kemiskinan dilaksanakan melalui program-program yang mengarah pada peningkatan akses pekerjaan yang layak, peningkatan pendapatan, dan pengurangan beban pengeluaran, dan perlindungan sosial penduduk miskin. Klaten Tangkis dengan fokus sebagai berikut:
- (1) Peningkatan rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar; penguatan terhadap fungsi rumah singgah serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
 - (2) Penyempurnaan sistem perlindungan sosial termasuk didalamnya optimalisasi, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - (3) Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara terpadu dan lintas sektor.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional yakni Sumber Daya Manusia. Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya, kualitas kesehatan, dan kualitas pendidikan. Peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya difokuskan pada peningkatan kerukunan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang melibatkan lintas program dan sektoral. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klaten. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan program unggulan: Klaten Toleran, Klaten Waras, dan Klaten Tuntas.

- 1) **Klaten Toleran**, Toleran berarti kerukunan masyarakat di Kabupaten Klaten terus terjaga salah satunya melalui peningkatan semangat “Gotong Royong” masyarakat dalam proses pembangunan, peningkatan nilai-nilai keagamaan, pengembangan kebudayaan, pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) hingga tingkat Desa/Kelurahan. Klaten Toleran dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Peningkatan sinergitas pencegahan dan pengendalian konflik sosial; penguatan sistem peringatan dini di lingkungan masyarakat
 - (2) Pembinaan revolusi mental berlandaskan ideologi Pancasila

- (3) Pengkoordinasian penyusunan Perkada sebagai tindak lanjut Perda yang mengandung sanksi; optimalisasi pelaksanaan patroli; meningkatkan kuantitas anggota Satpol PP, dan Pemberdayaan petugas linmas;
 - (4) Meningkatkan kuantitas dan kompetensi anggota Damkar;
 - (5) Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran.
- 2) **Klaten Waras**, Waras berarti memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan lingkungan kesehatan masyarakat, seperti Program Waskita (Klaten Wajib Awasi Bersama Untuk Kesehatan Ibu Bayi dan Balita) dan Program Seruling Bambu (Serbu dan Buru Stunting, Bekali Anak Menjadi Bibit Unggul), dan lain-lain. Klaten Waras dengan fokus sebagai berikut:
- (1) Pengendalian Covid-19 melalui pelaksanaan vaksin, penerapan protokol kesehatan, dan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat
 - (2) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita; optimalisasi penanganan penyakit, peningkatan edukasi terkait permasalahan kesehatan; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan,
 - (3) Penyediaan pangan yang merata diseluruh wilayah, terjangkau dan terjamin keamanannya serta didukung penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah berbasis sumber daya lokal.
 - (4) Penyediaan sarana dan prasarana olahraga; meningkatkan pembinaan olahraga; meningkatkan kapasitas dan sertifikasi pelatih olahraga, serta meningkatkan kapasitas pemuda pelopor dan wirausaha muda.
 - (5) Peningkatan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dan pengembangan Kampung KB untuk meningkatkan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R).
 - (6) Peningkatan pemberdayaan perempuan; implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak, serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga.
- 3) **Klaten Tuntas**, Tuntas singkatan dari turunkan anak tidak sekolah. Penanganan anak tidak sekolah merupakan wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yaitu bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Klaten Tuntas dengan fokus sebagai berikut:

- (1) Penyediaan Sarana dan prasarana PAUD;
- (2) Pemberian insentif berupa beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu.
- (3) Meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan.
- (4) Pembangunan taman budaya dan museum daerah
- (5) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya

4. Percepatan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah;

Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur ditetapkan dalam rangka peningkatan aksesibilitas pusat-pusat pengembangan perekonomian wilayah dan penyediaan sarana prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat. Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur diprioritaskan pada peningkatan kualitas jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung, serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan program unggulan: Klaten Mantap.

Klaten Mantap, Mantap berarti Kabupaten Klaten dengan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap. Klaten Mantap dengan fokus sebagai berikut:

- (1) Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan serta sistem drainase termasuk dukungan dalam pengendalian banjir khususnya Sungai Dengkeng, Sungai Bengawan Solo
- (2) Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasaran sumberdaya air irigasi sumberdaya air secara merata termasuk di Rowojombor untuk menunjang irigasi pertanian, air minum, dan aktivitas pembidayaan perikanan
- (3) Peningkatan Pembangunan gedung pemerintah daerah
- (4) Pengembangan dan peningkatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan.
- (5) Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (6) Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi) dan permukiman kembali (relokasi).
- (7) Penyusunan rencana tata ruang
- (8) Pengendalian perijinan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang serta rencana detail tata ruang.

- (9) Peningkatan perencanaan jaringan lalu lintas angkutan jalan; perencanaan dan penataan jaringan trayek;
- (10) Pengelolaan terminal tipe C; penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan; penyediaan angkutan orang dan barang; penataan parkir, dan mendorong kepemilikan KIR kendaraan bermotor.

5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Prioritas ini difokuskan pada peningkatan perwujudan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan diprioritaskan pada pengelolaan persampahan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten diprioritaskan pada peningkatan kapasitas masyarakat Kabupaten Klaten dalam menghadapi bencana. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan program unggulan: Program Klaten Tangguh dan Klaten Lestari.

- 1) **Klaten Tangguh**, Tangguh berarti masyarakat Kabupaten Klaten mampu beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dari dampak bencana yang dialami. Klaten Tangguh dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Penataan sistem dasar penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana, dan pelayanan informasi kebencanaan;
 - (2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; penanganan pasca bencana; peningkatan kerjasama dan pembinaan relawan.
- 2) **Klaten Lestari**, Lestari berarti mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas secara berkelanjutan dan memiliki sistem pengelolaan sampah yang terpadu didukung peran serta masyarakat, serta penyediaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai ke tingkat Desa/Kelurahan. Klaten Lestari dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan dokumen lingkungan dan pemantauan kualitas air, tanah dan udara secara berkala.
 - (2) Pembangunan taman; pengelolaan hutan kota, taman kota dan ruang publik lainnya.
 - (3) Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah; optimalisasi kinerja TPA; pengurangan sampah dengan TPS 3R dan Bank Sampah; serta pengawasan dan pengendalian terhadap limbah dan bahan beracun berbahaya (B3).
 - (4) Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan hingga tingkat desa.

6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Prioritas ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada peningkatan inovasi pelayanan publik secara profesional, transparan dan akuntabel berorientasi pada *good and clean governance*. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan program unggulan: Klaten Cerdas dan Klaten Cekatan.

- 1) **Klaten Cerdas**, Cerdas adalah Klaten *Smart City*, merupakan Kota yang memanfaatkan berbagai sumberdaya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan Kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Klaten *Smart City* mencakup *Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living* dan *Smart Environment*, salah satu upayanya dalam mendorong Klaten Cerdas dengan mengupayakan internet masuk desa. Klaten Cerdas dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Penguatan perangkat daerah terkait sistem perencanaan pembangunan; monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas; perbaikan sistem pengendalian intern pemerintah; pencegahan tindak pidana korupsi; pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; penjaminan mutu layanan; penerapan SOP; diklat aparatur; analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas; manajemen sumberdaya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur; manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur; pengukuran kinerja daerah; pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi.
 - (2) Menyusun kajian potensi pajak dan retribusi daerah; dan perbaikan regulasi pajak dan retribusi daerah;
 - (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola PAD; pemanfaatan teknologi informasi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah; penertiban ijin usaha.
 - (4) Pengamanan administrasi (dan pengamanan fisik Barang Milik Daerah serta perbaikan tata kelola Barang Milik Daerah.
 - (5) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; pengembangan zona integritas, dan peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
 - (6) Perbaikan mekanisme dan harmonisasi dalam perumusan kebijakan, dan penguatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah.
- 2) **Klaten Cekatan**. Cekatan singkatan dari Cepat, Kreatif, Akuntabel dan Transparan, merupakan program unggulan untuk mewujudkan pelayanan

publik yang cepat sesuai standar, kreatif (inovatif), transparan dan akuntabel sesuai dengan **prinsip** *good governance*, seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), Sipon Keduten, Matur Dokter, Titip Bandaku, dan lain-lain. Peningkatan pelayanan publik didorong agar berkualitas melalui digitalisasi pelayanan. Klaten Cerdas dengan fokus sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan
- (2) Pengembangan jaringan, sarana prasarana, dan aplikasi teknologi penunjang smart city
- (3) Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
- (4) Pelayanan persandian dalam pengamanan informasi
- (5) Peningkatan penyediaan data dan informasi single data Kabupaten Klaten
- (6) Perbaikan perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi kepegawaian.
- (7) Penerimaan ASN sesuai dengan kebutuhan, dan peningkatan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan.
- (8) Peningkatan forum *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (9) Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah
- (10) Pelayanan dokumen administrasi dan kependudukan dengan jemput bola; pelayanan keliling ke desa dan kelurahan; pelayanan bagi masyarakat difabel dan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan.
- (11) Penambahan dan peningkatkan kualitas SDM Pustakawan; Pengembangan bahan bacaan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan;
- (12) Pengembangan layanan buku digital
- (13) Penambahan dan Peningkatan kualitas SDM Arsiparis, dan peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan.
- (14) Penyediaan layanan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.
- (15) Penyediaan layanan sekretariat DPRD kepada DPRD yang berkualitas
- (16) Peningkatan penyediaan data dan informasi single data Kabupaten Klaten
- (17) Perbaikan perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi kepegawaian.
- (18) Penerimaan ASN sesuai dengan kebutuhan, dan peningkatan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan.
- (19) Peningkatan forum *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (20) Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah
- (21) Pelayanan dokumen administrasi dan kependudukan dengan jemput bola; pelayanan keliling ke desa dan kelurahan; pelayanan bagi masyarakat

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

difabel dan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan.

- (22) Penambahan dan peningkatkan kualitas SDM Pustakawan; Pengembangan bahan bacaan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan;
- (23) Pengembangan layanan buku digital
- (24) Penambahan dan Peningkatan kualitas SDM Arsiparis, dan peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan.
- (25) Penyediaan layanan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.
- (26) Penyediaan layanan sekretariat DPRD kepada DPRD yang berkualitas.

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Klaten dengan prioritas nasional tercantum pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
			Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		
			Ketersediaan pangan utama / beras	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		
			Ketersediaan pangan utama / beras	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
			ketersediaan energi	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Ketersediaan energi	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			ketersediaan protein	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Ketersediaan protein	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
			Persentase penanganan daerah rawan pangan	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		
			Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
			Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
			Persentase koperasi aktif	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
			Persentase koperasi yang patuh	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENILAIAN		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
			Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
			Persentase pengurus/pengawas/pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
			Persentase Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
			Persentase UMKM yang melakukan kemitraan	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
			Pertumbuhan usaha mikro	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
			Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/ Pendampingan	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
			Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
			Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
			Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal	
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
			Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal	
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
			Persentase pengendalian penanaman modal	
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
			Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
			Produksi perikanan tangkap	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
			Produksi perikanan budidaya	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
			Produksi perikanan budidaya	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
			Cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
			Jumlah produk olahan ikan	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
			Jumlah produk olahan ikan	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
			Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
			Tingkat intensitas promosi pariwisata	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
			Tingkat intensitas promosi pariwisata	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
			Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
			Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
			Persentase SDM pariwisata yang kompeten	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
			Produktivitas cabe	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Produktivitas tembakau asepan	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Produktivitas tembakau rajang	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
			Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil)	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
			Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil)	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
			Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
			Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
			Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
			Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
			Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
			Persentase kelompok tani madya dan utama	
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
			Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
			Jumlah pendapatan retribusi pasar	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
			Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
			Persentase PKL yang terbina	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
			Persentase Kinerja Pupuk	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
			Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting)	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
			Persentase pasar yang diawasi	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
			Jumlah komoditas yang mampu ekspor	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
			Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
			Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri	
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
			Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
			Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Pembangunan Manusia	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN JATINOM
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN JATINOM
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
			Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
			Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
			Persentase pelayanan ketataruangan	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
			Persentase pelayanan ketataruangan	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
			Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
			Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
				KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
			Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
			Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
			Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigrasi	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	
				KECAMATAN JATINOM
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	
				KECAMATAN JATINOM

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APK PAUD	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APK PAUD	
				DINAS PENDIDIKAN
			APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APK SD/MI/Paket A	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APK SD/MI/Paket A	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APK SMP/MTs /Paket B	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APK SMP/MTs /Paket B	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APK SMP/MTs/Paket B	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APK SMP/MTs/Paket B	
				DINAS PENDIDIKAN

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APM SD/MI/Paket A	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APM SD/MI/Paket A	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APM SMP/MTs/Paket B	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APM SMP/MTs/Paket B	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			APM SMP/MTs/Paket B	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Persentase Guru dan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Persentase Guru dan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		PENDIDIKAN		
			Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Persentase SD berakreditasi minimal B	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Persentase SD berakreditasi minimal B	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Persentase SMP berakreditasi minimal B	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Persentase SMP berakreditasi minimal B	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
			Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
			Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
			Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
			Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
			Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
			Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP	
				DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Rasio guru/murid PAUD	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
			Rasio guru/murid PAUD	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
			Rasio guru/murid SD/MI	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
			Rasio guru/murid SD/MI	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
			Rasio guru/murid SMP/MTs	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
			Rasio guru/murid SMP/MTs	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		
			Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Peningkatan Pelayanan BLUD	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
			Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Angka Kejadian DBD	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Angka Kejadian DBD	DINAS KESEHATAN

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Angka Kejadian HIV	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Angka Kejadian HIV	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Angka kejadian Malaria	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Angka kejadian Malaria	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Cakupan balita pneumonia yang ditangani	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Cakupan balita pneumonia yang ditangani	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	
				DINAS KESEHATAN

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Cakupan STBM	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Cakupan STBM	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Penderita diare yang ditangani	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Penderita diare yang ditangani	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			elayanan deteksi dini HIV sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase orang yang memerlukan intervensi	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase orang yang memerlukan intervensi	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase pelayanan lab klinis	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			dan lab air	
				DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				DINAS KESEHATAN
			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	
				DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)	
				DINAS KESEHATAN
			Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				DINAS KESEHATAN
			Persentase Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan untuk UKP	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase Sistem Informasi Kesehatan	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase Sistem Informasi Kesehatan	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN
			Prosentase Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	DINAS KESEHATAN
			Prosentase Pemenuhan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
			Persentase Puskesmas Memiliki Tenaga Kesehatan dan Akuntan sesuai standart	DINAS KESEHATAN
			persentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	DINAS KESEHATAN
			Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di puskesmas	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
			Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	DINAS KESEHATAN
			Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
			Cakupan Desa Siaga Aktif	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
			Cakupan Desa Siaga Aktif	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
			Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
			Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
			Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
			Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

BAB III**PRIORITAS BELANJA DAERAH**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
			Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
			Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
			Persentase desa/kelurahan layak anak	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
			Persentase desa/kelurahan layak anak	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
			Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
			Cakupan kepemilikan KK	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			memiliki KIA	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Persentase perekaman KTP elektronik	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
			Cakupan penerbitan akta kematian	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
			Cakupan penerbitan akta kematian	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
			Cakupan penerbitan akta pengesahan anak	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
			Cakupan penerbitan akta pengesahan anak	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
			Cakupan penerbitan akta perceraian	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
			Cakupan penerbitan akta perceraian	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
			Cakupan penerbitan akta perkawinan	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
			Cakupan penerbitan akta perkawinan	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
			Cakupan penerbitan pengangkatan anak	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
			Cakupan penerbitan pengangkatan anak	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		KEPENDUDUKAN		
			Persentase ketersediaan database kependudukan	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
			Persentase ketersediaan database kependudukan	
			Persentase ketersediaan database kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
			Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Persentase persediaan database kependudukan	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
			Persentase ketersediaan profil kependudukan tahunan	
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
			Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase BUMDes berkembang dan Maju	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase BUMDes berkembang dan Maju	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
			Persentasei desa yang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES dalam penatausahaan keuangan	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
			Persentase PKK aktif	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase Posyandu aktif	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Persentase Posyantek aktif	
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
			Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
			Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmetneed)	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
			Cakupan Anggota BKB yang menjadi peserta KB	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Cakupan Anggota BKL yang menjadi peserta KB	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Cakupan Anggota BKR yang menjadi peserta KB	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Cakupan Anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
			Persentase Informasi terkait program dan Kebijakan	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Persentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Persentase penambahan akses internet di ruang publik	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
			Persentase atlet berprestasi	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
			Persentase atlet berprestasi	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
			Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data indonesia	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
			Persentase ketersediaan statistik	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
			Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik	
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
			Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
			Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
			Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN JUWIRING
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN POLANHARJO
				KECAMATAN JATINOM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN JATINOM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	
				KECAMATAN JATINOM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN KLATEN SELATAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN JUWIRING
				KECAMATAN POLANHARJO
				KECAMATAN KEMALANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN POLANHARJO
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN POLANHARJO
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
			Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
			Persentase Pembinaan Sejarah	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
			Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
			Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Persentase Fasilitas Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
			Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
				SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
			Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
			Persentase Kinerja ASN bernilai baik	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
			Persentase Kinerja ASN bernilai baik	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
			Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
			Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
			Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
			Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya	
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
			Persentase pelaksanaan	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			pengawasan khusus	
				INSPEKTORAT
			Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1	
				INSPEKTORAT
			Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2	
				INSPEKTORAT
			Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3	
				INSPEKTORAT
			Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus	
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus	
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1	
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1	
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2	
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2	
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3	
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4	
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4	
				INSPEKTORAT
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
			Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
			Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
			Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
			Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
			Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
			Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
			Rasio luas daerah irigasi	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
			Persentase infrastruktur yang dibangun pada wilayah strategis dan cepat tumbuh kabupaten/kota	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
			Persentase infrastruktur yang dibangun pada wilayah strategis dan cepat tumbuh kabupaten/kota	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
			Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Persentase gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
			Persentase dokumen RTBL yang tersusun	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
			Persentase dokumen RTBL yang tersusun	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
			Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
			Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
			Persentase jalan kondisi baik	
				DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
				DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
			Persentase jalan kondisi baik	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
			Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
			Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
			Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
			Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
			Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
			Persentase Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Persentase PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
			Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang diterbitkan	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
			Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
			Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		
			Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
			Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi penerbitannya	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
			Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
			Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
			Persentase kecelakaan lalu lintas	
				DINAS PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
			Persentase kecelakaan lalu lintas	
				DINAS PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN JATINOM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN JATINOM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN JATINOM
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN JATINOM
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN JATINOM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
			Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
			Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
			Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
			Cakupan pemantauan kualitas air	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Cakupan pemantauan kualitas udara	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase kampung iklim yang terbentuk	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
			Persentase RTH publik yang dikelola dengan baik	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
			Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
			Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
			Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Persentase saka kalpataru yang dibina	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
			Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
			Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
			Persentase jumlah sampah yang berkurang	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase gangguan Trantibum	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			yang dapat diselesaikan	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
			Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase perpustakaan yang dibina	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
			Persentase arsip yang diakuisisi	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
			Persentase arsip yang diakuisisi	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
			Persentase pengawasan kearsipan internal	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
			Persentase pengawasan kearsipan internal	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
			Arsip usul musnah	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		ARSIP		
			Arsip usul musnah	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
			Persentase arsip yang dialihmediakan	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
			Persentase arsip yang dialihmediakan	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Persentase kasus Hukum yang menimpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Persentase kasus Hukum yang menimpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
			Persentase BLUD yang mendapat pembinaan teknis	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Kebijakan sumber daya alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai ketentuan	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada pemerintah daerah	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi daerah yang ditindaklanjuti	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapat akses keuangan	
				SEKRETARIAT DAERAH
			Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	
				SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				SEKRETARIAT DPRD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				SEKRETARIAT DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
			Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda	
				SEKRETARIAT DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
			Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda	
				SEKRETARIAT DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
			Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran	
				SEKRETARIAT DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
			Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran	
				SEKRETARIAT DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
			Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan	
				SEKRETARIAT DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
			Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan	
				SEKRETARIAT DPRD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase konsisten penjabaran	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			program RPJMD kedalam RKPD	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
			Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
			Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
			Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
			Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
			Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
			Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
			Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	
				BADAN PENGELOLAAN

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
				KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
			Rasio PAD	
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				INSPEKTORAT
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN PRAMBANAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN PRAMBANAN
				KECAMATAN GANTIWARNO
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN WEDI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN WEDI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN BAYAT
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN BAYAT
				KECAMATAN CAWAS
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN TRUCUK
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN TRUCUK
				KECAMATAN KEBONARUM
			Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				KECAMATAN KEBONARUM
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN JOGONALAN
				KECAMATAN MANISRENGGO
				KECAMATAN KARANGNONGKO
			persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				KECAMATAN CEPER
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN PEDAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN PEDAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	
				KECAMATAN KARANGDOWO
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN JUWIRING
				KECAMATAN WONOSARI
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
				KECAMATAN WONOSARI
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN DELANGGU
				KECAMATAN POLANHARJO
			Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	
				KECAMATAN KARANGANOM
			Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	
				KECAMATAN KARANGANOM
			Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	
				KECAMATAN KARANGANOM
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN KARANGANOM
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	
				KECAMATAN KARANGANOM
			presentasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	
				KECAMATAN KARANGANOM
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN TULUNG
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN JATINOM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN JATINOM
				KECAMATAN KEMALANG
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN NGAWEN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN NGAWEN
				KECAMATAN KALIKOTES
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajak terbayar	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
			Jumlah Mebel terpelihara	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
			Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN, dan Penyesesaian Laporan Keuangan tepat waktu	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
			0Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			pemerintahan daerah	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
				KECAMATAN KLATEN SELATAN
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				KECAMATAN KLATEN SELATAN
			Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				KECAMATAN KLATEN SELATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN PRAMBANAN
				KECAMATAN GANTIWARNO
				KECAMATAN WEDI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN BAYAT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN BAYAT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN CAWAS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN CAWAS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN TRUCUK
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN TRUCUK
			Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	
				KECAMATAN KEBONARUM
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN JOGONALAN
				KECAMATAN MANISRENGGO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN KARANGNONGKO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN KARANGNONGKO
			prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN CEPER
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN PEDAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN PEDAN
			Persentase Masyarakat Yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	
				KECAMATAN KARANGDOWO
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN JUWIRING
				KECAMATAN WONOSARI
				KECAMATAN DELANGGU
				KECAMATAN POLANHARJO
			Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN POLANHARJO
			Persentase Masyarakat yang	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	
				KECAMATAN KARANGANOM
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN KEMALANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN NGAWEN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	
				KECAMATAN NGAWEN
				KECAMATAN KLATEN UTARA
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
			Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)	
				KECAMATAN KLATEN SELATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN PRAMBANAN
				KECAMATAN GANTIWARNO
				KECAMATAN WEDI
				KECAMATAN BAYAT
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN CAWAS
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN CAWAS
				KECAMATAN KEBONARUM
				KECAMATAN JOGONALAN
				KECAMATAN MANISRENGGO
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
				KARANGNONGKO
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN KARANGNONGKO
			persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN CEPER
			persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN CEPER
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN PEDAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN PEDAN
			Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	
				KECAMATAN KARANGDOWO
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN JUWIRING
				KECAMATAN WONOSARI
				KECAMATAN DELANGGU
				KECAMATAN POLANHARJO
				KECAMATAN KARANGANOM
				KECAMATAN TULUNG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN JATINOM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN JATINOM
				KECAMATAN KEMALANG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN NGAWEN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN NGAWEN
				KECAMATAN KALIKOTES
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase lembaga masyarakat aktif	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
				KECAMATAN KLATEN SELATAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN PRAMBANAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN PRAMBANAN
				KECAMATAN GANTIWARNO
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN WEDI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN WEDI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN BAYAT
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN BAYAT
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN CAWAS
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN CAWAS
				KECAMATAN TRUCUK
				KECAMATAN KEBONARUM
				KECAMATAN JOGONALAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN MANISRENGGO
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN MANISRENGGO
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN KARANGNONGKO
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN KARANGNONGKO
			persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	
				KECAMATAN CEPER
			persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	
				KECAMATAN CEPER
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN PEDAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN PEDAN
				KECAMATAN KARANGDOWO
				KECAMATAN JUWIRING
				KECAMATAN WONOSARI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN DELANGGU
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN DELANGGU
				KECAMATAN POLANHARJO
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN KARANGANOM
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN KARANGANOM
				KECAMATAN TULUNG
		PROGRAM KOORDINASI		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN JATINOM
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN KEMALANG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN NGAWEN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN NGAWEN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN KALIKOTES
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN KALIKOTES
			persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			Kecamatan	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
				KECAMATAN KLATEN SELATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Persentase orang yang mengikuti koordinasi dan pembinaan (BIMTEK,Sosialisasi,Konsultasi) Kawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	
				KECAMATAN PRAMBANAN
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	
				KECAMATAN GANTIWARNO
				KECAMATAN WEDI
				KECAMATAN BAYAT
				KECAMATAN CAWAS
				KECAMATAN KEBONARUM
				KECAMATAN JOGONALAN
				KECAMATAN MANISRENGGO
				KECAMATAN KARANGNONGKO
			presentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	
				KECAMATAN CEPER
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	
				KECAMATAN PEDAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	
				KECAMATAN PEDAN
				KECAMATAN KARANGDOWO
				KECAMATAN JUWIRING
				KECAMATAN WONOSARI
				KECAMATAN DELANGGU
				KECAMATAN POLANHARJO
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangan	
				KECAMATAN KARANGANOM
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	
				KECAMATAN TULUNG
				KECAMATAN KEMALANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	
				KECAMATAN NGAWEN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		UMUM		
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	
				KECAMATAN NGAWEN
				KECAMATAN KALIKOTES
			Persentase potensi konflik sosial di Kecamatan yang tertangani	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
			Persentase Potensi Konflik Sosial di Kecamatan yang Tertangani	
				KECAMATAN KLATEN SELATAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN PRAMBANAN
			Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN PRAMBANAN
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN GANTIWARNO
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN GANTIWARNO
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN WEDI
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN WEDI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN BAYAT
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa tertib	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			administrasi	
				KECAMATAN BAYAT
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN BAYAT
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN BAYAT
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN CAWAS
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN CAWAS
			Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	
				KECAMATAN KEBONARUM
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN JOGONALAN
				KECAMATAN MANISRENGGO
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN MANISRENGGO
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN KARANGNONGKO
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN KARANGNONGKO
			prosentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan penganggaran dan pelporan tepat waktu	
				KECAMATAN CEPER
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN PEDAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN PEDAN

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN PEDAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN PEDAN
			Persentase Desa Tertib Administrasi	
				KECAMATAN KARANGDOWO
			Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	
				KECAMATAN KARANGDOWO
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN JUWIRING
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN WONOSARI
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN WONOSARI
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN DELANGGU
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN DELANGGU
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN POLANHARJO
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN POLANHARJO
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN KARANGANOM
			Presentasi desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN KARANGANOM
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN TULUNG
			Persentase desa yang	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN TULUNG
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN KEMALANG
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN KEMALANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN NGAWEN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN NGAWEN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN NGAWEN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN NGAWEN
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN KALIKOTES
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN KALIKOTES
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN KLATEN UTARA
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa tertib	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			administrasi	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN KLATEN TENGAH
			Persentase desa tertib administrasi	
				KECAMATAN KLATEN SELATAN
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	
				KECAMATAN KLATEN SELATAN
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
			Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
			Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase potensi konflik sosial	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana
1	2	3	4	5
			yang terselesaikan	
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selain harus selaras dengan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Kabupaten Klaten juga harus selaras dan mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Keselarasan antara prioritas pembangunan tahun 2023 Kabupaten Klaten dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah terlihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
53	1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana				
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.867.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.106.529.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase kelompok relawan bencana yang aktif		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.229.817.095
			Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.229.817.095
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.229.817.095
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.229.817.095
		PROGRAM PENCEGAHAN,			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.072.000
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.072.000
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.072.000
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	170.275.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11.393.421.349
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	778.976.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Cakupan pemantauan kualitas air		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	321.843.920
			Cakupan pemantauan kualitas udara		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	321.843.920
			Presentase kampung iklim yang terbentuk		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	321.843.920
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.440.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase fasilitasi		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			memenuhi komitmen izin pengelolaan limbah B3		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.000.000
			Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	69.152.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	178.897.000
			Persentase saka kalpataru yang dibina		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	178.897.000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19.661.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase jumlah sampah yang berkurang		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.290.545.100
			Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.290.545.100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	50.000.000
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	604.722.900
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	107.345.450

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	80.317.000
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum		
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30.000.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Jumlah produk olahan ikan		
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	70.000.000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang		
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	10.000.000
54	2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran				
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	167.000.000
			Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	167.000.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000
			Persentase PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang diterbitkan		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	268.506.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	388.750.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			ketersediaan energi		
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10.000.000
			ketersediaan protein		
				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Cakupan Anggota BKB yang menjadi peserta KB		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.500.000
			Cakupan Anggota BKL yang menjadi peserta KB		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.500.000
			Cakupan Anggota BKR yang menjadi peserta KB		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.500.000
			Cakupan Anggota UPPKS yang menjadi peserta KB		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.500.000
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.500.000
55	3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
				DINAS PENDIDIKAN	472.800.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK PAUD		
				DINAS PENDIDIKAN	15.692.139.000
			APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun		
				DINAS PENDIDIKAN	60.421.000
			APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun		
				DINAS PENDIDIKAN	7.749.426.000
			APK SD/MI/Paket A		
				DINAS PENDIDIKAN	7.824.847.000
			APK SMP/MTs /Paket B		
				DINAS PENDIDIKAN	7.749.426.000
			APK SMP/MTs/Paket B		
				DINAS PENDIDIKAN	75.421.000
			APM SD/MI/Paket A		
				DINAS PENDIDIKAN	7.824.847.000
			APM SMP/MTs/Paket B		
				DINAS PENDIDIKAN	7.824.847.000
			APM SMP/MTs/Paket B		
				DINAS PENDIDIKAN	7.749.426.000
			Persentase Guru dan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV		
				DINAS PENDIDIKAN	7.867.292.000
			Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV		
				DINAS PENDIDIKAN	7.867.292.000
			Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B		
				DINAS PENDIDIKAN	15.616.718.000
			Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)		
				DINAS PENDIDIKAN	15.000.000
			Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		
				DINAS PENDIDIKAN	15.559.273.000
			Persentase SD berakreditasi minimal B		
				DINAS PENDIDIKAN	15.498.852.000
			Persentase SMP berakreditasi minimal B		
				DINAS PENDIDIKAN	15.498.852.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
				DINAS KESEHATAN	28.349.266.341
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				DINAS KESEHATAN	20.028.665.198
			Persentase Pemenuhan Peningkatan Pelayanan BLUD		
				DINAS KESEHATAN	2.063.160.400
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				DINAS KESEHATAN	825.000.000
			Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				DINAS KESEHATAN	2.954.786.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka Kejadian DBD		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Angka Kejadian HIV		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Angka kejadian Malaria		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Cakupan balita pneumonia yang ditangani		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Cakupan STBM		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Penderita diare yang ditangani		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			standar		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase orang yang memerlukan intervensi		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase pelayanan lab klinis dan lab air		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				DINAS KESEHATAN	633.122.504
			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		
				DINAS KESEHATAN	82.893.750
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				DINAS KESEHATAN	2.234.708.844
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya		
				DINAS KESEHATAN	11.261.430.000
			Persentase Sistem Informasi Kesehatan		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				DINAS KESEHATAN	23.800.000
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita		
				DINAS KESEHATAN	50.502.290.907
			Prosentase Pemenuhan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				DINAS KESEHATAN	2.340.000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	92.792.096
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan		
				DINAS KESEHATAN	136.460.000
			Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan		
				DINAS KESEHATAN	136.460.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Cakupan Desa Siaga Aktif		
				DINAS KESEHATAN	489.606.552
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.373.432.136
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	45.000.000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.078.516.071
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	36.529.300
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase BUMDes berkembang dan Maju		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.054.721.125
			Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.054.721.125
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase PKK aktif		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	416.569.800
			Persentase Posyandu aktif		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	416.569.800
			Persentase Posyantek aktif		
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	416.569.800
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	30.000.000
			Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan		
				DINAS SOSIAL,	30.000.000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Angka pemakaian kontrasepsi/CPR		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	476.240.000
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	476.240.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Cakupan Anggota BKB yang menjadi peserta KB		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.000.000
			Cakupan Anggota BKL yang menjadi peserta KB		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.000.000
			Cakupan Anggota BKR yang menjadi peserta KB		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.000.000
			Cakupan Anggota UPPKS yang menjadi peserta KB		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.000.000
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			pemerintahan daerah		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	264.500.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38.865.000
			Persentase penambahan akses internet di ruang publik		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38.865.000
			Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38.865.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	92.050.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	54.477.536
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	54.477.536
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase atlet berprestasi		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	7.878.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	5.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	213.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		
				SEKRETARIAT DAERAH	408.653.000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		RAKYAT			
			Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan		
				SEKRETARIAT DAERAH	7.261.216.379
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				SEKRETARIAT DPRD	269.700.000
				KECAMATAN JATINOM	13.000.000
				KECAMATAN KLATEN SELATAN	29.897.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase lembaga masyarakat aktif		
				KECAMATAN JATINOM	230.000.000
			Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa		
				KECAMATAN JATINOM	1.000.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			terkoordinasinya penegakan perundang- undangan yang di lakukan		
				KECAMATAN JATINOM	35.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
				KECAMATAN JUWIRING	2.000.000
			Persentase desa tertib administrasi		
				KECAMATAN JATINOM	8.000.000
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
				KECAMATAN JATINOM	8.000.000
56	4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30.000.000
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	309.142.226
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.000.000
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.000.000
			Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.000.000
			Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.000.000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.000.000
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.000.000
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.889.241.191
				DINAS PERHUBUNGAN	5.385.874.984
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase kecelakaan lalu lintas		
				DINAS PERHUBUNGAN	4.555.391.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	202.199.000
			Persentase perpustakaan yang dibina		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	202.199.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	119.730.000
		PROGRAM PENGELOLAAN			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		ARSIP			
			Persentase arsip yang diakuisisi		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	192.033.000
			Persentase pengawasan kearsipan internal		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	192.033.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Arsip usul musnah		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	63.365.000
			Persentase arsip yang dialihmediakan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	63.365.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP		
				SEKRETARIAT DAERAH	2.034.999.856
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP		
				SEKRETARIAT DAERAH	12.000.000
			Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik		
				SEKRETARIAT DAERAH	2.034.999.856
			Presentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik		
				SEKRETARIAT DAERAH	12.000.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase BLUD yang mendapat pembinaan teknis		
				SEKRETARIAT DAERAH	177.000.000
			Persentase Kebijakan sumber daya alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan		
				SEKRETARIAT DAERAH	177.000.000
			Persentase pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada pemerintah daerah		
				SEKRETARIAT DAERAH	177.000.000
			Persentase rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi daerah yang ditindaklanjuti		
				SEKRETARIAT DAERAH	177.000.000
			Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapat akses keuangan		
				SEKRETARIAT DAERAH	177.000.000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda		
				SEKRETARIAT DPRD	1.593.113.021
			Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran		
				SEKRETARIAT DPRD	1.593.113.021
			Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan		
				SEKRETARIAT DPRD	1.593.113.021
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	485.138.000
			Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	485.138.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	135.000.000
			Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Wilayah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	135.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	17.806.605.156
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	188.852.200
			Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	227.037.258
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	32.000.000
			Pertumbuhan inovasi perangkat daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	32.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
				INSPEKTORAT	9.788.501.904
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase pelaksanaan pengawasan khusus		
				INSPEKTORAT	36.458.604
			Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1		
				INSPEKTORAT	36.458.604
			Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2		
				INSPEKTORAT	36.458.604
			Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3		
				INSPEKTORAT	36.458.604
			Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		
				INSPEKTORAT	36.458.604
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus		
				INSPEKTORAT	350.000.000
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1		
				INSPEKTORAT	350.000.000
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2		
				INSPEKTORAT	350.000.000
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3		
				INSPEKTORAT	350.000.000
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4		
				INSPEKTORAT	350.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KECAMATAN CAWAS	2.260.539.112
				KECAMATAN KEBONARUM	55.940.000
			Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				KECAMATAN KEBONARUM	1.000.000
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KECAMATAN MANISRENGGO	4.000.000
			persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
				KECAMATAN CEPER	2.647.636.154
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KECAMATAN PEDAN	2.000.000
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan		
				KECAMATAN KARANGDOWO	10.000.000
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN JUWIRING	2.344.072.448
				KECAMATAN WONOSARI	3.000.000
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KECAMATAN WONOSARI	92.000.000
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN DELANGGU	2.109.723.749
				KECAMATAN POLANHARJO	2.085.253.112
				KECAMATAN KALIKOTES	93.835.888
				KECAMATAN KLATEN UTARA	10.000.000
				KECAMATAN KLATEN SELATAN	4.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)		
				KECAMATAN KEBONARUM	1.000.000
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)		
				KECAMATAN JUWIRING	13.836.500
				KECAMATAN JATINOM	20.000.000
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan		
				KECAMATAN JATINOM	20.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
				KECAMATAN CEPER	166.885.500
			persentase lembaga masyarakat aktif		
				KECAMATAN CEPER	166.885.500
			Persentase lembaga masyarakat aktif		
				KECAMATAN PEDAN	10.000.000
			Persentase Lembaga Masyarakat Aktif		
				KECAMATAN KARANGDOWO	15.000.000
			Persentase lembaga masyarakat aktif		
				KECAMATAN DELANGGU	11.245.000
				KECAMATAN POLANHARJO	15.000.000
				KECAMATAN KEMALANG	13.000.000
				KECAMATAN NGAWEN	10.000.000
				KECAMATAN KLATEN UTARA	182.800.000
				KECAMATAN KLATEN TENGAH	6.256.500
				KECAMATAN KLATEN SELATAN	126.800.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan		
				KECAMATAN KEBONARUM	3.000.000
				KECAMATAN MANISRENGGO	145.000.000
				KECAMATAN PEDAN	186.000.000
				KECAMATAN KARANGDOWO	126.000.000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN JUWIRING	121.330.800
				KECAMATAN WONOSARI	78.000.000
				KECAMATAN DELANGGU	273.646.000
				KECAMATAN POLANHARJO	86.400.000
				KECAMATAN TULUNG	1.691.500
				KECAMATAN NGAWEN	221.343.000
				KECAMATAN KALIKOTES	89.400.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani		
				KECAMATAN MANISRENGGO	3.500.000
				KECAMATAN JUWIRING	7.375.000
				KECAMATAN WONOSARI	5.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		
				KECAMATAN KEBONARUM	32.750.000
			Persentase desa tertib administrasi		
				KECAMATAN MANISRENGGO	4.110.000
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
				KECAMATAN MANISRENGGO	4.110.000
			prosentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan penganggaran dan pelporan tepat waktu		
				KECAMATAN CEPER	36.707.560
			Persentase desa tertib administrasi		
				KECAMATAN PEDAN	53.000.000
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
				KECAMATAN PEDAN	53.000.000
				KECAMATAN JUWIRING	56.758.000
			Persentase desa tertib administrasi		
				KECAMATAN WONOSARI	7.000.000
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
				KECAMATAN WONOSARI	7.000.000
			Persentase desa tertib administrasi		
				KECAMATAN DELANGGU	18.000.000
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
				KECAMATAN DELANGGU	18.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.164.139.264
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			

				BADAN KESATUAN	46.400.000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				BANGSA DAN POLITIK	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.347.779.500
			Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.347.779.500
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			

				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	41.750.000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase deteksi dini potensi konflik sosial		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	292.000.000
			Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	292.000.000
57	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase jalan kondisi baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.500.000.000
			Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.500.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	4.344.932.376
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP		
				SEKRETARIAT DAERAH	32.809.305.376
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN	50.000.000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				PENGEMBANGAN	
			Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	50.000.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100.000.000
			Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	15.607.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	100.577.000
			Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	831.610.000
			Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	612.992.741.931
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase barang milik daerah yang teregistrasi		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	174.914.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Rasio PAD		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.368.520.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.031.890.656
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24.757.000
			Persentase Kinerja ASN bernilai baik		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24.757.000
			Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	381.309.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	562.012.650
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KECAMATAN MANISRENGGO	3.000.000
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				KECAMATAN KLATEN UTARA	6.000.000
			Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
				KECAMATAN KLATEN TENGAH	5.665.112.112
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)		
				KECAMATAN KLATEN UTARA	10.000.000
				KECAMATAN KLATEN TENGAH	2.500.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase lembaga masyarakat aktif		
				KECAMATAN KLATEN UTARA	85.000.000
				KECAMATAN KLATEN TENGAH	127.654.750
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan		
				KECAMATAN MANISRENGGO	2.000.000
				KECAMATAN TULUNG	78.702.250
			persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		
				KECAMATAN KLATEN UTARA	120.000.000
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan		
				KECAMATAN KLATEN TENGAH	2.500.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani		
				KECAMATAN KARANGDOWO	10.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Desa Tertib Administrasi		
				KECAMATAN KARANGDOWO	5.000.000
			Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu		
				KECAMATAN KARANGDOWO	5.000.000
			Persentase desa tertib administrasi		
				KECAMATAN KLATEN UTARA	26.000.000
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
				KECAMATAN KLATEN UTARA	26.000.000
			Persentase desa tertib administrasi		
				KECAMATAN KLATEN TENGAH	5.000.000
			Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
				KECAMATAN KLATEN TENGAH	5.000.000

Tahap berikutnya setelah penentuan prioritas program terkait dengan prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah penentuan prioritas pembangunan daerah berdasarkan prioritas Kabupaten Klaten. Prioritas pembangunan daerah berisi program-program pilihan yang jika dilaksanakan akan memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Matrik program prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal					
		Mengoptimalkan				

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	70.539.682.888
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
				Persentase koperasi aktif		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	160.000.000
				Persentase koperasi yang patuh		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	160.000.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
				Persentase pengurus/pengawas/pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	3.037.644.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
				Persentase UMKM yang melakukan kemitraan		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	120.000.000
				Pertumbuhan usaha mikro		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	120.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
				Produksi perikanan tangkap		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	100.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
				Produksi perikanan budidaya		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1.340.000.000
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	120.000.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
				Jumlah produk olahan ikan		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	280.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	24.237.445.984
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
				Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	29.392.931.532
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
				Tingkat intensitas promosi pariwisata		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	3.064.860.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	136.677.666.540
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
				Produktivitas cabe		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19.142.984.000
				Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19.142.984.000
				Produktivitas tembakau asepang		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19.142.984.000
				Produktivitas tembakau rajang		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19.142.984.000
			PROGRAM			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
				Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil)		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	16.040.000.000
				Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	16.040.000.000
				Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	16.040.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
				Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.260.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
				Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1.230.000.000
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
				Persentase kelompok tani madya dan utama		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.198.400.000
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
				Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina		
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	5.967.560.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
				Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	852.000.000
		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah				
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			DAERAH			
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.875.000.000
				Pertumbuhan inovasi perangkat daerah		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.875.000.000
		Meningkatnya investasi daerah				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.011.261.212
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
				Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi		
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	477.980.900
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
				Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan		
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	313.198.140
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
				Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal		
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	444.734.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
				Persentase pengendalian penanaman modal		
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.167.770.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
				Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	522.975.000
2	Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran					

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi				
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
				Ketersediaan pangan utama / beras		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12.224.012.000
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
				Ketersediaan energi		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.026.000.000
				Ketersediaan protein		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.026.000.000
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
				Persentase penanganan daerah rawan pangan		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200.000.000
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
				Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	140.000.000
		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah				
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	200.000.000
				Pertumbuhan inovasi perangkat daerah		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	200.000.000
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
				Cakupan Anggota BKB yang menjadi peserta KB		
					DINAS SOSIAL,	6.289.020.000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				Cakupan Anggota BKL yang menjadi peserta KB		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.289.020.000
				Cakupan Anggota BKR yang menjadi peserta KB		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.289.020.000
				Cakupan Anggota UPPKS yang menjadi peserta KB		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.289.020.000
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.289.020.000
		Meningkatnya investasi daerah				
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
				Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah		
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10.000.000
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
				Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.700.000.000
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
				Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota		
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	3.440.000.000
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan		
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	418.000.000
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
				Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigrasi		
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	356.000.000
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.527.550.000
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.883.551.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
				Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.868.637.000
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
				Persentase lembaga masyarakat aktif		
					KECAMATAN KLATEN TENGAH	150.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN PRAMBANAN	2.528.000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
				ketersediaan energi		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10.000.000
				ketersediaan protein		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
				Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN PRAMBANAN	2.528.000
3	Pengembangan kualitas sumber daya manusia					
		Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
				Persentase UMKM yang melakukan kemitraan		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	11.200.000.000
				Pertumbuhan usaha mikro		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	11.200.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
				Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/ Pendampingan		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	200.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
				Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	20.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
				Jumlah pelaku ekraf yang		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				difasilitasi HKI		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	118.984.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
				Persentase SDM pariwisata yang kompeten		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	2.698.264.000
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
				Jumlah pendapatan retribusi pasar		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	12.100.000.000
				Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	12.100.000.000
				Persentase PKL yang terbina		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	12.100.000.000
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
				Persentase Kinerja Pupuk		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	514.572.000
				Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting)		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	514.572.000
				Persentase pasar yang diawasi		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	514.572.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
				Jumlah komoditas yang mampu ekspor		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	560.000.000
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
				Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	40.000.000
			PROGRAM			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
				Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	360.000.000
		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27.507.552.315
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
				Persentase Informasi terkait program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.614.265.000
				Persentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.614.265.000
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.373.700.000
				Persentase penambahan akses internet di ruang publik		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.373.700.000
				Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.373.700.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
				Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data indonesia		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	760.525.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
				Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Perangkat Daerah		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	446.900.000
				Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	446.900.000
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	850.000.000
				Pertumbuhan inovasi perangkat daerah		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	850.000.000
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					DINAS KESEHATAN	227.783.851.832
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
				Angka Kejadian DBD		
					DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Angka Kejadian HIV		
					DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Angka kejadian Malaria		
					DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani		
					DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		
					DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		
					DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
					DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Cakupan STBM		
					DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk		
					DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Penderita diare yang ditangani		
					DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
					DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase orang yang memerlukan intervensi	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	DINAS KESEHATAN	22.844.909.812
				Persentase Sistem Informasi Kesehatan	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN	66.431.359.719
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
				Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	233.590.000
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan		
					DINAS KESEHATAN	445.002.000
				Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan		
					DINAS KESEHATAN	445.002.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
				Cakupan Desa Siaga Aktif		
					DINAS KESEHATAN	378.334.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
				Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	721.205.000
				Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	721.205.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
				Cakupan Anggota BKB yang menjadi peserta KB		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.000.000
				Cakupan Anggota BKL yang menjadi peserta KB		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.000.000
				Cakupan Anggota BKR yang menjadi peserta KB		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.000.000
				Cakupan Anggota UPPKS yang menjadi peserta KB		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.000.000
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	555.825.036
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	555.825.036
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
				Persentase atlet berprestasi		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	3.417.769.993
		Meningkatnya investasi daerah				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	160.000.000
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak				
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	154.900.000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					BERENCANA	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
				Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
				Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	222.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
				Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.000.000
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
				Persentase desa/kelurahan layak anak		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	491.600.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
				Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	30.000.000
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat				
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	207.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.235.548.213
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
				Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	109.587.900
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
				Persentase PKK aktif		
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.249.709.400
				Persentase Posyandu aktif		
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.249.709.400
				Persentase Posyantek aktif		
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.249.709.400
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
				Angka pemakaian kontrasepsi/CPR		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25.846.077.000
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25.846.077.000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					KECAMATAN JATINOM	13.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
				Persentase lembaga masyarakat aktif		
					KECAMATAN JATINOM	230.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN JATINOM	8.000.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN JATINOM	8.000.000
		Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					DINAS PENDIDIKAN	2.437.039.737.795
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				APK PAUD		
					DINAS PENDIDIKAN	154.062.188.000
				APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun		
					DINAS PENDIDIKAN	68.455.914.000
				APK SD/MI/Paket A		
					DINAS PENDIDIKAN	82.585.126.000
				APK SMP/MTs /Paket B		
					DINAS PENDIDIKAN	68.455.914.000
				APK SMP/MTs/Paket B		
					DINAS PENDIDIKAN	14.129.212.000
				APM SD/MI/Paket A		
					DINAS PENDIDIKAN	68.455.914.000
				APM SMP/MTs/Paket B		
					DINAS PENDIDIKAN	22.818.638.000
				APM SMP/MTs/Paket B		
					DINAS PENDIDIKAN	68.455.914.000
				Persentase Guru dan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV		
					DINAS PENDIDIKAN	43.747.850.000
				Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV		
					DINAS PENDIDIKAN	131.243.550.000
				Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B		
					DINAS PENDIDIKAN	112.203.764.000
				Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		
					DINAS PENDIDIKAN	91.274.552.000
				Persentase SD berakreditasi		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				minimal B		
				Persentase SMP berakreditasi minimal B	DINAS PENDIDIKAN	91.274.552.000
					DINAS PENDIDIKAN	91.274.552.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
				Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	DINAS PENDIDIKAN	1.777.242.000
				Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD		
					DINAS PENDIDIKAN	1.777.242.000
				Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP		
					DINAS PENDIDIKAN	1.777.242.000
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
				Rasio guru/murid PAUD		
					DINAS PENDIDIKAN	37.666.485.000
				Rasio guru/murid SD/MI		
					DINAS PENDIDIKAN	37.666.485.000
				Rasio guru/murid SMP/MTs		
					DINAS PENDIDIKAN	37.666.485.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
				Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan		
					DINAS PENDIDIKAN	85.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
				Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	6.023.555.166
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
				Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	452.940.600
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
				Persentase Pembinaan Sejarah		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	121.243.800

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					DINAS PENDIDIKAN	38.949.000
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					DINAS PENDIDIKAN	206.148.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				APK PAUD		
					DINAS PENDIDIKAN	75.421.000
				APK Pendidikan Kesetaraan		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Usia 16-18 tahun		
					DINAS PENDIDIKAN	60.421.000
				APK SD/MI/Paket A		
					DINAS PENDIDIKAN	72.795.421.000
				APK SMP/MTs/Paket B		
					DINAS PENDIDIKAN	66.466.021.000
				APM SD/MI/Paket A		
					DINAS PENDIDIKAN	72.795.421.000
				APM SMP/MTs/Paket B		
					DINAS PENDIDIKAN	66.466.021.000
				Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)		
					DINAS PENDIDIKAN	15.000.000
				Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		
					DINAS PENDIDIKAN	60.421.000
				Persentase SD berakreditasi minimal B		
					DINAS PENDIDIKAN	72.720.000.000
				Persentase SMP berakreditasi minimal B		
					DINAS PENDIDIKAN	66.390.600.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					DINAS KESEHATAN	40.949.478.561
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					DINAS KESEHATAN	20.028.665.198
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
					DINAS KESEHATAN	1.506.953.960
				Persentase Pemenuhan Peningkatan Pelayanan BLUD		
					DINAS KESEHATAN	2.063.160.400
				Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
					DINAS KESEHATAN	825.000.000
				Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					DINAS KESEHATAN	2.954.786.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
				Persentase Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					DINAS KESEHATAN	716.242.504
				Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		
					DINAS KESEHATAN	658.291.750
				Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
					DINAS KESEHATAN	19.344.365.709
				Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					DINAS KESEHATAN	548.141.504
				Persentase Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
					DINAS KESEHATAN	655.826.504
				Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
					DINAS KESEHATAN	761.141.120
				Prosentase Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		
					DINAS KESEHATAN	702.535.008
				Prosentase Pemenuhan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
					DINAS KESEHATAN	664.614.000
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
				Persentase Puskesmas Memiliki Tenaga Kesehatan dan Akuntan sesuai standart		
					DINAS KESEHATAN	36.829.912
				persentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar		
					DINAS KESEHATAN	47.352.744
				Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar		
					DINAS KESEHATAN	1.249.775.242
				Persentase Puskesmas Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		
					DINAS KESEHATAN	47.352.744
				Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di puskesmas		
					DINAS KESEHATAN	75.737.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
				Cakupan Desa Siaga Aktif		
					DINAS KESEHATAN	304.884.352
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
				Persentase BUMDes berkembang dan Maju		
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.063.721.125
				Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu		
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.063.721.125
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN			
				Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa		
					KECAMATAN JATINOM	1.000.000
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
				terkoodinasinya penegakan perundang- undangan yang di lakukan		
					KECAMATAN JATINOM	35.000.000
4	Peningkatan kualitas sarana					

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	dan prasarana wilayah					
		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah				
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	200.000.000
				Pertumbuhan inovasi perangkat daerah		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	200.000.000
		Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100)				
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
				Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.957.570.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
				Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.103.820.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.653.570.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.089.625.352
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
				Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.417.000.000
				Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.417.000.000
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
				Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.280.000.000
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani		
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.967.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
				Persentase Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik		
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.700.000.000
				Persentase PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan		
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.700.000.000
		Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					DINAS PERHUBUNGAN	34.601.571.984
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
				Persentase kecelakaan lalu lintas		
					DINAS PERHUBUNGAN	16.128.202.000
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					KECAMATAN KLATEN UTARA	2.913.040
					KECAMATAN KLATEN TENGAH	142.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
				Persentase lembaga masyarakat aktif		
					KECAMATAN KLATEN UTARA	1.590.000
					KECAMATAN KLATEN TENGAH	145.000.000
		Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	88.343.637.780
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	56.469.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
				Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.681.682.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
				Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	247.235.600.220
				Persentase gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	247.235.600.220
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
				Persentase jalan kondisi baik		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	210.641.154.000
				Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	210.641.154.000
		Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing				
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
				Persentase Pembinaan Sejarah		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	59.175.000
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
				Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	133.738.371
		Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang				
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
				Persentase dokumen RTBL yang tersusun		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	600.000.000
				Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	600.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
				Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	350.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
				Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang diterbitkan		
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			GARAPAN			
				Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan		
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
				Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu		
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.075.000.000
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
				Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya		
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
				Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun		
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000

			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	300.000.000
				Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	300.000.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
				Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani		
					KECAMATAN KARANGDOWO	10.000.000
5	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan					

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	hidup					
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat				
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
				Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	600.825.000
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37.224.520.047
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
				Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.336.928.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
				Cakupan pemantauan kualitas air		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	965.531.760
				Cakupan pemantauan kualitas udara		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	965.531.760
				Persentase kampung iklim yang terbentuk		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	965.531.760
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
				Persentase RTH publik yang dikelola dengan baik		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13.320.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	267.456.000
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
				Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	536.691.000
				Persentase saka kalpataru yang dibina		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	536.691.000
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
				Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.290.000.000
				Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.290.000.000
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
				Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	118.983.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
				Persentase jumlah sampah yang berkurang		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33.704.364.267
				Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33.704.364.267
		Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)				
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
				Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				pengelolaan limbah B3		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40.000.000
		Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing				
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
				Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	270.864.432
		Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
				Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.198.682.000
				Persentase pelayanan ketataruangan		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.198.682.000
				Persentase pengendalian pemanfaatan ruang		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.198.682.000

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.783.176.305
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
				Persentase kelompok relawan bencana yang aktif		
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.169.917.095
				Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi		
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.169.917.095
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.169.917.095
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.169.917.095

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
				Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.000.000
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100.000.000
				Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100.000.000
6	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi					
		Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	21.127.282.392
		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun		
					SEKRETARIAT DAERAH	2.871.600.000
				Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik		
					SEKRETARIAT DAERAH	3.672.200.000
				Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					SEKRETARIAT DAERAH	185.783.852.600
				Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik		
					SEKRETARIAT DAERAH	15.585.599.280
				Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi		
					SEKRETARIAT DAERAH	2.871.600.000
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
				Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana		
					SEKRETARIAT DAERAH	1.720.715.000
				Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum		
					SEKRETARIAT DAERAH	4.021.200.000
				Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana		
					SEKRETARIAT DAERAH	1.720.715.000
				Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan		
					SEKRETARIAT DAERAH	4.021.200.000
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
				Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement		
					SEKRETARIAT DAERAH	2.783.025.000
				Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan		
					SEKRETARIAT DAERAH	1.506.985.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	27.346.476.245
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
				Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.109.110.000
				Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.109.110.000
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.000.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	97.444.945.780
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
				Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)		
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	4.028.340.000
				Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)		
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	6.558.050.000
				Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah		
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3.145.300.239.655
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
				Persentase barang milik daerah yang teregistrasi		
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	9.023.283.225
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
				Rasio PAD		
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	12.546.551.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28.222.299.530
			PROGRAM KEPEGAWAIAN			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			DAERAH			
				Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	774.205.000
				Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.975.915.500
				Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.196.449.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
				Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.973.355.500
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650.000.000
				Pertumbuhan inovasi perangkat daerah		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	650.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					INSPEKTORAT	61.299.231.440
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
				Persentase pelaksanaan pengawasan khusus		
					INSPEKTORAT	3.862.788.020
				Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1		
					INSPEKTORAT	3.862.788.020
				Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2		
					INSPEKTORAT	3.862.788.020
				Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3		
					INSPEKTORAT	3.862.788.020
				Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		
					INSPEKTORAT	3.862.788.020
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Pengawasan khusus		
					INSPEKTORAT	13.506.989.670
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1		
					INSPEKTORAT	13.506.989.670
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2		
					INSPEKTORAT	13.506.989.670
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3		
					INSPEKTORAT	13.506.989.670
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4		
					INSPEKTORAT	13.506.989.670
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.883.123.573
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.079.377.833
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
				Cakupan kepemilikan KK		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	645.030.000
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	645.030.000
				Persentase perekaman KTP elektronik		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	645.030.000
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
				Cakupan penerbitan akta kematian		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	331.860.000
				Cakupan penerbitan akta pengesahan anak		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN	331.860.000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					PENCATATAN SIPIL	
				Cakupan penerbitan akta perceraian		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	331.860.000
				Cakupan penerbitan akta perkawinan		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	331.860.000
				Cakupan penerbitan pengangkatan anak		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	331.860.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
				Persentase ketersediaan profil kependudukan tahunan		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	53.882.000
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
				Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	202.199.000
				Persentase perpustakaan yang dibina		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	202.199.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.260.136.631
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
				Persentase arsip yang diakuisisi		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	192.033.000
				Persentase pengawasan kearsipan internal		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	192.033.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
				Arsip usul musnah		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	73.365.000
				Persentase arsip yang dialihmediakan		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	73.365.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				pemerintahan daerah		
					SEKRETARIAT DPRD	40.599.169.979
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
				Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda		
					SEKRETARIAT DPRD	18.302.519.000
				Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penggangan		
					SEKRETARIAT DPRD	18.302.519.000
				Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan		
					SEKRETARIAT DPRD	18.302.519.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					KECAMATAN PRAMBANAN	2.757.241.808
					KECAMATAN GANTIWARNOW	2.169.110.208
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					KECAMATAN WEDI	2.586.239.545
					KECAMATAN BAYAT	2.345.601.847
					KECAMATAN CAWAS	2.629.629.612
					KECAMATAN TRUCUK	2.139.583.700
					KECAMATAN KEBONARUM	2.156.847.112
					KECAMATAN JOGONALAN	2.312.295.641
					KECAMATAN MANISRENGGO	2.661.998.344
					KECAMATAN KARANGNONGKO	2.455.061.093
					KECAMATAN PEDAN	2.036.537.610
					KECAMATAN JUWIRING	2.818.698.509
					KECAMATAN WONOSARI	2.624.812.312
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		
					KECAMATAN DELANGGU	2.392.840.479
					KECAMATAN POLANHARJO	2.328.185.512
					KECAMATAN KARANGANOM	6.260.000
					KECAMATAN TULUNG	2.750.133.515
					KECAMATAN JATINOM	2.906.918.739
					KECAMATAN KEMALANG	2.380.345.208
					KECAMATAN NGAWEN	2.156.525.192
					KECAMATAN KALIKOTES	2.575.459.938
					KECAMATAN KLATEN UTARA	249.696.960
					KECAMATAN KLATEN TENGAH	6.514.495.701
					KECAMATAN KLATEN SELATAN	62.643.450
			PROGRAM PENYELENGGARAAN			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
				Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)		
					KECAMATAN PRAMBANAN	4.000.000
					KECAMATAN GANTIWARNO	5.000.000
					KECAMATAN WEDI	3.000.000
					KECAMATAN BAYAT	4.000.000
					KECAMATAN CAWAS	3.119.000
					KECAMATAN TRUCUK	4.180.000
					KECAMATAN JOGONALAN	1.500.000
					KECAMATAN MANISRENGGO	2.000.000
					KECAMATAN KARANGNONGKO	7.000.000
					KECAMATAN PEDAN	5.000.000
					KECAMATAN DELANGGU	3.017.000
					KECAMATAN POLANHARJO	4.958.000
					KECAMATAN TULUNG	1.837.400
					KECAMATAN JATINOM	20.000.000
				Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan		
					KECAMATAN JATINOM	20.000.000
				Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)		
					KECAMATAN KEMALANG	5.950.000
					KECAMATAN NGAWEN	9.916.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
				Persentase lembaga masyarakat aktif		
					KECAMATAN PRAMBANAN	62.000.000
					KECAMATAN GANTIWARNO	72.965.648
					KECAMATAN WEDI	78.500.000
					KECAMATAN BAYAT	60.076.000
					KECAMATAN CAWAS	78.099.134
					KECAMATAN TRUCUK	104.222.135
					KECAMATAN KEBONARUM	75.800.000
					KECAMATAN JOGONALAN	72.965.916
					KECAMATAN MANISRENGGO	25.000.000
					KECAMATAN KARANGNONGKO	65.000.000
					KECAMATAN PEDAN	106.999.000
					KECAMATAN JUWIRING	138.074.000
					KECAMATAN DELANGGU	81.377.000
					KECAMATAN POLANHARJO	169.033.161
					KECAMATAN KARANGANOM	151.310.587
					KECAMATAN TULUNG	104.827.070
					KECAMATAN JATINOM	129.950.000
					KECAMATAN KEMALANG	35.925.000
					KECAMATAN KALIKOTES	65.000.000
					KECAMATAN KLATEN UTARA	345.800.000
					KECAMATAN KLATEN TENGAH	748.171.030
					KECAMATAN KLATEN	180.000.000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					SELATAN	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
				Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan		
					KECAMATAN PRAMBANAN	106.000.000
					KECAMATAN GANTIWARNO	109.500.000
					KECAMATAN WEDI	147.500.000
					KECAMATAN BAYAT	256.969.000
					KECAMATAN CAWAS	109.705.000
					KECAMATAN TRUCUK	247.981.000
					KECAMATAN KEBONARUM	89.400.000
					KECAMATAN JOGONALAN	119.026.750
					KECAMATAN MANISRENGGO	147.000.000
					KECAMATAN KARANGNONGKO	140.000.000
					KECAMATAN PEDAN	314.000.000
					KECAMATAN JUWIRING	121.330.800
					KECAMATAN DELANGGU	273.646.000
					KECAMATAN POLANHARJO	96.400.000
					KECAMATAN KARANGANOM	148.550.000
					KECAMATAN TULUNG	88.175.500
					KECAMATAN JATINOM	55.000.000
					KECAMATAN KEMALANG	128.175.000
					KECAMATAN NGAWEN	320.840.000
					KECAMATAN KALIKOTES	92.400.000
					KECAMATAN KLATEN TENGAH	94.000.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
				Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani		
					KECAMATAN GANTIWARNO	171.500.000
					KECAMATAN WEDI	20.500.000
					KECAMATAN BAYAT	9.162.000
					KECAMATAN CAWAS	170.000.000
					KECAMATAN TRUCUK	8.875.000
					KECAMATAN KEBONARUM	165.000.000
					KECAMATAN JOGONALAN	154.400.000
					KECAMATAN MANISRENGGO	7.000.000
					KECAMATAN KARANGNONGKO	176.000.000
					KECAMATAN DELANGGU	7.584.500
					KECAMATAN POLANHARJO	175.177.000
					KECAMATAN TULUNG	188.345.200
					KECAMATAN JATINOM	192.000.000
					KECAMATAN KEMALANG	175.500.000
					KECAMATAN NGAWEN	2.975.000
					KECAMATAN KALIKOTES	168.000.000
					KECAMATAN KLATEN TENGAH	38.077.500
			PROGRAM			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN PRAMBANAN	113.000.000
					KECAMATAN GANTIWARNO	94.200.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN GANTIWARNO	94.200.000
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN WEDI	238.597.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN WEDI	238.597.000
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN BAYAT	107.444.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN BAYAT	107.444.000
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN CAWAS	98.986.500
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN CAWAS	98.986.500
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN TRUCUK	83.631.500
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN TRUCUK	83.631.500
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN JOGONALAN	84.262.300
					KECAMATAN MANISRENGGO	198.730.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN MANISRENGGO	198.730.000
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN KARANGNONGKO	75.500.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN KARANGNONGKO	75.500.000
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN PEDAN	88.000.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN PEDAN	88.000.000
				Persentase desa tertib administrasi		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					KECAMATAN POLANHARJO	88.860.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN POLANHARJO	88.860.000
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN KARANGANOM	121.792.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN TULUNG	109.137.015
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN JATINOM	39.150.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN JATINOM	39.150.000
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN KEMALANG	63.726.874
					KECAMATAN NGAWEN	46.372.500
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN NGAWEN	46.372.500
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN KLATEN TENGAH	135.555.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN KLATEN TENGAH	135.555.000
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN KLATEN SELATAN	95.180.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN KLATEN SELATAN	95.180.000
		Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing				
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
				Persentase Pembinaan Sejarah		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	116.869.800
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
				Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan		
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	135.549.471
		Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum, dan				

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		perlindungan masyarakat				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12.751.386.772
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.800.710.786
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.800.710.786
				Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.800.710.786
				Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.800.710.786
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
				Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.404.448.044
				Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.386.448.044
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.404.448.044
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.259.418.436
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
				Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu		
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.695.559.000
				Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik		
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.695.559.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
				Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan		
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	560.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
				Persentase deteksi dini potensi konflik sosial		
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	584.000.000
				Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan		
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	584.000.000

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					DINAS KESEHATAN	1.588.960.000
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
				Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
				Persentase ketersediaan database kependudukan		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	34.619.000
				Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	44.619.000
				Persentase persediaan database kependudukan		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara		
					SEKRETARIAT DAERAH	49.440.000
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		
					SEKRETARIAT DAERAH	57.630.000
				Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP		
					SEKRETARIAT DAERAH	3.329.999.856
				Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Setda yang sesuai SOP		
					SEKRETARIAT DAERAH	26.520.000
				Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP		
					SEKRETARIAT DAERAH	40.390.188
				Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik		
					SEKRETARIAT DAERAH	398.350.144
				Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu		
					SEKRETARIAT DAERAH	48.300.000
				Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu		
					SEKRETARIAT DAERAH	99.751.496
				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu		
					SEKRETARIAT DAERAH	2.000.000
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		
					SEKRETARIAT DAERAH	408.653.000
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Pemerintah Daerah tepat waktu		
					SEKRETARIAT DAERAH	39.000.000
				Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu		
					SEKRETARIAT DAERAH	14.500.000
				Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu		
					SEKRETARIAT DAERAH	200.000.000
				Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik		
					SEKRETARIAT DAERAH	12.000.000
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
				Persentase Fasilitas Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan		
					SEKRETARIAT DAERAH	7.261.216.379
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
				Persentase BLUD yang mendapat pembinaan teknis		
					SEKRETARIAT DAERAH	2.357.000.000
				Persentase Kebijakan sumber daya alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan		
					SEKRETARIAT DAERAH	2.357.000.000
				Persentase kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai ketentuan		
					SEKRETARIAT DAERAH	4.676.201.812
				Persentase pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada pemerintah daerah		
					SEKRETARIAT DAERAH	2.357.000.000
				Persentase rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi daerah yang ditindaklanjuti		
					SEKRETARIAT DAERAH	2.357.000.000
				Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapat akses keuangan		
					SEKRETARIAT DAERAH	2.357.000.000
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	200.000.000
				Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Wilayah		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	600.000.000
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
				Persentase Kinerja ASN bernilai baik		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	154.841.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					KECAMATAN KEBONARUM	2.000.000
				persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					KECAMATAN CEPER	2.830.448.154
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan		
					KECAMATAN KARANGDOWO	2.583.817.848
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					KECAMATAN WONOSARI	254.490.160
				Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		
					KECAMATAN KARANGANOM	1.942.983.184
				Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu		
					KECAMATAN KARANGANOM	41.835.400
				Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat wakt		
					KECAMATAN KARANGANOM	124.057.360
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		
					KECAMATAN KARANGANOM	21.700.000
				presentasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		
					KECAMATAN KARANGANOM	95.823.240
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
					KECAMATAN KLATEN UTARA	36.000.000
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					KECAMATAN KLATEN UTARA	3.465.048.081
				0Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan		

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				pemerintahan daerah tepat waktu		
					KECAMATAN KLATEN TENGAH	79.503.000
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					KECAMATAN KLATEN SELATAN	110.556.550
				Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
					KECAMATAN KLATEN SELATAN	2.616.806.160
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
				Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)		
					KECAMATAN KEBONARUM	1.000.000
				prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)		
					KECAMATAN CEPER	2.000.000
				Persentase Masyarakat Yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)		
					KECAMATAN KARANGDOWO	5.000.000
				Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)		
					KECAMATAN JUWIRING	13.836.500
					KECAMATAN WONOSARI	5.000.000
				Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)		
					KECAMATAN POLANHARJO	10.500.000
				Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)		
					KECAMATAN KARANGANOM	54.805.000
				Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)		
					KECAMATAN KLATEN UTARA	10.000.000
					KECAMATAN KLATEN TENGAH	2.500.000
				Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)		
					KECAMATAN KLATEN SELATAN	5.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
				persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN CEPER	166.885.500
				persentase lembaga masyarakat aktif		
					KECAMATAN CEPER	166.885.500
				Persentase Lembaga Masyarakat Aktif		
					KECAMATAN KARANGDOWO	339.000.000
				Persentase lembaga masyarakat aktif		
					KECAMATAN	341.510.280

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					WONOSARI	
					KECAMATAN NGAWEN	54.300.061
					KECAMATAN KLATEN UTARA	85.000.000
					KECAMATAN KLATEN TENGAH	8.459.760
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
				persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		
					KECAMATAN CEPER	54.703.000
				persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan		
					KECAMATAN CEPER	25.900.000
				Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan		
					KECAMATAN KARANGDOWO	126.000.000
					KECAMATAN WONOSARI	83.000.000
				persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		
					KECAMATAN KLATEN UTARA	120.000.000
				Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan		
					KECAMATAN KLATEN SELATAN	94.400.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
				Persentase orang yang mengikuti koordinasi dan pembinaan (BIMTEK,Sosialisasi,Konsultasi) Kawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		
					KECAMATAN PRAMBANAN	183.000.000
				presentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani		
					KECAMATAN CEPER	4.000.000
				Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani		
					KECAMATAN JUWIRING	7.375.000
					KECAMATAN WONOSARI	10.000.000
				Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangan		
					KECAMATAN KARANGANOM	39.540.000
				Persentase potensi konflik sosial di Kecamatan yang tertangani		
					KECAMATAN KLATEN UTARA	165.000.000
				Persentase Potensi Konflik Sosial di Kecamatan yang Tertangani		
					KECAMATAN KLATEN SELATAN	171.899.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN			

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
				Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN PRAMBANAN	113.000.000
				Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		
					KECAMATAN KEBONARUM	32.750.000
				prosentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN CEPER	231.900.010
				Persentase Desa Tertib Administrasi		
					KECAMATAN KARANGDOWO	68.500.000
				Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu		
					KECAMATAN KARANGDOWO	68.500.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN JUWIRING	58.758.000
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN WONOSARI	53.000.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN WONOSARI	53.000.000
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN DELANGGU	60.995.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN DELANGGU	60.995.000
				Presentasi desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN KARANGANOM	121.792.000
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN TULUNG	109.137.015
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN KEMALANG	63.726.874
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN KALIKOTES	57.000.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN	57.000.000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
					KALIKOTES	
				Persentase desa tertib administrasi		
					KECAMATAN KLATEN UTARA	26.000.000
				Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu		
					KECAMATAN KLATEN UTARA	26.000.000
			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46.400.000
			PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	41.750.000

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan beserta indikator kinerja yang merupakan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk seluruh perangkat daerah di tahun 2023 tersaji dalam Tabel 3.5 sebagaimana terlampir (Lampiran 1).

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah yang merupakan bagian dari APBD salah satunya digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan juga urusan penunjang pemerintahan.

Plafon anggaran sementara untuk masing masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagaimana terlampir (**Lampiran 2**).

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Adapun plafon anggaran sementara untuk Belanja Operasi, Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
A	Belanja Operasi	1.949.417.054.429
1	Belanja Pegawai	1.237.142.585.875
2	Belanja Barang dan Jasa	641.565.316.304
3	Belanja Subsidi	2.000.000.000
4	Belanja Hibah	59.243.223.250
5	Belanja Bantuan Sosial	9.465.929.000
B	Belanja Modal	239.827.602.050
1	Belanja Modal Tanah	4.800.000.000
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.250.637.400
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.188.482.000

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	74.325.876.130
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	17.262.606.520
C	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000
D	Belanja Transfer	612.590.241.931
1	Belanja Bagi Hasil	14.876.335.339
2	Belanja Bantuan Keuangan	597.713.906.592
	TOTAL	2.817.834.898.410

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari dua jenis, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Klaten tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Rencana Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2023 hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Diperkirakan SiLPA tahun 2023 mencapai Rp. 306.603.501.581,00.

5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Daerah. Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 24.300.000.000,00 yang dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal daerah.

Tabel 5.1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	306.603.501.581
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	306.603.501.581
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	306.603.501.581
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	24.300.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.300.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.300.000.000
	Pembiayaan Netto	282.303.501.581

Tabel 3.5
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	Kab. Klaten
							1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Klaten
							1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Klaten
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6000 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	Kab. Klaten
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang	100 %	1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Klaten
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100 %	1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5800 Dokumen	Kab. Klaten
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
					Persentase pemenuhan kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah	100 %		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	
							1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	
							1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	Kab. Klaten
							1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	
							1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	
							1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Kab. Klaten
			1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 %	1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	Kab. Klaten	
				Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	100 %		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		
			1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
				Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		
				Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %					
						1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	Kab. Klaten	
						1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	100 %	1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana	100 %		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	225 Unit		
						1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		
						1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit		
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	89,15 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	42 %	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	Kab. Klaten	
	APK PAUD	89.15 %		Persentase sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik	73 %					
	APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	1.85 %		Persentase SD terakreditasi	99.8 %					
	APK SD/MI/Paket A	96,9 %		Persentase siswa SD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikan	63.6 %					
	APK SD/MI/Paket A	96.9 %		Tersedianya biaya operasional pendidikan SD	100 %					
	APK SMP/MTs /Paket B	98.45 %								
	APM SD/MI/Paket A	88,95 %								
	APM SD/MI/Paket A	88.95 %								
	APM SMP/MTs/Paket B	71,6 %								

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		APM SMP/MTs/Paket B	71.6 %							
		Persentase Guru dan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	99,75							
		Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	88.7 %							
		Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	36,95 %							
		Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	36.95 %							
		Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	94,80 %							
		Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99.75 %							
		Persentase SD berakreditasi minimal B	98 %							
		Persentase SD berakreditasi minimal B	98,00 %							
		Persentase SMP berakreditasi minimal B	86,9 %							
		Persentase SMP berakreditasi minimal B	86.9 %							
						1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		Kab. Klaten
						1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang		Kab. Klaten
						1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		Kab. Klaten
						1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang		Kab. Klaten
						1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang		Kab. Klaten
						1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit		Kab. Klaten
						1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	20 Paket		Kab. Klaten
						1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1400 Unit		Kab. Klaten
						1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	56945 Peserta Didik		Kab. Klaten
						1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	15 Paket		Kab. Klaten
						1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan	738 Satuan Pendidikan		Kab. Klaten
						1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	738 Satuan Pendidikan		Kab. Klaten

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 Peserta Didik	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	Kab. Klaten
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	738 Satuan Pendidikan	Kab. Klaten
							1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	734 Satuan Pendidikan	Kab. Klaten
							1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	738 Orang	Kab. Klaten
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	55.3 %	1.01.02.2.02.10 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir dibangun	0 unit		
				Persentase sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik	78 %		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit		
				Persentase siswa SMP menerima yang pembebasan biaya pendidikan	60.5 %					
				Persentase SMP terakreditasi	97 %					
				Tersedianya biaya operasional pendidikan SMP	100 %					
						1.01.02.2.02.11 Pembangunan Kantin Sekolah	-	0 -		
							-	0 0		
						1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	Kab. Klaten	
						1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	-	0 -		
							-	0 0		
						1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	35 Ruang	Kab. Klaten	
						1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	Kab. Klaten	
						1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	0 -		
							-	0 0		
						1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	0 -		
							-	0 Ruang		
						1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	Kab. Klaten	
						1.01.02.2.02.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	-	0 -		
							-	0 Ruang		
						1.01.02.2.02.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	-	0 -		
							-	0 Unit		
						1.01.02.2.02.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	-	0 -		
							Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit		
						1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	39 Unit	Kab. Klaten	
						1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	Kab. Klaten	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	0 -	Kab. Klaten
							1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1408 Paket	Kab. Klaten
							1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	27098 Peserta Didik	Kab. Klaten
							1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 Paket	Kab. Klaten
							1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	15534 Peserta Didik	Kab. Klaten
							1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	116 Satuan Pendidikan	Kab. Klaten
							1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	Kab. Klaten
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	Kab. Klaten
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	116 Satuan Pendidikan	Kab. Klaten
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	0 -	Kab. Klaten
							-	0 Satuan Pendidikan		
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	115 Satuan Pendidikan		
							1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	116 Orang	Kab. Klaten
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik	55.4 %	1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kab. Klaten	
				Persentase PAUD terakreditasi	42.32 %					
				Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	46.7 %					
				Persentase siswa PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.3 %					
				Persentase siswa PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100 %					
						1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kab. Klaten	
						1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 paket	Kab. Klaten	
						1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	Kab. Klaten	
						1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	24 peserta didik	Kab. Klaten	
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	300 Peserta Didik		
						1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	300 Satuan Pendidikan	Kab. Klaten	
						1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	Kab. Klaten	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	Kab. Klaten
							1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1150 Satuan Pendidikan	Semua Kab/Kota
							1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1150 orang	Kab. Klaten
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase PKBM terakreditasi	16 %	1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	Kab. Klaten	
				Persentase sarana dan prasarana PKBM dalam kondisi baik	48 %					
				Persentase siswa kesetaraan/Nonformal yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100 %					
				Persentase siswa PKBM yang menerima pembebasan biaya pendidikan	76.5 %					
						1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 paket	Kab. Klaten	
						1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	248 peserta didik	Kab. Klaten	
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	600 Peserta Didik		
						1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	200 Satuan Pendidikan	Kab. Klaten	
						1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan	Kab. Klaten	
						1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9 Satuan Pendidikan	Kab. Klaten	
						1.01.02.2.04.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	100 %	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	99 %	1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	100 Orang	Kab. Klaten	
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD	100 %								
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP	100 %								
			1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase lembaga PAUD dan PNF menerapkan kurikulum muatan lokal	98.5 %	1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	Kab. Klaten	
						1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	100 Dokumen	Kab. Klaten	
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid PAUD	1 : 10 rasio	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru pada satuan pendidikan dasar dengan beban mengajar sama dengan atau lebih dari 24 jam	88 %	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 dokumen	Kab. Klaten	
	Rasio guru/murid SD/MI	1 : 15 rasio								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Rasio guru/murid SMP/MTs	1 : 15 rasio							
						1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 laporan	Kab. Klaten	
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan	100 %	1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang menerapkan pendidikan bahasa dan sastra Jawa	97.25 %	1.01.06.2.01.02 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 Bahasa	Kab. Klaten
						1.01.06.2.01.06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Peserta Didik	Kab. Klaten	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	Kab. Klaten
							1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	Kab. Klaten
							1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 laporan	Kab. Klaten
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	239 orang /bulan 100 %	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	239 orang/bulan 1357 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125 dokumen	Kab. Klaten
							1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kab. Klaten
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	1.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	Kab. Klaten
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	130000 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	75 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	Kab. Klaten
							1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	Kab. Klaten
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6000 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %		1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 unit	Kab. Klaten
							1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Kab. Klaten
							1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	Kab. Klaten
				Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja			Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	
				Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 %			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 unit kerja	
				Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 %			Jumlah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	
				Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100 %			umlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
					Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	100 %				
					Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	100 %				
					Persentase Layanan BLUD Sesuai SOP	100 %				
					Presentase Layanan BLUD sesuai SOP	100 %				
					Prosentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 %				
					Tercapainya pelayanan BLUD sesuai dengan SOP	100 %				
					Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja				
					Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 %				
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kejadian DBD	20 /100.000	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100 %	1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 unit	Kab. Klaten
		Angka Kejadian HIV	0.18 /1000 penduduk		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara	100 %				
		Angka kejadian Malaria	<1 /100.000							
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	15 %							
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child	100 %							
		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %							
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %							
		Cakupan STBM	90 %							
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	40 /100.000 penduduk							
		Penderita diare yang ditangani	7 %							
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	100 %							
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %							
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %							
		Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	100 %							

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %							
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %							
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %							
		Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	100 %							
		Persentase orang yang memerlukan intervensi	10 %							
		Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	100 %							
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %							
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	100 %							
		Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)	95 %							
		Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	100 %							
		Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	100 %							
		Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	100 %							
		Persentase Sistem Informasi Kesehatan	70 %							
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan	100 %							
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	11 %							

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
							1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 unit	Kab. Klaten
							1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 unit	Kab. Klaten
							1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 unit	Kab. Klaten
							1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 unit	Kab. Klaten
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 unit	Kab. Klaten
							1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	Kab. Klaten
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit		
							1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	400 unit	Kab. Klaten
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	50 paket	Kab. Klaten
							Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	34 Paket		
							1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	34 Paket	Kab. Klaten
							1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	2 Unit	Kab. Klaten
							1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2 unit	Kab. Klaten
							1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	34 Paket	Kab. Klaten
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	0.4 %	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	1 orang	Kab. Klaten	
		Cakupan Kunjungan Bay		98.11 %	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar		471 orang			
		Cakupan Kunjungan Bayi		98.11 %	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar		480 orang			
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi		100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		345 orang			
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		376 Orang			
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		441 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		441 Orang			
		Jumlah ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		471 orang			
		Jumlah Kegiatan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		471 Orang			
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Tingkat Daerag Kabupaten/Kota		100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		471 ORANG			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
				Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas Majegan	23 Kegiatan		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5760 orang		
				Jumlah Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16320 orang		
				Jumlah pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	6400 Orang		
				Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %					
				Persentase balita gizi buruk	0.4 %					
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	84.5 %					
				Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	94.6 %					
				Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas Polanharjo	100 %					
				Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %					
				Presentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %					
				Prevalensi anemia pada ibu hamil	10 %					
				Prevalensi anemia pada ibu hamil Jumlah ibu hamil dengan Hb<11 mg/dl dibagi j	10 %					
				Prevalensi balita gizi kurang	0.4 %					
				Prevalensi balita gizi kurang	7.8 %					
				Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan	4.6 %					
				Prosentase Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %					
				Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehata	100 %					
				Tercapainya kegiatan UKM di Puskesmas Tulung	100 %					
				Terlaksananya penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen					
						1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	441 orang	Kab. Klaten	
							Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Seusai Standar	441 orang		
							Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	450 orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4 orang	
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	343 orang	
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	351 Orang	
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	375 orang	
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	441 Orang	
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	441 orang	
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	441 Orang	
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	441 ORANG	
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15300 orang	
								Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	375 orang	
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatanna Sesuai Standar	441 orang	
						1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	441 orang	Kab. Klaten
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 orang	
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 orang	
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	338 orang	
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	441 orang	
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	441 Orang	
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	441 ORANG	
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15300 orang	
								Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	441 orang	
								Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	450 orang	
								Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 orang	
								Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1583 Orang	
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	441 orang	
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	441 orang	
						1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1765 orang	Kab. Klaten
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1253 orang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1564 orang	
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1583 Orang	
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1765 orang	
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1765 Orang	
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61200 orang	
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	2250 orang	
								Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1765 orang	
								Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1765 Orang	
								Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1800 orang	
								Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2250 orang	
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1765 Orang	
						1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 orang	Kab. Klaten
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesdehatan Sesuai Standar	500 orang	
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan di Sekolah	500 orang	
								Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	500 orang	
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 orang	
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15 Orang	
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	405 Orang	
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 orang	
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 ORANG	
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	510 orang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	693 orang	
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3012 orang	
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17340 orang	
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	480 orang	
								umlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	
						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17230 orang	Kab. Klaten
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	507 Orang	
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1229 orang	
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17230 orang	
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17230 Orang	
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17230 ORANG	
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17574 orang	
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18872 orang	
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19527 orang	
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	597500 orang	
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	22456 orang	
						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar	4118 Orang	Kab. Klaten
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4118 orang	
								jumlah Penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4118 orang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	121 Orang	
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	234 orang	
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	4118 orang	
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	4118 Orang	
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	4118 ORANG	
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	4200 orang	
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	4356 orang	
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5600 orang	
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	142800 orang	
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5679 orang	
						1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	2209 orang	Kab. Klaten
								jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2761 orang	
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2761 orang	
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 orang	
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81 Orang	
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2761 orang	
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2761 Orang	
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2761 ORANG	
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2816 orang	
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8118 orang	
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95750 orang	
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	2761 orang	
						1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan Sesuai Standar	887 orang	Kab. Klaten
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Orang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	887 Orang	
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	887 orang	
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	887 Orang	
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	887 ORANG	
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	946 orang	
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1012 orang	
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34410 orang	
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	887 orang	
								jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	887 Orang	
						1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	84 orang	Kab. Klaten
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 orang	
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2 Orang	
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 orang	
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	84 orang	
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	84 Orang	
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	84 ORANG	
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	248 Orang	
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2902 orang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standart	84 orang	
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84 Orang	
						1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	137 orang	Kab. Klaten
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3 Orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	54 Orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	112 orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	114 Orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	114 orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	114 Orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	116 orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3940 orang	
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	114 Orang	
						1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	362 orang	Kab. Klaten
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	362 orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11 Orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	345 orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 ORANG	
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 orang	
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12540 orang	
						1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standa	7 Dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 jenis	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	300 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standart	7 Dokumen	
								umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	7 Dokumen	
						1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	Kab. Klaten
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	3 dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	3 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	3 jenis	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	10 dokumen	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana Sesuai Standart	1 Dokumen	
								Jumlah jenis kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana	1 Dokumen	
						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Klaten
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	41 dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	45 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	200 Orang		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1529 dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1529 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1529 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1529 orang		
							umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		
						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	
							Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 puskesmas		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	34 dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	150 dokumen	
						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	Kab. Klaten
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen Puskesmas	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 puskesmas	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	34 dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	700 dokumen	
						1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	Kab. Klaten
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 kali	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	600 dokumen	
								Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	3 kali	
								umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
						1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dokumen	Kab. Klaten	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 puskesmas		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	10 dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	34 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya keluarga, dan akupressure	1 Dokumen		
						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	Kab. Klaten	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Puskesmas		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen		
							umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		
						1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	68 dokumen	Kab. Klaten	
						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	Kab. Klaten	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 jenis		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	600 dokumen	
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	Kab. Klaten
							1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	80 Paket	Kab. Klaten
							1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	Kab. Klaten
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	Kab. Klaten
							1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	Kab. Klaten
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 puskesmas	
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3 Laporan	
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 laporan	
							1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Kab. Klaten
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	8 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10 dokumen	
						1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	Kab. Klaten
						1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	129965 Keluarga	Kab. Klaten
						1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	114 Orang	Kab. Klaten
								Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	114 orang	
						1.02.02.2.02.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah orang Terduga Mendarita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan	262 orang	Kab. Klaten
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan	100 %	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2 Dokumen	Kab. Klaten
							1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Klaten
							1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang	2 unit	Kab. Klaten
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasyankes	100 %	1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	85 unit	Kab. Klaten
							1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	Kab. Klaten
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100.00 %	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasyankes	100 %	1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1500 Dokumen	Kab. Klaten
							1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 Dokumen	Kab. Klaten
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	Kab. Klaten
					Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	2 Orang				
					Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	100 %				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang					
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 orang					
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang					
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang					
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasyankes	2 Orang					
				Jumlah Tenaga Kontrak di Puskesmas dibagi Jumlah Tenaga Kontrak yang Seharusnya Ada di Puskesmas dikali 100	100 %					
				Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %					
				Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan	100 %					
				"Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di puskesmas	100 %					
				Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di puskesmas	100 %					
				Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	100 %					
				Prosentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasyankes Sesuai Standar	100 %					
				puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %					
				Terenuhinya Kebutuhan SDM di Fasilitas layanan Kesehatan sesuai standart	2 Orang					
				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang					
				Terpenunhi tenaga kontrak di Puskesmas Tulung	100 %					
						1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang		Kab. Klaten
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 orang	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 orang	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 ORANG	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 orang	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standart di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100 %	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	Kab. Klaten
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	50.00 %	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optical, UMOT yang diberikan izin dan diawasi	100 %	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Dokumen	Kab. Klaten
		Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	50.00 %							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 Sarana	Kab. Klaten
			1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	100 %	1.02.04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	10 Dokumen	Kab. Klaten	
			1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 %	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	60 Dokumen	Kab. Klaten	
			1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 %	1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40 Dokumen	Kab. Klaten	
			1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase terlaksananya penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100 %	1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	40 Dokumen	Kab. Klaten	
			1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100 %	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	Kab. Klaten	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	62.00 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat di tingkat kabupaten	13 kebijakan	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10 Dokumen	Kab. Klaten
			1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	97 %	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	11 Dokumen	Kab. Klaten	
			1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dok	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	Kab. Klaten	
				Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	1 dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen		
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	100 %		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 orang		
				Jumlah Kegiatan yang Terlaksana dibagi Jumlah Kegiatan yang ada dikali 100	100 %		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	245 Dokumen		
				Persentase terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	100 %					
				Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %					
				Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %					
				Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %					
				petugas promkes dan tenaga kesehatan lain yang dilatih	100 %					
				Prosentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasyankes Sesuai Standar	100 %					
				Prosentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %					
				Tercapainya Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat/UKBM tingkat daerah kabupaten/kota	100 %					
				Terlaksanakannya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen					

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersusun	4 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kab. Klaten
							1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	Kab. Klaten
							1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kab. Klaten
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang	100 %	1.03.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Kab. Klaten
							1.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Klaten
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	290 dokumen	Kab. Klaten
							1.03.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kab. Klaten
							1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Kab. Klaten
							1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	Kab. Klaten
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Klaten
							1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	144 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	12 rekening	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	88 unit	Kab. Klaten
							1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %		1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27 Unit	Kab. Klaten
							1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0.31 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase embung yang berfungsi dengan baik	80.38 %	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Klaten
							1.03.02.2.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Klaten
							1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	Kab. Klaten
							1.03.02.2.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Klaten
							1.03.02.2.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	Kab. Klaten
							1.03.02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 KM	Kab. Klaten
							1.03.02.2.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kab. Klaten
							1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.03.02.2.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	Kab. Klaten
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,31 %	1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	10 Dokumen	Kab. Klaten	
				Tercapainya irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	43,6 %					
						1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,1 KM	Kab. Klaten	
						1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,7 KM	Kab. Klaten	
						1.03.02.2.02.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	5 Bendung	Kab. Klaten	
						1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM	Kab. Klaten	
						1.03.02.2.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Bendung	Kab. Klaten	
						1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	0 Unit	Kab. Klaten	
						1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	0 DI	Kab. Klaten	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	95,59 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	96 %	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 dokumen	Kab. Klaten
							1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	1 dokumen	Kab. Klaten
							1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis	400 SR	Kab. Klaten
							1.03.03.2.01.11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	1 Kelompok Masyarakat	Kab. Klaten
							1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat	1 Penyelenggara SPAM	Kab. Klaten
							1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	0	Kab. Klaten
								Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	900 SR	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	100,00 %	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	150 Rumah Tangga	Kab. Klaten
							1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Klaten
								Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	0 Unit	
							1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	2 Kelompok	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan	1.48 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	Kab. Klaten
							1.03.05.2.01.06 Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1 rumah tangga	Kab. Klaten
							1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	50 Orang	Kab. Klaten
							1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2 Kelompok	Kab. Klaten
							1.03.05.2.01.12 Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200 rumah tangga	Kab. Klaten
							1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	3 unit	Kab. Klaten
							1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	400 Rumah tangga	Kab. Klaten
							1.03.05.2.01.16 Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	28.3 M ³ /Hari	Kab. Klaten
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	61.46 %	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/Kota	61 %	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 dokumen	Kab. Klaten
							1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	1400 m	Kab. Klaten
							1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	200 m	Kab. Klaten
							1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	500 m	Kab. Klaten
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur yang dibangun pada wilayah strategis dan cepat tumbuh kabupaten/ kota	40.00 %	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	40 %	1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 sistem jaringan	Kab. Klaten
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	20.83 %	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	100 %	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 dokumen	Kab. Klaten
		Persentase gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun	60 %							
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	7 dokumen	Kab. Klaten
							1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	Kab. Klaten
							1.03.08.2.01.09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	1 unit	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	1 unit	Kab. Klaten
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase dokumen RTBL yang tersusun	20 %	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Tersusun	100 %	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Klaten
		Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	25 %							
							1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 kawasan	Kab. Klaten
							1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 dokumen	Kab. Klaten
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kondisi baik	67.82 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	67.82 %	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	2 dokumen	Kab. Klaten
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	65.81 %							
							1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	Kab. Klaten
							1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	6.71 km	Kab. Klaten
							1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	7.54 km	Kab. Klaten
							1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.35 Km	Kab. Klaten
							1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	6.27 Km	Kab. Klaten
							1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	109 km	Kab. Klaten
							1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	37 m	Kab. Klaten
							1.03.10.2.01.17 Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	15.8 m	Kab. Klaten
							1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	40 m	Kab. Klaten
							1.03.10.2.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	12 m	Kab. Klaten
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga operator/tekniisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100.00 %	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelatihan tenaga terampil kontruksi yang diselenggarakan	100 %	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Tekniisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	200 orang	Kab. Klaten
					Persentase tenaga operator/tekniisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %				
							1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Tekniisi atau Analis yang Tersertifikas	200 orang	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	0 Orang	
			1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Presentase badan usaha jasa kontruksi yang terdata di SIPJAKI Kabupaten Klaten	100 % 100 %	1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 laporan	Kab. Klaten	
			1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Presentase badan usaha kontruksi berizin yang terpantau	100 % 85 %	1.03.11.2.03.02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	50 dokumen	Kab. Klaten	
						1.03.11.2.03.05 Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	1 dokumen	Kab. Klaten	
			1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Presentase pelaksanaan jasa kontruksi terwasi dan terevaluasi	100 % 50 %	1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 laporan	Kab. Klaten	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	70.50 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten yang ditetapkan	75 %	1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
		Persentase pelayanan ketataruangan	100 %							
		Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100 %							
						1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten	
						1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	Kab. Klaten	
			1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan tata ruang daerah	66 %	1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten	
						1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Klaten	
			1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan ketataruangan	100 %	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Kab. Klaten	
						1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	Kab. Klaten	
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100 %	1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Kab. Klaten	
						1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Kab. Klaten	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.03.12.2.04.03 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	Kab. Klaten
							1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Kab. Klaten
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 dokumen	Kab. Klaten
							1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15 dokumen	Kab. Klaten
							1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Laporan	Kab. Klaten
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	Kab. Klaten
							1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Kab. Klaten
							1.04.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	Kab. Klaten
							1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	Kab. Klaten
				1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang	100 %	1.04.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Klaten
							1.04.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Klaten
							1.04.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Klaten
				1.04.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah yang teradministrasi	100 %	1.04.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	50 Laporan	Kab. Klaten
							1.04.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Klaten
							1.04.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Kab. Klaten
							1.04.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Kab. Klaten
							1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	1.04.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	Kab. Klaten
							1.04.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	Kab. Klaten
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kab. Klaten
							1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	624 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.04.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	Kab. Klaten
							1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100.00 %	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata	100 %	1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100.00 %							
							1.04.02.2.01.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	Kab. Klaten
							1.04.02.2.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	Kab. Klaten
							1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	Kab. Klaten
							1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	Kab. Klaten
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana atau relokasi yang mengikuti sosialisasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	100 %	1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 Orang	Kab. Klaten
								Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	
							1.04.02.2.02.03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	75 orang	Kab. Klaten
							1.04.02.2.02.04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk	1 orang	Kab. Klaten
							1.04.02.2.02.06 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	10 Dokumen	Kab. Klaten
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang terbangun dan/ atau terehabilitasi	100 %	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi terehabilitasi	13 Unit Rumah	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
							1.04.02.2.03.03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Ha	Kab. Klaten
							1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	Kab. Klaten
			1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase distribusi dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program yang dilaksanakan	100 %		1.04.02.2.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Klaten
			1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah susun umum yang terkelola	100 %		1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	5 Laporan	Kab. Klaten
							1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	Kab. Klaten
			1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin pembangunan dan perumahan yang diterbitkan	100 %		1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	25 Laporan	Kab. Klaten
			1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang diterbitkan	100 %		1.04.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	12 Laporan	Kab. Klaten
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	0.05 %	1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase dokumen pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang tersusun	100 %	1.04.03.2.01.02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tereview serta Terlegalisasi	1 dokumen	Kab. Klaten
							1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 laporan	Kab. Klaten
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di	Persentase penanganan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang dilakukan	7 %	1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 dokumen	Kab. Klaten
							1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 dokumen	Kab. Klaten
							1.04.03.2.02.03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1 laporan	Kab. Klaten
							1.04.03.2.02.04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 laporan	Kab. Klaten
							1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	Kab. Klaten
							1.04.03.2.02.06 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	Kab. Klaten
							1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 dokumen	Kab. Klaten
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase RTLH di kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang terehabilitasi	5 %	1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh tersusun	1 Dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	Kab. Klaten
							1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5 dokumen	Kab. Klaten
							1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	Kab. Klaten
							1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	1 Ha	Kab. Klaten
							1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	16 Unit	Kab. Klaten
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	96.43 %	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	96 %	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	625 Unit Rumah	Kab. Klaten
							1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 dokumen	Kab. Klaten
							1.04.04.2.01.03 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 dokumen	Kab. Klaten
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik	62.24 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan	100 %	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Kab. Klaten
		Persentase PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan	38.61 %							
							1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	Kab. Klaten
							1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	10 Laporan	Kab. Klaten
							1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	50 Laporan	Kab. Klaten
	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang	100.00 %	1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil yang dilakukan	100 %	1.04.06.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	12 Laporan	Semua Kab/Kota
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	10 dokumen	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	
							1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	
							1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen	Kab. Klaten
							1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 Laporan	Kab. Klaten
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	115 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	Kab. Klaten
							1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	
							1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	
							1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	
							1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kab. Klaten
							1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kab/Kota
							1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota
							1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Kab. Klaten
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %		1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	
							1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Klaten
							1.05.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	
							1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	Kab. Klaten
							1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Semua Kab/Kota
							1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Klaten
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %		1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpelihara	100 %		1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	
							1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Semua Kab/Kota
							1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Klaten
							1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	
							1.05.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	92.40 %	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan masyarakat	100 %	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	90 Kasus	Kab. Klaten
		Persentase Perda dan Perkada yang	100.00 %		Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	100 %				
		Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	43.00 %							
		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan	100.00 %							
						1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	40 Kasus	Kab. Klaten	
						1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Kab. Klaten	
						1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1000 Dokumen	Kab. Klaten	
						1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36 orang	Kab. Klaten	
						1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	7 Dokumen	Kab. Klaten	
						1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Laporan	Kab. Klaten	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	100 %	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	15 Laporan	Kab. Klaten
							1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	365 Laporan	Kab. Klaten
							1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	30 Laporan	Kab. Klaten
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terbina	100 %	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan	Kab. Klaten

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	51 %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	prosentase penduduk didaerah rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	72.8 %	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500 orang	Kab. Klaten	
		Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	62 %								
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	73 %								
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %								
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terlayani terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	10 %	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1420 orang	Kab. Klaten	
							1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	Kab. Klaten	
							1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen analisis resiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana	1 dokumrn	Kab. Klaten	
							1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan	4 kawasan	Kab. Klaten	
							1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penanganan pasca bencana kab/kota memalului pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstrukai pasca bencana (R3P)	2 dokumen	Kab. Klaten	
							1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	Kab. Klaten	
							1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Kab. Klaten	
							1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	Kab. Klaten	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	prosentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi saat masa tanggap darurat bencana	100 %	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	Kab. Klaten	
							1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	117 Orang	Kab. Klaten	
							1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	117 Orang	Kab. Klaten	
							1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	Kab. Klaten	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase organisasi kebencanaan yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana	10 %	1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	Kab. Klaten
							1.05.03.2.04.03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Kab. Klaten
							1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	Kab. Klaten
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100.00 %	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100 %	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	Kab. Klaten	
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)	70.00 %								
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15.00 Menit								
						1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan	Kab. Klaten	
						1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	10 Dokumen	Kab. Klaten	
						1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	27 Orang	Kab. Klaten	
			1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan pelayanan pemeriksaan dan pendataan	100 %	1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	5 Dokumen	Kab. Klaten	
						1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	40 Dokumen	Kab. Klaten	
			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran	8 kegiatan	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	Kab. Klaten	
						1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	Kab. Klaten	
			1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Cakupan Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %	1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	10 Laporan	Kab. Klaten	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.05.04.2.05.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	3 Unit	Kab. Klaten
							1.05.04.2.05.04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	50 Laporan	Kab. Klaten
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Klaten
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Kab. Klaten
							1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Klaten
							1.06.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kab. Klaten
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Kab. Klaten
							1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	1.06.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							1.06.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %		1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terrehabilitasi	25 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan	97.5 %	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	98 %	1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	Kab. Klaten
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3850 Keluarga	Kab. Klaten
							1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	Kab. Klaten
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti	66 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	30 %	1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2750 Orang	Kab. Klaten
							1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang	Kab. Klaten
							1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang	Kab. Klaten
							1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	Kab. Klaten
							1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kab. Klaten
							1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Klaten
							1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	35 %	1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Klaten
							1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Klaten
							1.06.04.2.02.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Klaten
							1.06.04.2.02.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Klaten
							1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Klaten
							1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Klaten
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	89.00 %	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Fakir Miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	80 %	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	735000 orang	Kab. Klaten
							1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60000 Keluarga	Kab. Klaten
							1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60000 Keluarga	Kab. Klaten
							1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	Kab. Klaten
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100.00 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang telah mendapat bantuan perlindungan sosial	31 %	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	Kab. Klaten
							1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	Kab. Klaten
							1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	Kab. Klaten
							1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	Kab. Klaten
							1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	Kab. Klaten
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga yang diberdayakan	80 %	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100.00 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	32 %	1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
							1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	Kab. Klaten
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	87.00 %	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review tersusun	100 %	2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Kab. Klaten
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	4.12 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	95.83 %	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	120 Orang	Kab. Klaten
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	13.04 %	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	Kab. Klaten
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan pengukuran produktivitas tenaga kerja	11.34 %	2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Klaten
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	22.50 %	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200 orang	Kab. Klaten
							2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50 orang	Kab. Klaten
							2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	Kab. Klaten
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	72 %	2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	5000 orang	Kab. Klaten
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Indonesia (TKI) yang mendapat sertifikat	100 %	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	80 Orang	Kab. Klaten
							2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 orang	Kab. Klaten
				2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase notifikasi TKA	60 %	2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Perusahaan	Kab. Klaten
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	100.00 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	53.97 %	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	238 Perusahaan	Kab. Klaten
							2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	80 Laporan	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang dilakukan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	13.32 %	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	35 Perkara	Kab. Klaten
							2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	Kab. Klaten
							2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	20 Asosiasi/SP	Kab. Klaten
							2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Kab. Klaten
							2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	50 Orang	Kab. Klaten
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	0.6 %	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	75 %	2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kali	Kab. Klaten
							2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
							2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kemasyarakatan aktif dalam Pemberdayaan Perempuan	32 %	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Organisasi	Kab. Klaten
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang aktif	30 %	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	Kab. Klaten
							2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai	100.00 %	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani sesuai standar	100 %	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kab. Klaten
							2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tertangani sesuai standar	100 %	2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 orang	Kab. Klaten
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat penguatan dan pengembangan	100 %	2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Klaten
							2.08.03.2.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	15 Orang	Kab. Klaten
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	100.00 %	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35 %	2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
							2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	Kab. Klaten
							2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 laporan	Kab. Klaten
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	46.20 %	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Persentase OPD yang menyajikan data gender dan anak	55 %	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	Kab. Klaten
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa/kelurahan layak anak	76.3 %	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD, Ormas/LSM/PT, dunia usaha yang telah melaksanakan kegiatan responsif PUHA	30 %	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia	52 Organisasi	Kab. Klaten
							2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	Kab. Klaten
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat penguatan dan pengembangan	65 %	2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	2 Dokumen	Kab. Klaten
							2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	10 Dokumen	Kab. Klaten
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	100.00 %	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah Ramah Anak (Mempunyai Kebijakan anti kekerasan di Sekolah)	32 %	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus korban kekerasan terhadap anak yang terlayani	100 %	2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kab. Klaten
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	40 %	2.08.07.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Kab. Klaten
							2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kab. Klaten
							2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Klaten
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama / beras	275720.00 Ton	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang disediakan	47.83 %	2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	3 unit	Kab. Klaten
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi	3045.00 K.kal/kapita/hari	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase kelompok wanita tani yang mendapatkan pendampingan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	33.33 %	2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 Laporan	Kab. Klaten
		Ketersediaan protein	85.50 Gram/ka/pita/hari							
							2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	3 Dokumen	Kab. Klaten
							2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	4 Unit	Kab. Klaten
							2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	1 Unit	Kab. Klaten
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang diselenggarakan	100 %	2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pelaku usaha pengolahan pangan lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka Pencapaian Target Konsumsi Pangan	40 %	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	7 Laporan	Kab. Klaten
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	12.00 %	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daerah rawan pangan yang tertangani	6 Lokasi	2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	1 Laporan	Kab. Klaten
							2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	81.00 %	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produsen pangan segar dan pangan olahan yang mendapatkan pembinaan pengawasan keamanan pangan segar	40 %	2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota yang dibina	1 Dokumen	Kab. Klaten
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	100.00 %	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus sengketa tanah garapan terselesaikan	100 %	2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Klaten
							2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	Kab. Klaten
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	100.00 %	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah yang dilakukan	100 %	2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 dokumen	Kab. Klaten
							2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatnya	50.00 %	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sertifikat yang terfasilitasi pensertifikatnya (masyarakat)	100 %	2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Klaten
							2.10.06.2.01.02 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Klaten
							2.10.06.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 dokumen	Kab. Klaten
							2.10.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Klaten
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	100.00 %	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sertifikat yang terfasilitasi pensertifikatnya	100 %	2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.10.10.2.01.02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 dokumen	Kab. Klaten
							2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Kab. Klaten
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	2.11.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	67 %	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kab/Kota
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	100 %	2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	Kab. Klaten
							2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air	100 %	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peantauan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan	100 %	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	Semua Kab/Kota
		Cakupan pemantauan kualitas udara	100 %							
		Persentase kampung iklim yang terbentuk	40 %							
							2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota
							2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik	100 %	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupate/Kota	100 %	2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kab/Kota
							2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.17 Ha	Semua Kab/Kota
							2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11.346 Ha	Semua Kab/Kota
							2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.25 Ha	Semua Kab/Kota
							2.11.04.2.01.06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 Orang	Semua Kab/Kota

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	100 %	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Prosentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tertangani	70 %	2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	Semua Kab/Kota
							2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	Kab. Klaten
				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terlaksana	60 %	2.11.05.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	Kab. Klaten
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	65 %	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi	5 %	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 Dokumen	Semua Kab/Kota
							2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25 Laporan	Semua Kab/Kota
							2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	10 Dokumen	Semua Kab/Kota
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga yang dilakukan	100 %	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelembaga Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	5 Lembaga	Semua Kab/Kota
		Persentase saka kalpataru yang dibina	100 %							
							2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 Dokumen	Semua Kab/Kota
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	3 orang	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup	3 jenis	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	Semua Kab/Kota

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	100 %							
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	100 %	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang terselesaikan	100 %	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindak lanjuti/ditangani	20 dokumen	Semua Kab/Kota
							2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	20 dokumen	Semua Kab/Kota
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang berkurang	28 %	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	76 %	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	29000 ton/tahun	Kab. Klaten
		Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	76.32 %							
							2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	Kab. Klaten
							2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	Kab. Klaten
							2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	Kab. Klaten
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 dokumen	Kab. Klaten
							2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Klaten
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100 %		2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	506 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Kab. Klaten
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %		2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Klaten
							2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %		2.12.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %		2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.12.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KK	98.00 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen surat pindah datang penduduk	100 %	2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dokumen	Semua Kab/Kota	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		60.00 %	Persentase ke-valid-an data kependudukan					100 %
		Persentase perekaman KTP elektronik		99.03 %	Persentase Pemenuhan Kebutuhan KK, KTP, KIA					100 %

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	Semua Kab/Kota
							2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota
			2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %		2.12.02.2.03.01 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	Semua Kab/Kota
							2.12.02.2.03.03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	Semua Kab/Kota
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kematian	100.00 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah dan jenis dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil	100 %	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6 Dokumen	Kab. Klaten
		Cakupan penerbitan akta pengesahan anak	100.00 %							
		Cakupan penerbitan akta perceraian	100.00 %							
		Cakupan penerbitan akta perkawinan	100.00 %							
		Cakupan penerbitan pengangkatan anak	100.00 %							
			2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %		2.12.03.2.02.06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	Semua Kab/Kota
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan database kependudukan	22,00 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Jumlah Inovasi pelayanan Kependudukan	100 %	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	Kab. Klaten
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	100,00 %		Persentase Jumlah OPD yang bekerja sama dalam pemanfaatan data	100 %				
					Persentase jumlah perjanjian kerjasama	100 %				
							2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	Semua Kab/Kota
			2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Klaten	
				Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %					
			2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %	2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	Kab. Klaten	
			2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	Kab. Klaten	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan tahunan	100.00 %	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Dokumen Profil Kependudukan Tersusun	2 Jenis	2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	15 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	40 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	100 %	2.13.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	100 %	2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara	100 %	2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.13.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	15 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	100.00 %	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerja Sama antar Desa	5 Desa	2.13.03.2.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 Dokumen	Kab. Klaten
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes berkembang dan Maju	15,86 %	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat	7.29 %	2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	3 Dokumen	Kab. Klaten
		Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	100 %							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.13.04.2.01.02 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	2 Dokumen	Kab. Klaten
							2.13.04.2.01.03 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	60 Orang	Kab. Klaten
							2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa	2 Dokumen	Kab. Klaten
							2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian	1 Laporan	Kab. Klaten
							2.13.04.2.01.11 Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.13.04.2.01.13 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa	28 Dokumen	Kab. Klaten
							2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	180 Orang	Kab. Klaten
							2.13.04.2.01.15 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	401 Desa/Kel	Kab. Klaten
							2.13.04.2.01.18 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Kab. Klaten
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK aktif	100.00 %	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Pelestarian Adat Istiadat yang Terfasilitasi	100 %	2.13.05.2.01.02 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil penataan , pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 Dokumen	Kab. Klaten	
	Persentase Posyandu aktif	100.00 %		Persentase Posyandu yang Dilakukan Pembinaan	100 %					
	Persentase Posyantek aktif	29.41 %		Persentase Posyantek yang Dilakukan Pembinaan	100 %					
				Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	100 %					
						2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat Hukum adat yang di tingkatkan kapasitasnya	4 Lembaga	Kab. Klaten	
						2.13.05.2.01.06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	Kab. Klaten	
						2.13.05.2.01.07 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	Kab. Klaten	
						2.13.05.2.01.09 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	Kab. Klaten	
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan	100.00 %	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kesesuaian kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	85 %	2.14.02.2.01.05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2 Dokumen	Kab. Klaten	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	85.71 %								
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Data kependudukan dan KB tersusun	100 %	2.14.02.2.02.01 Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 dokumen		Kab. Klaten
							2.14.02.2.02.03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen		Kab. Klaten
							2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	63 Unit		Kab. Klaten
							2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	4 Dokumen		Kab. Klaten
							2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 dokumen		Kab. Klaten
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	72 %	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kecamatan yang dilakukan Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	100 %	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra	7 Organisasi		Kab. Klaten
		Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmetneed)	15.45 %								
							2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen		Kab. Klaten
							2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen		Kab. Klaten
							2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3 Laporan		Kab. Klaten
							2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24 Laporan		Kab. Klaten
							2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan		Kab. Klaten
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdayaguna	100 %	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4089 orang		Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	43 %	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	Kab. Klaten
							2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2700 Orang	Kab. Klaten
							2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	15 Laporan	Kab. Klaten
							2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7 Unit	Kab. Klaten
							2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	Kab. Klaten
							2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	290 orang	Kab. Klaten
							2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5 Laporan	Kab. Klaten
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Kampung KB yang dilakukan pembinaan	82 %	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	71 kampung	Kab. Klaten
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota BKB yang menjadi peserta KB	83 %	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	75 %	2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	Kab. Klaten
Cakupan Anggota BKL yang menjadi peserta KB		65.38 %								
Cakupan Anggota BKR yang menjadi peserta KB		75.92 %								
Cakupan Anggota UPPKS yang menjadi peserta KB		63.79 %								
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		0 Indeks								
							2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2913 orang	Kab. Klaten
							2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Kelompok	Kab. Klaten
							2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.14.04.2.01.11 Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	30 orang	Kab. Klaten
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	presentase linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKS	40 %		2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	Kab. Klaten
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	99.14 %	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	166 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	94 %	2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	137 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.15.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100 %	2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3500 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %		2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.15.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.15.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kecelakaan lalu lintas	0.7 %	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase dokumen rencana induk jaringan LLAJ yang tersusun dan tersosialisasi	1 dokumen	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	Semua Kab/Kota
							2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	Semua Kab/Kota
							2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12 Laporan	Semua Kab/Kota
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang	72.85 %	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	754 unit	Semua Kab/Kota
					Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik	98 %				
					Persentase traffic light ATCS terbangun	100 %				
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	8920 unit	Semua Kab/Kota
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal tipe C sesuai standart yang dioperasikan	83 %	2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	Semua Kab/Kota
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase kapling parkir yang dikelola dengan baik	31 %	2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	Semua Kab/Kota
							2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	Semua Kab/Kota
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	87.84 %	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 unit	Semua Kab/Kota
							2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	61 orang	Semua Kab/Kota

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8 dokumen	Semua Kab/Kota
							2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13 unit	Semua Kab/Kota
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase rekayasa lalu lintas tertangani	100 %		2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	14 Laporan	Semua Kab/Kota
							2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10 dokumen	Semua Kab/Kota
							2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	18 laporan	Semua Kab/Kota
							2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	12 laporan	Semua Kab/Kota
			2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	Persentase dampak lalu lintas tertangani	82 %		2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	18 laporan	Semua Kab/Kota
							2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	18 laporan	Semua Kab/Kota
			2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase PPNS Perhubungan terpenuhi	60 %		2.15.02.2.08.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	86 orang	Semua Kab/Kota
				Prosentase pelanggaran LLAJ	46 %					
				Prosentase pelanggaran LLAJ	60 %					
							2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	24 laporan	Semua Kab/Kota
							2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	24 laporan	Semua Kab/Kota
							2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2 laporan	Semua Kab/Kota
							2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	24 laporan	Semua Kab/Kota
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan bus sekolah	26.67 %		2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 unit	Semua Kab/Kota
			2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek perkotaan yang aktif	18.75 %		2.15.02.2.11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	Semua Kab/Kota
			2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase trayek pedesaan aktif	62.5 %		2.15.02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 dokumen	Semua Kab/Kota
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Kab. Klaten
			2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %		2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kab. Klaten
							2.16.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kab. Klaten
			2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %		2.16.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10000 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %		2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %		2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.16.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	Kab. Klaten
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %		2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	22 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.16.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi terkait program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disampaikan ke masyarakat	100.00 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat	100 %	2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	2 Dokumen	Kab. Klaten
		Presentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat	36.36 %							
							2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	1 Dokumen	Kab. Klaten
								Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0 Dokumen	
							2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	Kab. Klaten
							2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya	50 Orang	Kab. Klaten
							2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau	1 Dokumen	Kab. Klaten
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	72.22 %	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	69 Unit	Kab. Klaten
		Persentase penambahan akses internet di ruang publik	75 %							
		Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	62.75 %							
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik dan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik (layanan SPBE)	65 %	2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah Yang Dikelola	1 Unit	Kab. Klaten
							2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	12 Unit	Kab. Klaten
							2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Klaten
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah terpenuhi tepat waktu	100 %	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	Kab. Klaten
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Klaten
							2.17.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Kab. Klaten
							2.17.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kab. Klaten
				2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang	100 %	2.17.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Klaten
							2.17.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Klaten
				2.17.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah yang teradministrasi	100 %	2.17.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kab. Klaten
							2.17.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kab. Klaten
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu yang terselesaikan	100 %	2.17.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Klaten
							2.17.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kab. Klaten
							2.17.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	20 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Klaten
							2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	20 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana tepat waktu	100 %		2.17.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Klaten
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %		2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Klaten
							2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100 %		2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	Kab. Klaten
							2.17.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.17.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh	9.30 %	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam yang direkomendasi	26.82 %	2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	Kab. Klaten
		Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi	26.82 %							
				2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang direkomendasi	9.3 %	2.17.02.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 unit usaha	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	71.20 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten atau kota yang terperiksa dan terawasi	14.29 %	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	Kab. Klaten
		Persentase koperasi yang patuh	25.90 %							
							2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	100 Unit Usaha	Kab. Klaten
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya	17.00 %	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 wilayah kabupaten/kota	17 %	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha	Kab. Klaten
							2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	50 Unit Usaha	Kab. Klaten
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus/pengawas/ pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan	31.60 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengurus dan manager koperasi yang terlatih	100 orang	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 orang	Kab. Klaten
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan	18.90 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan perlindungan koperasi yang terlaksana	18.9 %	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Unit Usaha	Kab. Klaten
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan	0.32 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang terbina	0.78 %	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan Restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kab. Kota	55000 Unit Usaha	Kab. Klaten
		Pertumbuhan usaha mikro	0.14 %							
							2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha	Kab. Klaten
							2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	160 Unit Usaha	Kab. Klaten
							2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	180 Unit Usaha	Kab. Klaten
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/ Pendampingan	3.50 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi dan terdampingi	3.5 %	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	300 Unit Usaha	Kab. Klaten
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pembayaran gaji ,tunjangan asn dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 100		2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	80 %		2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Klaten
							2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	130 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	80 %		2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.18.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	80 %		2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terpelihara	80 %		2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.18.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.18.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	80 %	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	80 %	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	Kab. Klaten
							2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	Kab. Klaten
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi Investasi yang Disusun	100 %	2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	80 %	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Presentase Promosi Investasi yang Terlaksana	100 %	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	5 Dokumen	Semua Kab/Kota
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal	80 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	80 %	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4642 Pelaku Usaha	Kab. Klaten
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	Kab. Klaten
							2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang	Kab. Klaten
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian penanaman modal	80.00 %	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	80 %	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 Kegiatan Usaha	Semua Kab/Kota
							2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota
							2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	150 Kegiatan Usaha	Kab. Klaten
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	80 %	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase updating data	100 %	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	64 Dokumen	Kab. Klaten
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.08 %	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader yang dibina	20 %	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 orang	Kab. Klaten
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4.45 %							
							2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang	Kab. Klaten
							2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	50 orang	Kab. Klaten
							2.19.02.2.01.05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 Orang	Kab. Klaten
							2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	10 Orang	Kab. Klaten
							2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	10 Orang	Kab. Klaten
			2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi Kepemudaan yang dikembangkan	20 %		2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	30 Orang	Kab. Klaten
							2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	Kab. Klaten
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi	4.29 %	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab Terlaksana	25 %	2.19.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	1 Unit	Kab. Klaten
							2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	Kab. Klaten
							2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 unit	Kab. Klaten
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah	100 %	2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	150 orang	Kab. Klaten
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Olahraga	25 %	2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet Daerah yang Diseleksi	20 orang	Kab. Klaten
							2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	Kab. Klaten
							2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	25 Orang	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang menerima Penghargaan	15 Orang	Kab. Klaten
							2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga	Jumlah data dan informasi sektorol olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	1 dokumen	Kab. Klaten
			2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Olahraga Rekreasi yang mendapatkan Pembinaan	25 %		2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Klaten
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data indonesia	40.00 %	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Sektoral	75 %	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik Sektoral	1 Dokumen	Kab. Klaten
							2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	50 Orang	Kab. Klaten
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah	39.22 %	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diamankan	30 %	2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	Kab. Klaten
		Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik	38.00 %							
							2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	6 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	25 %	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Komunitas Budaya yang dilegalkan	100 %	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 objek	Kab. Klaten
							2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 orang	Kab. Klaten
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang dilindungi	100 %	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	Kab. Klaten
							2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	Kab. Klaten
							2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	2 Sertifikat	Kab. Klaten
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	40.00 %	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku seni tradisional yang terbina	100 %	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	25 orang	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	15 Sertifikat	Kab. Klaten
							2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	Kab. Klaten
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	35.00 %	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Jumlah Masyarakat yang dibina tentang Sejarah Lokal	100 %	2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan	40 Orang	Kab. Klaten
							2.22.04.2.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2 Unit	Kab. Klaten
							2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat	5 Dokumen	Kab. Klaten
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	17 %	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	100 %	2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang didaftarkan	11 objek	Kab. Klaten
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	100 %	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	4 objek	Kab. Klaten
							2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	3 objek	Kab. Klaten
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	51.962 Eksemplar	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan dan monitoring perpustakaan Desa dan sekolah	10 %	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	Kab. Klaten
		Persentase perpustakaan yang	22 %							
							2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	18 Perpustakaan	Kab. Klaten
							2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan	Kab. Klaten
							2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180 Orang	Kab. Klaten
							2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	100 Eksemplar	Kab. Klaten
							2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi	25 Eksemplar	Kab. Klaten
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan baca untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perpustakaan	10 %	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	30 Lokus	Kab. Klaten
							2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	Kab. Klaten
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	2.24.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.24.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	2.24.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.24.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	2.24.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.24.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.24.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	Kab. Klaten
							2.24.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.24.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.24.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.24.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	Kab. Klaten
				2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	2.24.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.24.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.24.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	2.24.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.24.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							2.24.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang diakuisisi	78.00 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan OPD yang dibina Tata Kelola kearsipannya	10 %	2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100 Berkas	Kab. Klaten
		Persentase pengawasan kearsipan internal	100.00 %							
							2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Laporan	Kab. Klaten
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun dan arsip statis milik OPD yang diakuisisi	10 %	2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	20 Arsip	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	20 %	2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	45 Pengguna	Semua Kab/Kota
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Arsip usul musnah	60.00 Meter lari	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Arsip kategori musnah yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun dimusnahkan	5 %	2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	250 Arsip	Kab. Klaten
		Persentase arsip yang dialihmediakan	20.91 %				2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	350 Berkas	Kab. Klaten
				2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota yang terlindungi dan terselamatkan	10 %	2.24.03.2.02.01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 Arsip	Kab. Klaten
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Kenaikan Jumlah Arsip Terakuisisi	5 %	2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	8 Daftar	Kab. Klaten
							2.24.03.2.03.02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	250 Arsip	Kab. Klaten
				2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentikasi Arsip statis Kabupaten/kota yang telah dialih media	10 %	2.24.03.2.04.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	25 Arsip	Kab. Klaten
				2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase Jumlah arsip yang dinyatakan hilang dan diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip	1 %	2.24.03.2.05.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	Kab. Klaten
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	547 Ton	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan bina kelompok nelayan	36 %	3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	Kab. Klaten
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	30039.00 Ton	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	7 %	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	17 Kelompok	Kab. Klaten
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	38.8 %	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	Kab. Klaten
							3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Kab. Klaten
							3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	150 Orang	Kab. Klaten
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum	23 %	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	jumlah lokasi penebaran benih ikan diperaian umum	3 Lokasi	3.25.05.2.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan ikan	1191958 kg	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan bina pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	40 %	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha	3 Unit Usaha	Kab. Klaten
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Kab. Klaten
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.26.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	36 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	145 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 %	3.26.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat waktu	100 %	3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.26.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata	74 %	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Desa Wisata yang terbentuk	72 %	3.26.02.2.01.01 Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Lokasi	Kab. Klaten
							3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	1 dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, berkembang, pemantapan,	7 lokasi	Kab. Klaten
							3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata	50 dokumen	Kab. Klaten
			3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	3 Lokasi		3.26.02.2.02.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	2 dokumen	Kab. Klaten
							3.26.02.2.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota	500 laporan	Kab. Klaten
			3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang terkelola	83 %		3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	1 dokumen	Kab. Klaten
							3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 lokasi	Kab. Klaten
							3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang tersedia dan terpelihara	6 unit	Kab. Klaten
							3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	Kab. Klaten
							3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / kota	6 lokasi	Kab. Klaten
			3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Pariwisata Terbina	60 %		3.26.02.2.04.01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	20 dokumen	Kab. Klaten
							3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	Kab. Klaten
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat intensitas promosi pariwisata	70 %	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Konten Pemasaran Pariwisata yang dirilis	442 Konten	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	12 dokumen	Kab. Klaten
							3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	0 Laporan 1 laporan	Semua Kab/Kota
							3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten / kota, baik dalam dan luar negeri	4 dokumen	Kab. Klaten
							3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama dan kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri	5 dokumen	Kab. Klaten
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI	15 Orang	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	1 Kelompok	3.26.04.2.02.07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen hasil pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif, serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif	15 dokumen	Kab. Klaten
							3.26.04.2.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	1 Dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata yang kompeten	30.00 %	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikasi	475 Orang	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	300 Orang	Kab. Klaten
							3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangann kemitraan	4 orang	Kab. Klaten
							3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	30 Orang	Kab. Klaten
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat	7 Laporan	Kab. Klaten
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	298 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.27.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang	100 %	3.27.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Kab. Klaten
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	Kab. Klaten
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	90 %	3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.27.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD/jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	90 %	3.27.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	40 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	90 %	3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara	90 %	3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.27.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas cabe	9.06 Ku/Ha	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Produksi jagung	1.061 Ton	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	18 Laporan	Kab. Klaten
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		67.01 Ku/Ha	Produksi padi		459.885 Ton					
Produktivitas tembakau asepan		9.86 Ku/Ha	Produksi tembakau asepan		2.335 Ton					
Produktivitas tembakau rajang		12.21 Ku/Ha	Produksi tembakau rajang		1640 Ton					
							3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	12 Laporan	Kab. Klaten
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan benih unggul padi berlabel di ATP Kabupaten Klaten	15 %	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan/tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 VUB	Kab. Klaten
							3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG hewan/tanaman	2 Dokumen	Kab. Klaten
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil)	288384.00 ekor	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah luasan LP2B/KP2B	32000 Ha	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	Kab. Klaten
Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional		38.00 %								
Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian		42.00 %								
							3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	Kab. Klaten
							3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	4 Laporan	Kab. Klaten
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun dan direhabilitasi	47.26 %	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	11 Unit	Kab. Klaten
							3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	Kab. Klaten
							3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2 Unit	Kab. Klaten
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peternak ruminansia besar dan ruminansia kecil yang mendapatkan failitasi pengelolaan bibit ternak	38.72 %	3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	22.00 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan vaksinasi/penanggulangan PHM dan zoonosis	91 %	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5 Laporan	Kab. Klaten
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan hewan, IB dan penanganan gangguan reproduksi	88 %	3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten/kota	12 Laporan	Kab. Klaten
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan	40 %	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	12 Laporan	Kab. Klaten
							3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	10 Laporan	Kab. Klaten
				3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase ternak ruminansia besar yang dipotong dirumah potong hewan	100 %	3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	12 Laporan	Kab. Klaten
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya	60 %	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT	60 %	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	10000 Ha	Kab. Klaten
							3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	1000 Ha	Kab. Klaten
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani madya dan utama	9.13 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	jumlah kelompok tani kelas lanjut	535 poktan	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	26 Unit	Kab. Klaten
					jumlah kelompok tani kelas madya	135 poktan				
					jumlah kelompok tani kelas pemula	1.055 poktan				
					jumlah kelompok tani kelas utama	9 poktan				
							3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Unit	Kab. Klaten
							3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	26 Unit	Kab. Klaten
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	90 %	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	210 izin	3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35 Dokumen	Kab. Klaten
				3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase tanda daftar gudang yang terbit	65 %	3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	5 Dokumen	Kab. Klaten
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Izin surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) yang terbit	2 STPW	3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	Kab. Klaten
							3.30.02.2.03.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	2 Dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
				3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya tingkat kabupaten/kota	5 %	3.30.02.2.06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	5 Laporan	Kab. Klaten			
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pendapatan retribusi pasar	4700000000 Rp	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	22 Unit	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	Kab. Klaten			
		Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi	46.00 %										
		Persentase PKL yang terbina	51.40 %										
							3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	51 unit	Kab. Klaten			
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	1250 orang	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	Kab. Klaten			
							3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	Kab. Klaten			
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kinerja Pupuk	96.00 %	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kestabilan lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 Bapokting) yang terjaga	6 %	3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	Kab. Klaten			
		Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting)	6.00 %										
		Persentase pasar yang diawasi	100.00 %										
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	18 jenis	3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Klaten			
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pupuk dan pestisida bersubsidi yang terawasi	96 %	3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	Kab. Klaten			
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah komoditas yang mampu ekspor	2 Jenis	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Event pameran yang terselenggara	5 event	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	2 Pelaku Usaha	Kab. Klaten			
											3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha
											3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1 Pelaku Usaha
											3.30.05.2.01.04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1 Pelaku Usaha
											3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	3 Produk
											3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	15 Pelaku Usaha

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	70 %	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	UTTP metrologi yang terlaksana	8500 objek	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan Alat Perlengkapan di Tera ulang	25 Unit	Kab. Klaten
							3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	20 Orang	Kab. Klaten
							3.30.06.2.01.03 Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1 Unit	Kab. Klaten
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri	14.00 Orang	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Event pameran yang terlaksana	7 kali	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	6 UMKM	Kab. Klaten
							3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	Kab. Klaten
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	3.31.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.31.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kab. Klaten
							3.31.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Kab. Klaten
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.31.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.31.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Klaten
							3.31.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kab. Klaten
							3.31.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	Kab. Klaten
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	3.31.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.31.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.31.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Kab. Klaten
							3.31.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.31.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.31.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.31.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.31.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	3.31.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.31.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	3.31.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.31.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	Kab. Klaten
							3.31.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	3.31.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.31.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.31.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							3.31.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	21.44 %	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang terkoordinasi	10.01 %	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Kab. Klaten
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Kab. Klaten
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Klaten
							3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Kab. Klaten
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	18.13 %	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang sudah berizin	8.67 %	3.31.04.2.01.01 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Kab. Klaten
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigrasi	80.00 %	3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase transmigran yang lolos seleksi	87 %	3.32.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Kab. Klaten
							3.32.03.2.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	10 KK	Kab. Klaten
							3.32.03.2.01.05 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 KK	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							3.32.03.2.01.06 Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	10 Orang	Kab. Klaten
4.01 SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100.00 %	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
					Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %				
							4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kab. Klaten
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pembayaran Gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan keuangan Tepat waktu	100 %	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	153 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		100 %					
			Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		100 %					
			Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu		100 %					
			Persentase penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		100 %					
						4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
							Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 dokumen		
							4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 dokumen	Kab. Klaten
							4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kab. Klaten
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada sekretariat daerah teradministrasi dengan baik	100 %	4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 laporan	Kab. Klaten
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	4.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	Kab. Klaten
							4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	400 orang	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
					Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				Persentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %					
				Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %					
				Persentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %					
						4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
							Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 paket		
							Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45 Paket		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	30 paket		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	62 paket		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66 paket		
						4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	Kab. Klaten	
						4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Klaten	
						4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
							Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket		
							Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket		
							Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 paket		
						4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
							Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	360 dokumen		
							Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	72 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	328 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1143 Dokumen		
						4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
							Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	325 laporan			
						4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	35 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
							Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0 Laporan			
							Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan			
						4.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada skpd	350 dokumen	Kab. Klaten	
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %	4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
				Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit		
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit		
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit		
								Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Unit		
						4.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	5 unit	Kab. Klaten	
						4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunanl lainnya yang disediakan	10 unit	Kab. Klaten	
						4.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 Unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	600 unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	2 unit	
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan		Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan		
				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan		
						4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan		
						4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	26 Laporan		Kab. Klaten
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200 laporan		
						4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan		
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit		Kab. Klaten
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %					
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara	100 %					
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100 %					
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 %					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	
							4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah Mebel yang Dipelihara	132 unit	
							4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	21 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120 unit	
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	100 %		4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 orang/bulan	Kab. Klaten
							4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 paket	Kab. Klaten
							4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48 orang/bulan	Kab. Klaten
			4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah	100 %		4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 paket	Kab. Klaten
							4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 paket	Kab. Klaten
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	100 %		4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	Kab. Klaten
							4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	Kab. Klaten
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	Kab. Klaten
							4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	Kab. Klaten
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Komunikasi Pimpinan yang sesuai SOP	100 %		4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	340 Laporan	Semua Kab/Kota
							4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	500 Laporan	Semua Kab/Kota
							4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1720 Laporan	Semua Kab/Kota
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana	100.00 %	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase administrasi Kewilayahan yang dikelola	100 %	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	Semua Kab/Kota
		Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	30.77 %		Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang terlaksana	100 %				
							4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	Semua Kab/Kota
							4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota
			4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	100 %		4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	23 Dokumen	Kab. Klaten
							4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	35 Dokumen	Kab. Klaten
							4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kasus hukum yang menimpa OPD dan Desa yang diberikan bantuan hukum	90 %	4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	425 dokumen	Kab. Klaten			
					Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	90 %							
					Persentase produk hukum yang diinformasikan	100 %							
							4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 kasus	Kab. Klaten			
							4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	425 dokumen	Kab. Klaten			
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama yang terlaksana	100 %	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6 Dokumen	Semua Kab/Kota			
							4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	Semua Kab/Kota			
							4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	Semua Kab/Kota			
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BLUD yang mendapat pembinaan teknis	100 %	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	persentase BLUD yang mendapat pembinaan teknis	5 %	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	39 dokumen	Semua Kab/Kota			
		Persentase Kebijakan sumber daya alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100 %										
		Persentase pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada pemerintah	5 %										
		Persentase rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi daerah yang ditindaklanjuti	100 %										
		Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapat akses keuangan	5 %										
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	Semua Kab/Kota			
							4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	1 dokumen	Semua Kab/Kota			
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Administrasi Pembangunan	100 %	4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	51 Dokumen	Kab. Klaten			
							4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	51 Laporan	Kab. Klaten			
							4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	51 Laporan	Kab. Klaten			
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	100 %	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	150 dokumen	Kab. Klaten			
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	350 dokumen	Kab. Klaten			
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	200 orang	Kab. Klaten			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100 %	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, tebaga kerja	3 dokumen	Semua Kab/Kota
							4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	2 Dokumen	Semua Kab/Kota
4.02 SEKRETARIAT DPRD										
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Klaten
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	Kab. Klaten
							4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	75 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	483 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	85 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %	4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	111 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Klaten
							4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100 %	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Klaten
							4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase capaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	Kab. Klaten
							4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	200 paket	Kab. Klaten
							4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	Kab. Klaten
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase DPRD terlayani administrasinya	100 %	4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	Kab. Klaten
							4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	Kab. Klaten
							4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	Kab. Klaten
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda	75.00 %	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang sisihkan	100 %	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20 Dokumen	Kab. Klaten
		Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran	100 %							
		Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan	100 %							
							4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	Kab. Klaten
							4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	Kab. Klaten
							4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	Kab. Klaten
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase kebijakan anggaran yang dibahas	100 %	4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6 Dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase OPD penyelenggaraan pemerintahan terawasi	100 %	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14 Laporan	Kab. Klaten
							4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Kab. Klaten
							4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Kab. Klaten
							4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	Kab. Klaten
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase DPRD yang diberikan peningkatan kapasitas	100 %	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Kab. Klaten
							4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	10 Dokumen	Kab. Klaten
							4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	Kab. Klaten
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Reses dan Pokok-pokok pikiran DPRD yang dilaksanakan	100 %	4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	Kab. Klaten
							4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Kab. Klaten
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang dilaksanakan	100 %	4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6 Laporan	Kab. Klaten
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase DPRD terfasilitasi tugasnya	100 %	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	Kab. Klaten
							4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13 Dokumen	Kab. Klaten
							4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	15 Dokumen	Kab. Klaten
	5.01 PERENCANAAN									
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100 %	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Klaten
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 Dokumen	Kab. Klaten
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	240 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %		5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %		5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan berlaku	100 %	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	Kab. Klaten
		Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	78.00 %							
							5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Kab. Klaten
							5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Kab. Klaten
							5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	Kab. Klaten
							5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 usulan	Kab. Klaten
							5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	2 Dokumen	Kab. Klaten
			5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi yang terakomodir didalam Sistem Informasi berbasis elektronik	100 %		5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	10 Masukan	Kab. Klaten
			5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersusun	100 %		5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	Kab. Klaten
							5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Kab. Klaten
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasikan	100 %		5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Klaten
		Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan		100.00 %						
							5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	22 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
							5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22 Laporan	Kab. Klaten
							5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Klaten
							5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Klaten
							5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
							5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
							5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kab. Klaten
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terkoordinasikan	100 %		5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Klaten
							5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 Perangkat daerah	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 Perangkat daerah	Kab. Klaten
							5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kab. Klaten
							5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	Kab. Klaten
							5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Perangkat daerah	Kab. Klaten
							5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
							5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	Kab. Klaten
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasikan	100 %		5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Klaten
							5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
							5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
							5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kab. Klaten
							5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Klaten
							5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
							5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	Kab. Klaten
							5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Kab. Klaten
5.02 KEUANGAN										
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara	100 %	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 %	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang	100 %		5.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Kab. Klaten
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %		5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Kab. Klaten
							5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 dokumen	Kab. Klaten
			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %		5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	Kab. Klaten
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %		5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							5.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	100 %	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tepat waktu sesuai Surat Edaran Bupati	100 %	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 orang	Kab. Klaten
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	100 %	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 laporan	Kab. Klaten
							5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	7 dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	158 orang	Kab. Klaten
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	100 %		5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	Kab. Klaten
							5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	Kab. Klaten
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran belanja transfer ke desa (DD, ADD, Bankeusus)	100 %		5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 laporan	Kab. Klaten
							5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	Kab. Klaten
							5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 laporan	Kab. Klaten
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	100.00 %	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyelesaian registrasi Barang Milik Daerah	100 %		5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	Kab. Klaten
							5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 laporan	Kab. Klaten
							5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	Kab. Klaten
							5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	930 orang	Kab. Klaten
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	10.50 %	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	100 %		5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	Kab. Klaten
							5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 unit	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	Kab. Klaten
							5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan	Kab. Klaten
							5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	Kab. Klaten
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	Kab. Klaten
							5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	Kab. Klaten
5.03 KEPEGAWAIAN										
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1226 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	5.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8350 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	85 %	5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	80.00 %	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase terpenuhinya Calon ASN yang sesuai Formasi	80 %	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1000 dokumen	Kab. Klaten
							5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	682 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	Kab. Klaten
							5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9000 dokumen	Semua Kab/Kota
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai Kualifikasi dan kompetensinya	75 %		5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 dokumen	Kab. Klaten
							5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1300 dokumen	Kab. Klaten
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Ijin penggunaan Gelar ASN yang terselesaikan	80 %		5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment center	300 dokumen	Semua Kab/Kota
							5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	200 orang	Semua Kab/Kota
							5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300 orang	Semua Kab/Kota
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Sasaran Kerja Pegawai yang di nilai dan di evaluasi	90 %		5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9000 dokumen	Semua Kab/Kota
							5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	75 orang	Kab. Klaten
							5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7 laporan	Semua Kab/Kota
							5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 dokumen	Semua Kab/Kota
							5.03.02.2.04.10 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	55 laporan	Semua Kab/Kota
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya	80.00 %	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Bintek/ Diklat Teknis	80 %	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	285 orang	Semua Kab/Kota
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Jabatan	80 %	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	890 laporan	Semua Kab/Kota
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	59.40 %	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang terlaksana	100 %	5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	Kab. Klaten
		Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	15.00 %							
							5.05.02.2.01.05 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	Kab. Klaten
							5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	Kab. Klaten
			5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang Terlaksana	100 %		5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	Kab. Klaten
							5.05.02.2.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							5.05.02.2.02.09 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	Kab. Klaten
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Presentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 %		5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	Kab. Klaten
							5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	Kab. Klaten
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Presentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang terlaksana	100 %		5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Kab. Klaten
							5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Kab. Klaten
							5.05.02.2.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Kab. Klaten
6.01 INSPEKTORAT DAERAH										
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100 %	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Klaten
							6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Klaten
							6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Klaten
							6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Klaten
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat waktu	100 %	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Klaten
							6.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	Kab. Klaten
							6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kab. Klaten
							6.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 dokumen	Kab. Klaten
							6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Kab. Klaten
			6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %		6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	Kab. Klaten
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat waktu	100 %		6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	180 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3000 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Kab. Klaten
							6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	450 Paket	Kab. Klaten
							6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	65000 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	302 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	Kab. Klaten
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %		6.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Kab. Klaten
							6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	Kab. Klaten
							6.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kab. Klaten
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %		6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
							6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kab. Klaten	
							6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus	100.00 %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100 %	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	Kab. Klaten	
		Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1	100.00 %								
		Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2	100.00 %								
		Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3	100.00 %								
		Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	100.00 %								
							6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	Kab. Klaten	
							6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	53 Laporan	Kab. Klaten	
							6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	223 Laporan	Kab. Klaten	
							6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	54 Laporan	Kab. Klaten	
							6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	Kab. Klaten	
							6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 dokumen	Kab. Klaten	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase aduan/kerugian daerah yang di tindaklanjuti	100 %	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	Kab. Klaten	
							6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	Kab. Klaten	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus	100.00 %	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	100 %	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	51 Rekomendasi	Kab. Klaten	
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1	100.00 %								
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2	100.00 %								
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3	100.00 %								
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4	100.00 %								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	54 Rekomendasi	Kab. Klaten
			6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Nilai MCP Korsupgah KPK	68 Nilai	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50 Perangkat Daerah	Kab. Klaten	
						6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 Perangkat Daerah	Kab. Klaten	
						6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	Kab. Klaten	
						6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 Perangkat Daerah	Kab. Klaten	
7.01 KECAMATAN										
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 eks	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	14 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	4 dokumen		
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen		
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	5 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		
	persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		
	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00 %		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		
	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		
				Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %					
						7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		Kab. Klaten
						7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		
							Jumlah laporan capaian kinerja dengan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun	2 Laporan		
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 orang	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				persentase pembayaran gaji tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 persen		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 Orang/Bulan		
				Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang/bulan		
				Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	98 %		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 Orang/Bulan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
				Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang		
				Persentase Pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		
				Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	12 bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/Bulan		
				Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		
				Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN, dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan		
				Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang		
				Persentase pembayaran gaji, Tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang		
				Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan		
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Desa		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan		
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan		
				Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		
				Prosentase pembayaran gaji, tunjangan, ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ Bulan		
				Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang / bulan		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		
						7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Klaten	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Orang	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 Dokumen	
						7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	Kab. Klaten
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 dokumen	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	4 Laporan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognos	1 Dokumen	Kab. Klaten
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18 Dokumen	
			7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian administrasi Kepegawaian Tepat waktu	12 bulan		7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1170 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Jenis		7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	30 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				Persentase Pemenuha Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %			Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	
				Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %			Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 jenis	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	12 bulan			Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	98 %			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 unit	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
				Persentase pemenuhan adm umum, perangkat daerah tepat waktu	100 %			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
				persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100 %			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	
				Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Jenis	
						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 jenis	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 Paket	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
							Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tersedia	35 Paket		
							Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 Paket		
							Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30 jenis		
						7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Kab. Klaten	
						7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	1 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Klaten	
							Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		
							Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket		
							Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36 eksemplar		
							Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10000 Paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2000 Paket		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5500 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	
						7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	1 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 dokumen	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	
								Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	
						7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	400 laporan	
								Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	58 laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 kali	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	200 Laporan	
								Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	350 Laporan	
						7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
								Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	60 laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 laporan	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 %			jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia	100 %			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	
				Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 %			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	
				Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 %			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
				persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 %			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	
				Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	
						7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Klaten
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	
						7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit	Semua Kab/Kota
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	Kab. Klaten
								Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	
								Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	8 unit	
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	4 Jenis	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		
				Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan		
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		
				persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan		
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan		
				Persentase Pemeuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		
				Persentase Pemeuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan		
				Persentase Pemeuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	600 laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan		
				Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 eks		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	770 Laporan		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan		
						7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	4 Jenis		Semua Kab/Kota

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Kab. Klaten
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	12 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik yang disediakan	3 laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Yang Disediakan	4 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 laporan	
							7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Kab. Klaten
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia	6 orang	Semua
								Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan	Kab/Kota
								Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Kab. Klaten
								Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	
								"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	5 Orang	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Jasa	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 orang	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 orang	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	7 Laporan	
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	1 unit	Kab. Klaten	
				ersentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100 %					
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit					
				Peresentase Barang Milik Daerah yang teroelihara	100 %					
				persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %					
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %					
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	10 unit					
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	12 bulan					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
					Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100 %				
					Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100 %				
					Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %				
					Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				
					persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen				
					Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %				
					Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				
					Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %				
							7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara dan pajaknya terbayar	1 unit	Semua Kab/Kota
								jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	1 unit	Kab. Klaten
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	8 Unit	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	7 Unit	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	11 Unit	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	
								jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	
								Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara serta dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	
						7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Semua	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	Kab/Kota	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Klaten	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		
							Jumlah mebel yang terpelihara	56 Unit		
							Jumlah Mebel yang terpelihara	30 Unit		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		
						7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	5 Unit	Kab. Klaten	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 unit		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 unit		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	10 Unit		
							Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	3 Unit		
						7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 Unit	Semua	
							Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	Kab/Kota	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Kab. Klaten	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	
								Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1 paket	
								Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	
					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	10 unit		Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit		
					7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		"Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	10 unit		Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Laporan	Kab. Klaten
		Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100 %							
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laprann	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	1 laporan	Kab. Klaten
					Persentase Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang	100 %		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
					persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (paten) 100 persen Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) 100 % Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN) 2 laporan Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN) 97 % Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN) 100 % Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN) 100 % Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN) 100 % Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN) 100 persen Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan 100 % Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dapat terselenggara 100 %			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 dokumen Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 laporan Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Wilayah di Kecamatan 1 Laporan Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Wilayah di Kecamatan 2 Laporan		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu 95 persen persentase lembaga masyarakat aktif 95 persen Persentase lembaga masyarakat aktif 86 % Persentase lembaga masyarakat aktif 95 % Persentase lembaga masyarakat aktif 95.00 % Persentase Lembaga Masyarakat Aktif 95 %	95 persen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17 desa Persentase desa yang terkoordinasi dalam kegiatan pemberdayaan 93 % Persentase desa yang terkoordinasi dalam kegiatan pemberdayaan 100 % Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan 100 % Persentase Desa yang Terkoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan 100 % persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 persen Persentase lembaga masyarakat aktif 100 %		7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18 Desa Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa 14 Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 lembaga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga		Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				Persentase Masyarakat Aktif	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasy		
				Presentase Desa Yang Terkoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan	97 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan		
				Presentase Lembaga Aktif	95 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemsyarakan		
				Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga		
				Prosentase lembaga masyarakatan yang aktif	95 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan		
				Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 lembaga kemasyarakatan		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 desa		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 LbgKmsy		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 Lembaga Kemasyarakatan		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39 Lembaga Kemasyarakatan		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	90 Lembaga Masyarakat		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyaraktn		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		
						7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	4 laporan	Kab. Klaten	
							Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	5 laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19 Laporan		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kelurahan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2 Kegiatan	Kab. Klaten
					Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 kegiatan	
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 lembaga	
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga	
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	
							7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	7 Kegiatan	Kab. Klaten
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/Ormas	
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	98 %	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yan Dilakukan	100 %	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	13 Kegiatan	Kab. Klaten	
	persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	96 persen		persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 persen		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan		
	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 %		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	98 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100.00 %		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	
		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %		Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	96 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	
		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 Persen		Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	100 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	
		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 Persen		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	
					Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
					Presentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	98 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 laporan	
					Presentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	
					Prosentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	96 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	
					Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	100 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
					unan desa, jumlah desa yang di lakukan pembinaan.	100 %		jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan/atau kepolisian Negara RI	12 laporan	
							7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah laporan pelaksnaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh	2 laporan	Kab. Klaten
								Jumlah Laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	7 Laporan	
								Jumlah Laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 Laporan	
								Jumlah Laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2 Laporan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13 Laporan	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 laporan	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Laporan	
			7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah laporan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau kepolisian republik indonesia	3 Laporan	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	Kab. Klaten	
				Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan	100 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	9 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
				Persentase koordinasi penegakan perundangundangan yang dilakukan	100 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan		
				Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	90 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		
				Persentase koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan	96 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan		
				Persentase koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan	100 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan		
				Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		
				persentase koordinasi penerapana dan penegakan perda dan peraturan kepala daerah	100 persen		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 laporan		
				Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan		
				Presentase Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan	97 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan		
				Presentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan		
				Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilakukan	100 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
					Terkoordinasinya Penegakan Perundang Undangan yang dilakukan	100 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14 laporan	
					Terkoordinasinya Penegakan Perundang- Undangan yang dilakukan	2 Laporan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	
					Trerfasilitasi Desa di Kecamatan Delanggu	100 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian	9 Laporan	
			7.01.04.7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	100 %	7.01.04.7.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Kab. Klaten	
						7.01.04.7.03.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13 Kegiatan	Kab. Klaten	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase orang yang mengikuti koordinasi dan pembinaan (BIMTEK,Sosialisasi,Konsultasi) Kawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	96 %	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	"Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional"	17 desa	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek,sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	450 Orang	Kab. Klaten
		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangan	1 Orang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	96 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	
		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	95.00 %		Persentase Koordinasdan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Diselenggarakan	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25 orang	
		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %		Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	96 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	
		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96.00 %		Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	97 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Persentase potensi konflik sosial di Kecamatan yang tertangani	96 %		Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang	
		Persentase Potensi Konflik Sosial di Kecamatan yang Tertangani	100 %		Persentase Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Diselenggarakan	96 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang	
		presentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 persen		Persentase Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Diselenggarakan	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	
					Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	
					Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	
					presentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	100 persen		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	
					Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55 Orang/kegiatan	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	130 orang	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 orang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	210 Orang	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	340 Orang	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650 orang	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	695 Orang	
							7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah laporan konflik yang di tangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1 laporan	Kab. Klaten
								Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	
								Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	
								Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	
								Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	
								Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	
								Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13 Laporan	
								Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16 Laporan	
								Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17 Laporan	
								Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18 Laporan	
								Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19 Laporan	
								Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20 Laporan	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	86.00 %	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	"Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa"	17 desa	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen	Kab. Klaten
		Persentase desa tertib administrasi	95 %		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat	95 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		Persentase desa tertib administrasi	95.00 %		Persentase desa tertib administrasi	100 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	
		Persentase desa tertib administrasi	95.00 %		Persentase Pemerintah Desa yang dilakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan	100 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	
		Persentase desa tertib administrasi	96.00 %		Persentase Pemerintah Desa yang dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	
		Persentase Desa Tertib Administrasi	95 %		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	96 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 dokumen	
		Persentase desa tertib administrasi	95.00 %		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen	
		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 %		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	98 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 dokumen	
		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97 %		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	
		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97.00 %		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	
		Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	97 %		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	95 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	
		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	96.00 %		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	
		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 %		Persentase desa Tertib Administrasi	95 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17 Dokumen	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
		prosentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97 persen	prosentase pemerintah desa yang dilakukan fasilitasi rekomnedasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	100 persen		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen		
				Prosentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	38 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	52 dokumen		
							Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 dokumen		
						7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	0 Dokumen	Kab. Klaten	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Desa		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 Dokumen		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Dokumen		
							Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	1 dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
							7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendatagunaan Aset Desa	0 Dokumen	Kab. Klaten
								Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Desa	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Desa	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 Dokumen	
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 Dokumen	
								Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendatagunaan Aset Desa	1 dokumen	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
						7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	1 dokumen	Kab. Klaten	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	17 Desa		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20 Dokumen		
						7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	Kab. Klaten	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17 desa	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19 dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20 Dokumen	
								Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	
						7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Desa Terfasilitasi pelaksanaan pemilihan BPD	0 Dokumen	Kab. Klaten
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	16 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	17 Desa	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	18 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	19 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	
								Terfasilitasi pelaksanaan pemilihan BPD	1 dokumen	
								umlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	14 Dokumen	
						7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1 Dokumen	Kab. Klaten
								Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Rekomendasi	
								Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	18 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	18 Rekomendasi	
								Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20 Dokumen	
						7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	Kab. Klaten
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 Dokumen	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Dokumen	
								Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	
						7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 Dokumen	Kab. Klaten
						7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	Kab. Klaten
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	3 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	12 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	13 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	19 Dokumen	
								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	20 Dokumen	
						7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Kab. Klaten
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							8.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100 %	8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	750 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
							8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 %	8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Klaten
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Klaten
							8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	Kab. Klaten

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	65.00 %	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	80 %	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	731013 Orang	Kab. Klaten
		Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	4.00 %		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik				
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	100.00 %	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan	100 %	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	Kab. Klaten
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	
							8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	
							8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	
							8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	80.00 %	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100 %	8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	Kab. Klaten
		Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	100.00 %							

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
01:01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.008.758.456.265
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	1.008.758.456.265
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	869.305.407.265
01:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	812.324.648.265
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.179.000
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.000.000
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.800.000
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	27.000.000
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.000.000
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.379.000
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	808.773.000.265
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	808.718.000.265
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	55.000.000
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	411.000.000
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	411.000.000
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.250.000
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60.250.000
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.030.215.000
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.921.000
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	490.894.000
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000
1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	54.000.000
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.000.000
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	199.400.000
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	469.083.000
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	469.083.000
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.066.106.000
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.000.000
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	817.106.000
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.815.000
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.000.000
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.815.000
01:01:02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	43.747.850.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	8.689.426.000
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	216.995.000
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.448.131.000
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	338.000.000
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	450.000.000
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	900.000.000
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	34.000.000
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.000.000.000
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	169.000.000
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	166.500.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	650.000.000
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	171.800.000
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	290.000.000
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	855.000.000
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.437.012.000
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	297.395.000
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.500.000.000
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.250.000.000
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.259.769.000
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.500.000.000
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	397.968.000
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	846.190.000
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	146.635.000
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.750.000.000
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	156.392.000
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	218.595.000
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	419.557.000
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200.000.000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.256.000.000
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	238.511.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20.929.212.000
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	99.655.000
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	99.755.000
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	49.455.000
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	128.129.000
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	74.000.000
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	169.952.000
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	128.000.000
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	19.862.400.000
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	117.866.000
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.692.200.000
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	99.700.000
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	49.900.000
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	50.000.000
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	45.000.000
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	86.000.000
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.361.600.000
01:01:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	592.414.000
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	438.414.000
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	438.414.000
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	154.000.000
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	54.000.000
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
01:01:04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	12.555.495.000
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.555.495.000
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.475.495.000
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80.000.000
01:01:06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	85.000.000
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000
1.01.06.2.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000
1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000
1.01.0.00.0.00.01.000 1	TK NEGERI PEMBINA KLATEN	38.949.000
01:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.949.000
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.949.000
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.949.000
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.000.000
1.01.0.00.0.00.01.000 2	SD NEGERI	72.720.000.000
01:01:02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	72.720.000.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	72.720.000.000
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	72.720.000.000
1.01.0.00.0.00.01.000 3	SMP NEGERI	66.390.600.000
01:01:02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	66.390.600.000
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	66.390.600.000
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	66.390.600.000
1.01.0.00.0.00.01.000 4	SPNF SKB KLATEN	303.500.000
01:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	228.079.000
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.931.000
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.800.000
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.315.000
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000
1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.396.000
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420.000
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.500.000
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.500.000
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.748.000
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.044.000
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.050.000
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.654.000
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.900.000
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.950.000
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.460.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.490.000
01:01:02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	75.421.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.000.000
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	15.000.000
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	60.421.000
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	60.421.000
01:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	391.002.231.763
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	391.002.231.763
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	200.911.123.193
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.422.837.474
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.000.000
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40.000.000
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.000.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	127.173.060.750
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	127.062.019.550
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.000.000
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.041.200
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	244.642.000
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	244.642.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.134.000
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.528.000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.014.000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000
1.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	75.150.000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.442.000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.146.606.924
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	100.000.000
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	713.576.000
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	333.030.924
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.608.073.800
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.660.000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.000.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.215.413.800
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.320.000
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.025.000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.760.000
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.450.000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	320.085.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	35.000.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	35.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.431.359.719
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.619.211.812
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	3.500.000.000
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	2.000.000.000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.500.000.000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.000.000.000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.181.081.812
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.212.878.000
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	200.000.000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.046.577.000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.685.161.000
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	73.710.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22.500.000
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	197.304.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.586.449.907
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	316.253.807
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	502.246.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	73.072.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	135.950.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	59.814.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	35.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	34.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	150.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	557.500.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	359.775.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	75.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	679.840.100
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	177.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	784.970.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	380.000.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	82.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	80.000.000
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	660.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	473.000.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.553.392.000
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	29.537.000
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	785.500.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	200.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	75.000.000
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.052.600.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	100.000.000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	205.698.000
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	45.800.000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	45.000.000
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	114.898.000
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	20.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	233.590.000
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	53.000.000
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	20.000.000
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	33.000.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	68.590.000
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.000.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	28.590.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.000.000
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.000.000
01:02:04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	445.002.000
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	108.960.000
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40.000.000
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	68.960.000
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	27.500.000
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	27.500.000
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	136.390.000
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	136.390.000
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	30.000.000
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	30.000.000
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	35.000.000
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	35.000.000
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	107.152.000
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	107.152.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	378.334.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	328.334.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	328.334.000
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.000 1	RSUD BAGAS WARAS	92.085.014.358
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.085.014.358
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.985.013.728
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.985.013.728
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	74.100.000.630
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	74.100.000.630
1.02.0.00.0.00.01.000 2	PUSKESMAS KLATEN UTARA	1.907.881.330
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.267.336.330
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.267.336.330
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.267.336.330
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	594.671.400
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	594.671.400
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.466.600
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	346.204.800
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	8.000.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	8.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25.000.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	15.000.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	8.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10.000.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	41.223.600
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	41.223.600

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	41.223.600
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.650.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.650.000
1.02.0.00.0.00.01.000 3	PUSKESMAS KLATEN TENGAH	2.070.776.420
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.358.440.420
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.358.440.420
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.358.440.420
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	644.199.008
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	644.199.008
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76.607.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.058.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.427.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.370.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.440.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.160.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	109.290.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	8.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	111.152.900
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.024.208
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	53.245.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	25.550.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	6.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	97.874.900
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	6.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	63.136.992
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	63.136.992
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	63.136.992
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.000.000
1.02.0.00.0.00.01.000 4	PUSKESMAS KLATEN SELATAN	2.414.482.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.649.822.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.649.822.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.649.822.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	711.735.584
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	711.735.584
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.580.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.640.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.080.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	22.140.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.330.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.969.584
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19.734.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.840.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.960.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	82.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10.140.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	23.180.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.440.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	226.600.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45.760.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	121.142.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	47.554.416
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.554.416
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	47.554.416
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.370.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.370.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.370.000
1.02.0.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS KALIKOTES	1.919.455.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.214.850.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.214.850.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.214.850.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	655.826.504
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	655.826.504
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	64.452.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.070.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.830.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.200.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.940.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.235.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19.475.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.560.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.560.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.050.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.670.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.565.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	144.500.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	92.255.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.290.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48.690.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	66.794.504
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.660.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36.030.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	31.568.496
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.568.496
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	31.568.496
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.210.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.210.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17.210.000
1.02.0.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS NGAWEN	2.917.019.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.158.996.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.158.996.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.158.996.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	717.238.752
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	717.238.752
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88.711.752
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.200.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.600.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23.400.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	48.960.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	17.750.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.318.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.500.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	110.750.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	94.705.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.548.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	102.720.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	107.511.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10.765.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	15.000.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.800.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	35.784.248
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	35.784.248
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	35.784.248
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS KEBONARUM	1.557.500.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	825.000.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	825.000.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	825.000.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	667.363.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	667.363.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	130.972.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.760.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.717.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	33.505.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	106.290.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	40.540.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.185.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	70.372.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	72.742.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	3.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.580.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	106.700.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	63.137.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	63.137.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	63.137.000
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.000.000
1.02.0.00.0.00.01.000 8	PUSKESMAS WEDI	3.752.146.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.954.786.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.954.786.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.954.786.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	761.141.120
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	761.141.120
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.969.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.260.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.260.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	63.360.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.610.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	110.005.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.984.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.590.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.100.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	149.114.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23.800.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.520.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.730.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	81.042.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	16.077.120
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.380.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	74.340.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	31.568.880
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.568.880
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	31.568.880
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.650.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.650.000
1.02.0.00.0.00.01.000 9	PUSKESMAS JOGONALAN I	3.058.618.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.276.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.276.000.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.276.000.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	714.831.008
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	714.831.008
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81.560.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	22.020.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	32.420.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	77.880.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.539.600
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	26.090.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	12.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	84.460.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.700.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	70.018.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	116.545.408
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	3.180.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.480.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	59.938.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	63.136.992
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	63.136.992
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	63.136.992
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.650.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.650.000
1.02.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS JOGONALAN II	2.554.767.500
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.682.029.500
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.682.029.500
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.682.029.500
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	820.735.256
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	820.735.256
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.900.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.900.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30.750.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.750.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.880.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	31.170.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	32.520.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.320.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	77.380.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	12.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	74.500.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	98.200.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	158.515.256
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	16.920.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	75.030.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	47.352.744
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.352.744
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	47.352.744
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.650.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.650.000
1.02.0.00.0.00.01.001 1	PUSKESMAS GANTIWARNO	3.826.985.752
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.040.773.752
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.040.773.752
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.040.773.752
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	693.075.008
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	693.075.008
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.826.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	900.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	89.826.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.140.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.944.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.040.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.600.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.700.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	79.688.008
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.600.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	94.560.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.320.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	40.644.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	122.931.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	6.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	102.656.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.800.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	63.136.992
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	63.136.992
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	63.136.992
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	30.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30.000.000
1.02.0.00.0.00.01.001 2	PUSKESMAS PRAMBANAN	2.531.688.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.800.000.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.800.000.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.800.000.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	695.469.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	695.469.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.000.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	37.609.600
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.000.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	52.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	38.000.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	6.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	47.859.400
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	69.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	79.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110.000.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	31.569.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.569.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	31.569.000
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.650.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.650.000
1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS KEBONDALEM LOR	1.975.985.176
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.360.739.176
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.360.739.176
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.360.739.176
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	563.243.256
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	563.243.256
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.550.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.640.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19.160.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.800.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.560.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	13.200.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.420.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.830.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	77.870.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.680.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.920.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.380.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142.080.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	4.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.700.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	113.453.256
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	47.352.744

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.352.744
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	47.352.744
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.650.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.650.000
1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS MANISRENGGO	3.351.634.640
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.425.114.640
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.425.114.640
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.425.114.640
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	853.383.008
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	853.383.008
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	67.500.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	71.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.300.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24.900.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.100.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	20.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	40.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	30.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	81.933.008
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	10.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35.500.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24.900.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	71.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.000.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.650.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.600.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	71.000.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	9.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	9.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	63.136.992
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	63.136.992
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	63.136.992
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS KEMALANG	3.709.067.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.829.555.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.829.555.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.829.555.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	836.303.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	836.303.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	103.659.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	20.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.680.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	50.114.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.640.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.320.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	110.000.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.430.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	71.708.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.128.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	126.462.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	125.000.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	4.716.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	46.160.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.286.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	15.784.248
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	15.784.248
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	15.784.248
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	27.424.752
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.424.752
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	27.424.752
1.02.00.0.00.01.001		
6	PUSKESMAS KARANGNONGKO	2.472.739.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.774.052.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.774.052.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.774.052.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	650.334.256
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650.334.256
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	60.438.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	40.320.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.810.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.800.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	96.030.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	58.710.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.325.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	86.300.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	88.976.250
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.430.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	144.195.006
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	47.352.744
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.352.744
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	47.352.744
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000
1.02.0.00.0.00.01.001 7	PUSKESMAS JATINOM	2.560.482.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.815.800.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.815.800.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.815.800.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	664.945.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.945.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80.888.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	41.760.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.635.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.880.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.500.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.500.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.500.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.500.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	96.030.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52.105.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.325.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	82.451.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	103.156.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.790.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101.925.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	75.737.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	75.737.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	75.737.000
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0018	PUSKESMAS KAYUMAS	2.338.520.800
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.648.320.800
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.648.320.800
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.648.320.800
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	637.847.256
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	637.847.256
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95.322.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.480.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.960.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	63.654.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.210.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.210.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.080.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.874.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.874.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.040.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.874.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.874.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	109.524.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.320.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	57.692.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.266.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	75.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	88.953.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	3.754.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.388.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.498.256
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	47.352.744
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.352.744
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	47.352.744
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS KARANGANOM	2.815.621.400
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.063.160.400
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.063.160.400
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.063.160.400
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	716.242.504
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	716.242.504
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.720.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.200.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.500.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69.646.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	71.768.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	38.754.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	38.598.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	102.720.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	67.844.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	51.114.504
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	43.258.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	83.120.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	31.568.496

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.568.496
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	31.568.496
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.650.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.650.000
1.02.0.00.0.00.01.0020	PUSKESMAS TULUNG	2.254.398.503
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.504.663.503
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.504.663.503
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.504.663.503
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	713.166.504
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	713.166.504
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.788.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.800.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.800.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	130.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	37.430.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.430.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.260.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.900.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	75.600.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	5.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	81.828.504
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	59.730.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	45.600.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	115.000.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.000.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	31.568.496
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.568.496
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	31.568.496
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0021	PUSKESMAS MAJEGAN	2.086.770.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.232.080.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.232.080.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.232.080.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	756.505.200
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	756.505.200
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98.956.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.620.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.430.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	94.392.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	79.654.600
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.480.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.389.400
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.240.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.450.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	82.655.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.190.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.390.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	121.395.500
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	108.555.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.480.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	64.227.700
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	63.137.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	63.137.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	63.137.000
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	35.047.800
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.047.800
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	35.047.800
1.02.00.0.00.01.002		
2	PUSKESMAS POLANHARJO	2.539.142.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.717.727.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.717.727.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.717.727.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	774.325.088
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	774.325.088
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.870.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.080.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.080.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	64.876.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47.940.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	26.108.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.760.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.120.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.070.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	121.800.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	51.835.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	23.310.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	128.360.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	135.775.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.420.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72.921.088
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	36.829.912
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	36.829.912
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	36.829.912
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.260.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.260.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.260.000
1.02.0.00.0.00.01.002 3	PUSKESMAS DELANGGU	3.745.013.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.957.242.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.957.242.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.957.242.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	767.336.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	767.336.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	84.150.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.280.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.580.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	103.800.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.178.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	114.100.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	40.800.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.880.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.880.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.880.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.880.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.880.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	123.492.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.800.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52.086.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.720.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	46.310.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	53.340.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.260.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.180.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36.420.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	21.600.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	15.840.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	15.785.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	15.785.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	15.785.000
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.650.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.650.000
1.02.0.00.0.00.01.002 4	PUSKESMAS JUWIRING	4.941.585.320
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.995.745.320
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.995.745.320
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.995.745.320
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	870.871.208
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	870.871.208
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	206.527.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	900.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.022.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	53.820.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.844.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.660.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.579.100
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	156.020.032
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	86.177.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.116.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	92.578.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	99.608.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	8.734.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	63.286.076
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	63.136.992
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	63.136.992
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	63.136.992
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.831.800
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.831.800
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.831.800
1.02.0.00.0.00.01.002 5	PUSKESMAS WONOSARI I	2.224.152.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.588.960.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.588.960.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.588.960.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	589.318.400
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	589.318.400
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.231.200
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	20.000.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.000.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.000.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	8.000.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	7.377.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22.623.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	14.000.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	8.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	319.087.200
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	41.223.600

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	41.223.600
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	41.223.600
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.650.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.650.000
1.02.0.00.0.00.01.002 6	PUSKESMAS WONOSARI II	2.109.908.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.514.888.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.514.888.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.514.888.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	593.020.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	593.020.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.834.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.480.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.240.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32.288.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.500.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	26.950.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.880.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	89.160.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50.266.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.730.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	46.645.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	52.110.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	159.937.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.000.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.000.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.000.000
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000
1.02.0.00.0.00.01.002 7	PUSKESMAS CEPER	2.758.803.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.073.401.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.073.401.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.073.401.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	664.614.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.614.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.994.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.300.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.340.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	59.368.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.530.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	45.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.295.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.885.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.885.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.385.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.430.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.885.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	153.086.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	39.285.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.400.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	69.385.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	107.860.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.380.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	52.941.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.260.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	720.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	15.788.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	15.788.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	15.788.000
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.000.000
1.02.0.00.0.00.01.002		
8	PUSKESMAS JAMBU KULON	2.461.461.900
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.760.043.900
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.760.043.900
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.760.043.900
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	655.544.400
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	655.544.400
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.060.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.095.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.350.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	102.171.800
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.202.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.039.600
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	108.926.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	44.900.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	40.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	52.490.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	105.310.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	9.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	41.223.600
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	41.223.600
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	41.223.600
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.650.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.650.000
1.02.0.00.0.00.01.0029	PUSKESMAS PEDAN	3.645.343.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.700.068.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.700.068.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.700.068.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	867.052.256
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	867.052.256
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	172.037.093
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.200.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	29.320.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	40.256.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	68.684.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.230.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27.452.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	27.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	27.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.040.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.005.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.810.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	138.550.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	11.807.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	56.060.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.820.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	53.090.163
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	78.830.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	11.807.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.760.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22.680.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	11.807.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	11.807.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	47.352.744
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.352.744
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	47.352.744
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	30.870.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.870.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30.870.000
1.02.0.00.0.00.01.0030	PUSKESMAS KARANGDOWO	5.305.679.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.461.000.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.461.000.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.461.000.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	796.326.256
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	796.326.256
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88.376.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	43.605.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.832.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.006.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.310.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	46.610.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.584.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	75.078.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	164.131.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	45.073.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	127.085.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.911.256
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	47.080.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	94.645.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.000.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.000.000
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	47.352.744
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.352.744
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	47.352.744
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.000.000
1.02.0.00.0.00.01.003 1	PUSKESMAS CAWAS I	3.138.057.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.446.745.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.446.745.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.446.745.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	639.369.256
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	639.369.256
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.316.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.400.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.600.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23.966.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.916.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	18.116.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.675.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.920.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.990.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27.116.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25.676.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.990.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	105.390.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.960.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	44.216.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.816.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.816.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	96.945.256
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.700.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.220.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	103.695.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.980.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4.950.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	47.352.744
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.352.744
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	47.352.744
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.590.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.590.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.590.000
1.02.0.00.0.00.01.003 2	PUSKESMAS CAWAS II	2.091.313.960
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.506.953.960
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.506.953.960
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.506.953.960
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	548.141.504
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	548.141.504
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.680.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.182.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.485.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20.020.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.660.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.110.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.150.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	135.320.254
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63.515.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.325.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26.570.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	84.809.250
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.210.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	16.305.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	31.568.496
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.568.496
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	31.568.496
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.650.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.650.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.0.00.0.00.01.003 3	PUSKESMAS TRUCUK I	3.361.636.000
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.683.000.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.683.000.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.683.000.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	658.291.750
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	658.291.750
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.908.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.000.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.000.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	47.628.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.066.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	20.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.878.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.000.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.000.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	71.262.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36.630.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.280.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	82.893.750
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	66.412.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.890.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	163.444.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	15.784.250
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	15.784.250
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	15.784.250
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.560.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.560.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.560.000
1.02.0.00.0.00.01.003 4	PUSKESMAS TRUCUK II	3.011.682.418
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.217.680.418
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.217.680.418
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.217.680.418
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	702.535.008
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	702.535.008

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.912.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.880.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	900.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	36.560.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.378.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.420.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.030.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.030.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.940.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.880.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	122.550.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	25.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	42.940.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20.110.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48.240.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	113.060.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	25.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.800.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	96.835.008
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	270.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	25.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	63.136.992
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	63.136.992
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	63.136.992
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	28.330.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.330.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	28.330.000
1.02.0.00.0.00.01.003		
5	PUSKESMAS BAYAT	4.595.780.093
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.688.030.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.688.030.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.688.030.000
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	856.157.349
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	856.157.349
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	116.833.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	270.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.440.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	102.607.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.748.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24.530.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.180.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.650.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.676.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	81.525.000
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50.220.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.490.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	133.481.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	120.387.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1.000.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.260.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	141.860.349
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.000.000
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	47.352.744
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	47.352.744
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	47.352.744
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.240.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.240.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.240.000
01:03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	218.654.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	218.654.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	218.654.000.000
01:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.447.879.260
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.390.798.440
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.892.498.440
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.500.000
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	310.800.000
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	310.636.000
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	280.636.000
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	640.000.000
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	185.000.000
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.000.000
1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	75.000.000
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	305.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	990.257.500
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260.000.000
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72.097.500
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000
1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.000.000
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	423.160.000
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.625.239.000
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.210.000
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	338.500.000
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.144.529.000
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.838.056.120
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	800.000.000
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.823.056.120
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.452.892.200
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.680.000
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.500.000
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.019.712.200
01:03:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.823.000.000
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.475.000.000
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	75.000.000
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	300.000.000
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	2.990.000.000
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.348.000.000
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	875.000.000
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	275.000.000
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.143.000.000
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	1.850.000.000
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.205.000.000
01:03:03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.957.570.000
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.957.570.000
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100.000.000
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	100.000.000
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.500.000.000
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	200.000.000
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	100.000.000
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.957.570.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
01:03:04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.103.820.000
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.103.820.000
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.800.000.000
1.03.04.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	303.820.000
01:03:05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.653.570.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.653.570.000
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	700.000.000
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.400.000.000
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	946.000.000
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	550.000.000
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	857.570.000
01:03:06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.893.894.000
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.893.894.000
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	220.000.000
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.373.894.000
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	200.000.000
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	100.000.000
01:03:08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	82.411.866.740
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	82.411.866.740
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	600.000.000
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	66.211.866.740
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	100.000.000
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15.500.000.000
01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	600.000.000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	300.000.000
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	200.000.000
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	100.000.000
01:03:10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	70.213.718.000
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	70.213.718.000
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	660.000.000
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	19.455.000.000
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	30.356.000.000
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	1.500.000.000
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	18.242.718.000
01:03:11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	350.000.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.000
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	50.000.000
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100.000.000
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	50.000.000
1.03.11.2.03.05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	50.000.000
01:03:12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.198.682.000
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	363.682.000
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	263.682.000
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	100.000.000
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	200.000.000
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	100.000.000
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100.000.000
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	100.000.000
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	335.000.000
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	200.000.000
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	135.000.000
01:04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.503.625.352
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.503.625.352
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.503.625.352
01:04:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.089.625.352
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.741.000
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.741.000
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.371.691.136
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.187.691.136
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144.000.000
1.04.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000
1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000
1.04.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000
1.04.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000
1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	45.000.000
1.04.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000
1.04.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	25.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.04.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.000.000
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.000.000
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000.000
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	50.000.000
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.891.193.216
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.737.029.216
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.089.164.000
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.000.000
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.000.000
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.000.000
01:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.417.000.000
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	275.000.000
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	50.000.000
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	25.000.000
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	50.000.000
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	242.000.000
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	75.000.000
1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	75.000.000
1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	42.000.000
1.04.02.2.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	50.000.000
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	470.000.000
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000
1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	50.000.000
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	170.000.000
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000
1.04.02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	275.000.000
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	225.000.000
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	50.000.000
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.000.000
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.000.000
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	50.000.000
1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	50.000.000
01:04:03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.280.000.000
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	80.000.000
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	80.000.000
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	500.000.000
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100.000.000
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	50.000.000
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	50.000.000
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50.000.000
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	50.000.000
1.04.03.2.02.06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	50.000.000
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	150.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	700.000.000
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	100.000.000
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	200.000.000
1.04.03.2.03.05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	50.000.000
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	200.000.000
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	100.000.000
01:04:04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	8.967.000.000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	8.967.000.000
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8.867.000.000
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000
1.04.04.2.01.03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000
01:04:05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.700.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.700.000.000
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	50.000.000
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.300.000.000
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100.000.000
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	250.000.000
01:04:06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	50.000.000
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	50.000.000
01:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.931.366.201
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10.978.272.801
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10.978.272.801
01:05:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.375.693.386
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.784.782
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.784.782
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.747.448.328
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.736.888.328
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.000.000
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.560.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.178.000
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.878.000
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.300.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.500.050
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.050
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	10.000.000
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.000.000
1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.782.226
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.282.226
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.000.000
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	244.000.000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000
01:05:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.400.355.393
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.948.355.393
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.813.855.393
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	10.000.000
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.000.000
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	39.500.000
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	5.000.000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	449.000.000
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.000.000
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	250.000.000
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	194.000.000
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	3.000.000
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	3.000.000
01:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.202.224.022
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.182.152.022
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.171.452.022
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	5.000.000
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	2.500.000
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	9.000.000
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.000.000
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5.000.000
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	5.000.000
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2.000.000
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	3.000.000
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	6.072.000
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	2.000.000
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	2.072.000
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	2.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.953.093.400
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.953.093.400

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
01:05:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.783.176.305
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.906.000
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.906.000
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.941.267.944
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.913.347.944
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.920.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.607.861
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.550.000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.057.861
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	56.000.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.516.000
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	49.500.000
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.016.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623.415.500
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.415.500
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.000.000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	291.000.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	748.463.000
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	477.540.000
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.950.000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.973.000
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.000.000
01:05:03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.169.917.095
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	142.000.000
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	142.000.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.278.850.000
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	175.000.000
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	125.000.000
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	262.000.000
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	200.000.000
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	90.000.000
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	286.850.000
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	90.000.000
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	647.817.095
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	237.817.095
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	180.000.000
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	30.000.000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	101.250.000
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	12.250.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	18.900.000
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	70.100.000
01:06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	11.323.562.191
1.06.2.08.2.14.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.323.562.191
1.06.2.08.2.14.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.323.562.191
01:06:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.961.041.191
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.448.675.808
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.438.675.808
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.300.000
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.300.000
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	60.000.000
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.500.000
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208.500.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.565.383
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.865.383
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.000.000
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.000.000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000
01:06:02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.175.850.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.175.850.000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	647.000.000
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	507.850.000
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	21.000.000
01:06:04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.294.517.000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.008.511.000
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	792.387.000
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	201.124.000
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	15.000.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	286.006.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	17.500.000
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	268.506.000
01:06:05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.622.879.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.622.879.000
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	95.750.000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	213.000.000
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.234.129.000
01:06:06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	200.275.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	177.000.000
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	30.000.000
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	30.000.000
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	30.000.000
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	67.000.000
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	20.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	23.275.000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	23.275.000
01:06:07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	69.000.000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	69.000.000
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24.000.000
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	45.000.000
2	DASAR	
02:07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.784.000.000
3.31.2.07.3.32.05.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2.784.000.000
3.31.2.07.3.32.05.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2.784.000.000
02:07:02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	5.000.000
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	5.000.000
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	5.000.000
02:07:03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	850.000.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	800.000.000
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	800.000.000
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	25.000.000
02:07:04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.720.000.000
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	980.000.000
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	80.000.000
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100.000.000
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	800.000.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	25.000.000
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	25.000.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	600.000.000
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	100.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
02:07:05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	209.000.000
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.000.000
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	32.000.000
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25.000.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	152.000.000
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.000.000
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	10.000.000
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	45.000.000
02:08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	469.250.000
1.06.2.08.2.14.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	469.250.000
1.06.2.08.2.14.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	469.250.000
02:08:02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	77.450.000
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	47.700.000
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	25.000.000
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	22.700.000
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	24.750.000
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	24.750.000
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000
02:08:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	10.000.000
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
02:08:04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	111.000.000
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.000.000
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	76.000.000
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000
02:08:05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	10.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
02:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	245.800.000
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	153.000.000
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	123.000.000
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	92.800.000
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.800.000
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000
02:08:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	15.000.000
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000
02:09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.657.503.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.657.503.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.657.503.000
02:09:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	3.056.003.000
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.056.003.000
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	3.056.003.000
02:09:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	516.500.000
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	264.000.000
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	124.000.000
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	32.500.000
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	32.500.000
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	75.000.000
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	10.000.000
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	10.000.000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	242.500.000
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	242.500.000
02:09:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.000.000
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	30.000.000
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
02:09:05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	35.000.000
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
02:10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	5.525.000.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.525.000.000
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.525.000.000
02:10:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100.000.000
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
02:10:05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.075.000.000
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.075.000.000
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.050.000.000
02:10:06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	200.000.000
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	50.000.000
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	50.000.000
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50.000.000
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	50.000.000
02:10:10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	150.000.000
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	50.000.000
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	50.000.000
02:11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	29.981.491.358
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	29.981.491.358
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	29.981.491.358
02:11:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.408.173.349
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.318.405
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.500.000
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.818.405
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.570.759.424
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.520.759.424
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.000.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	387.406.600
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.164.600

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	63.450.000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.792.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.230.000
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.230.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	664.886.920
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.386.920
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.572.000
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	326.943.000
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.079.000
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.550.000
02:11:02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	778.976.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	324.322.000
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	125.000.000
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	199.322.000
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	454.654.000
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	254.654.000
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	200.000.000
02:11:03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	321.843.920
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	239.768.000
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	169.768.000
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	70.000.000
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	82.075.920
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	82.075.920
02:11:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4.440.000.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.440.000.000
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.340.000.000
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	80.000.000
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	20.000.000
02:11:05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	60.000.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	40.000.000
2.11.05.2.01.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20.000.000
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	20.000.000
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
2.11.05.2.02.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20.000.000
02:11:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	89.152.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.152.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	30.000.000
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.152.000
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	20.000.000
02:11:08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	178.897.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	178.897.000
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	148.897.000
02:11:09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	430.000.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	430.000.000
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	430.000.000
02:11:10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	39.661.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	39.661.000
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.661.000
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	20.000.000
02:11:11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.234.788.089
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	11.234.788.089
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.197.845.100
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.112.239.989
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	92.700.000
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.832.003.000
02:12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.154.768.833
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.154.768.833
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.154.768.833
02:12:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.079.377.833
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.228.828.248
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.213.828.248
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.000.000
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	208.000.000
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	190.000.000
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.575.933.000
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.373.000
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.423.650.000
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.350.000
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.560.000
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	459.533.098
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	459.533.098
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.033.487
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.908.049
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.125.438
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	376.000.000
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.050.000
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.800.000
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.250.000
02:12:02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	645.030.000
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	629.030.000
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	606.056.000
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12.974.000
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10.000.000
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	16.000.000
2.12.02.2.03.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	10.000.000
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	6.000.000
02:12:03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	331.860.000
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	321.860.000
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	321.860.000
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.000.000
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	10.000.000
02:12:04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	44.619.000
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	14.619.000
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9.619.000
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5.000.000
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.000.000
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.000.000
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.000.000
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.000.000
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.000.000
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	15.000.000
02:12:05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	53.882.000
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	53.882.000
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	53.882.000
02:13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.595.336.296
2.13.0.00.0.00.01.000 0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.595.336.296

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.595.336.296
02:13:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.078.516.071
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.619.101.352
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.619.101.352
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.296.000
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.980.000
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.550.000
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.815.000
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.724.000
2.13.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.000.000
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.227.000
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.957.719
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.957.719
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.233.000
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.233.000
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.928.000
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.056.000
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.110.000
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.762.000
02:13:03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	36.529.300
2.13.03.2.01	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	36.529.300
2.13.03.2.01.03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	36.529.300
02:13:04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.063.721.125
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.063.721.125
2.13.04.2.01.01	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.193.137.725
2.13.04.2.01.02	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	42.847.300
2.13.04.2.01.03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	10.000.000
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	62.841.000
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	500.000.000
2.13.04.2.01.11	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	50.895.100
2.13.04.2.01.13	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	12.500.000
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	162.500.000
2.13.04.2.01.15	Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.000.000
2.13.04.2.01.18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9.000.000
02:13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	416.569.800
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	416.569.800
2.13.05.2.01.02	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16.000.000
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	77.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	35.000.000
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	40.000.000
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	248.569.800
02:14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.660.584.000
1.06.2.08.2.14.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.660.584.000
1.06.2.08.2.14.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.660.584.000
02:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	721.205.000
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	5.000.000
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	5.000.000
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	716.205.000
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	2.500.000
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	30.000.000
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	522.905.000
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	160.800.000
02:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8.615.359.000
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.420.483.000
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	28.743.000
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	405.600.000
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	850.500.000
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.924.800.000
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.924.800.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4.200.576.000
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	48.150.000
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.855.571.000
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	10.000.000
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.206.455.000
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.400.000
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	25.000.000
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20.000.000
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.069.500.000
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.069.500.000
02:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.324.020.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.318.020.000
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	866.340.000
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.397.180.000
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	35.000.000
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	19.500.000
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.000.000
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.000.000
02:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	50.729.773.984
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	50.729.773.984
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	50.729.773.984
02:15:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.601.571.984
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.282.674.984
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.190.874.984
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.800.000
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.000.000
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	195.000.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	747.547.000
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.000.000
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.000.000
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	50.000.000
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.547.000
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	939.000.000
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	753.000.000
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	86.000.000
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.692.350.000
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.186.000.000
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.501.350.000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	725.000.000
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000
2.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	25.000.000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
02:15:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	16.128.202.000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.794.627.900
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.062.127.900
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.732.500.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100.000.000
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	100.000.000
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.100.000.000
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.100.000.000
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.562.891.000
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	807.891.000
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	175.000.000
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	380.000.000
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.000.000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.898.083.100
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	712.619.000
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10.000.000
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.025.464.100
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	45.000.000
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	30.000.000
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	15.000.000
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	346.000.000
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	206.000.000
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	10.000.000
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	60.000.000
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20.000.000
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	261.600.000
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	261.600.000
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
02:16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.299.103.463
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.299.103.463
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.299.103.463
02:16:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.501.510.463
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.025.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.500.000
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.025.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.524.255.600
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.482.090.600
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.475.000
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.515.000
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.175.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.020.270.453
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.020.270.453
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.620.000
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.670.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	39.750.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.200.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.250.000
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	91.900.000
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.350.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.259.410
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.259.410
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.830.000
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.480.000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.500.000
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.850.000
02:16:02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.922.853.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.922.853.000
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	4.865.000
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	20.305.000
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	438.850.000
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	319.710.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	24.250.000
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100.000.000
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	130.245.000
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.884.628.000
02:16:03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.874.740.000
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.369.220.000
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.369.220.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	505.520.000
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	31.225.000
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	368.830.000
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	66.600.000
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	38.865.000
02:17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	21.314.331.722

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.17.3.30.0.00.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	21.314.331.722
2.17.3.30.0.00.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	21.314.331.722
02:17:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.634.920.722
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.500.000
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.500.000
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.239.200.722
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.196.685.008
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.515.714
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000
2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000
2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000
2.17.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000
2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.000.000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.000.000
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000
2.17.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	50.000.000
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.565.220.000
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	420.000.000
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.141.720.000
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.000.000
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	235.000.000
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000
02:17:03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	40.000.000
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	40.000.000
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000
02:17:05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	759.411.000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	759.411.000
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	759.411.000
02:17:07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.830.000.000
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.830.000.000
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	30.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.800.000.000
02:17:08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	50.000.000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	50.000.000
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	50.000.000
02:18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.548.959.626
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.548.959.626
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.548.959.626
02:18:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.085.630.606
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.090.000
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.090.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.688.092.928
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.658.092.928
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.000.000
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.530.000
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.530.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	557.348.991
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.875.000
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.564.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.800.000
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	118.194.000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.915.991
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	692.272.900
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	292.550.000
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	399.722.900
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	752.295.787
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.950.000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.345.787
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.000.000
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.000.000
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000
02:18:02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	238.990.450
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	167.345.450
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	107.345.450
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	60.000.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	71.645.000
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	71.645.000
02:18:03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	156.599.070

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	156.599.070
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	156.599.070
02:18:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	222.367.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	222.367.000
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	92.050.000
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	80.317.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50.000.000
02:18:05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	583.885.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	583.885.000
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	359.450.000
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	174.435.000
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.000.000
02:18:06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	261.487.500
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	261.487.500
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	261.487.500
02:19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3.973.595.029
2.22.2.19.3.26.04.0000	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	3.973.595.029
2.22.2.19.3.26.04.0000	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	3.973.595.029
02:19:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	555.825.036
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	488.340.036
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	12.371.000
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	36.982.036
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	17.495.500
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	90.129.250
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	13.757.750
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	18.285.000
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	28.539.000
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	270.780.500
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.485.000
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	17.485.000
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	50.000.000
02:19:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	3.417.769.993
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.002.571.107

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	8.587.500
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2.575.000.000
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	418.983.607
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	342.809.386
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	45.884.000
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	145.370.386
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	151.555.000
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	45.674.500
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	8.493.000
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	7.878.000
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	7.878.000
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	14.122.000
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	7.303.500
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	26.715.000
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	18.410.000
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	8.305.000
02:20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	152.105.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	152.105.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	152.105.000
02:20:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	152.105.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	152.105.000
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	52.105.000
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	100.000.000
02:21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	89.380.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	89.380.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	89.380.000
02:21:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	89.380.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.380.000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	59.380.000
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
02:22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.437.978.880
2.22.2.19.3.26.04.0000	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	2.437.978.880
2.22.2.19.3.26.04.0000	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	2.437.978.880
02:22:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.007.851.722
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.521.472
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	155.845.000
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	95.676.472
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.756.330.250

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.461.559.950
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	250.000.000
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	44.770.300
02:22:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	150.980.200
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.980.200
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	64.728.100
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	43.430.600
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	42.821.500
02:22:04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	99.096.200
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.096.200
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	40.414.600
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	19.725.000
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	38.956.600
02:22:05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	180.050.758
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	45.183.157
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	45.183.157
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	134.867.601
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	90.288.144
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	44.579.457
02:23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	202.199.000
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	202.199.000
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	202.199.000
02:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	202.199.000
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.515.000
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	5.000.000
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	12.515.000
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	20.000.000
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	3.000.000
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	146.684.000
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	99.684.000
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	47.000.000
02:24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4.525.534.631
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.525.534.631
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.525.534.631
02:24:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.260.136.631
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000
2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.630.063.520
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.624.063.520

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.000.000
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.879.111
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000
2.24.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000
2.24.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.379.111
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394.964.000
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.000.000
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.964.000
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.730.000
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.730.000
2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000
2.24.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000
02:24:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	192.033.000
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	165.183.000
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	72.883.000
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	92.300.000
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	16.850.000
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	16.850.000
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10.000.000
02:24:03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	73.365.000
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	34.175.000
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	24.175.000
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	10.000.000
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	17.540.000
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	17.540.000
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	7.100.000
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4.100.000
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	10.000.000
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10.000.000
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	4.550.000
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	4.550.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
03:25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	460.000.000
2.09.3.25.3.27.01.000 0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	460.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	460.000.000
03:25:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	25.000.000
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	25.000.000
03:25:04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	335.000.000
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	235.000.000
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40.000.000
03:25:05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.000.000
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	30.000.000
3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	30.000.000
03:25:06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	70.000.000
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	70.000.000
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	70.000.000
03:26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	14.883.121.379
2.22.2.19.3.26.04.0000	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	14.883.121.379
2.22.2.19.3.26.04.0000	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	14.883.121.379
03:26:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.059.361.496
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.200.000
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	149.200.000
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.743.081.536
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.743.081.536
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.222.460
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.480.460
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.000.000
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.350.000
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.974.000
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.418.000
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.000.000
3.26.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.000.000
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	509.612.500
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.200.000
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.912.500
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.245.000
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.055.000
3.26.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.190.000
03:26:02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	7.353.232.883

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	90.000.000
3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	30.000.000
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	30.000.000
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	20.000.000
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	205.000.000
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10.000.000
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	195.000.000
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.018.232.883
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	207.000.000
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	256.233.000
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.524.999.883
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.000.000
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	25.000.000
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	15.000.000
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	25.000.000
03:26:03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	766.215.000
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	766.215.000
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	77.200.000
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	635.500.000
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	18.515.000
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	35.000.000
03:26:04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	29.746.000
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	29.746.000
3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	24.746.000
3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5.000.000
03:26:05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	674.566.000
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	674.566.000
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	270.216.000
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	374.350.000
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30.000.000
03:27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	44.637.262.635
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	44.637.262.635
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	44.637.262.635
03:27:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.169.416.635
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.000.000
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.893.419.336
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.753.419.336

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.000.000
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000
3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.625.320
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.300.000
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.325.320
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000
3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	832.371.979
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	652.371.979
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.785.746.000
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.055.746.000
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.264.000.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.791.746.000
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	730.000.000
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	500.000.000
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	230.000.000
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.010.000.000
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	110.000.000
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	75.000.000
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	15.000.000
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	20.000.000
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.775.000.000
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.575.000.000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	200.000.000
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	2.000.000.000
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	125.000.000
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	125.000.000
03:27:04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	565.000.000
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	130.000.000
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	130.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	95.000.000
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	50.000.000
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	45.000.000
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	75.000.000
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	75.000.000
03:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	307.500.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	307.500.000
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	230.000.000
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	77.500.000
03:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	799.600.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	799.600.000
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	380.000.000
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	267.500.000
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	152.100.000
03:30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.393.643.000
2.17.3.30.0.00.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	3.393.643.000
2.17.3.30.0.00.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	3.393.643.000
03:30:03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.025.000.000
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.900.000.000
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.850.000.000
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	125.000.000
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	75.000.000
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000
03:30:04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	128.643.000
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	98.643.000
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	98.643.000
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	10.000.000
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.000.000
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20.000.000
03:30:05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	140.000.000
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	50.000.000
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	30.000.000
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	30.000.000
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	10.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	20.000.000
03:30:06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	10.000.000
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	10.000.000
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	10.000.000
03:30:07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	90.000.000
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	90.000.000
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	90.000.000
03:31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	6.986.710.598
3.31.2.07.3.32.05.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6.986.710.598
3.31.2.07.3.32.05.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6.986.710.598
03:31:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.281.820.598
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.000.000
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.075.932.376
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.064.932.376
3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000
3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.000.000
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.000.000
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.500.000
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.000.000
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.500.000
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.888.222
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	40.000.000
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.888.222
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.000.000
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.000.000
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.000.000
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206.000.000
3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	11.000.000
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000
03:31:02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.491.890.000
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.491.890.000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.000.000
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.072.390.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	239.500.000
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	80.000.000
03:31:04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	213.000.000
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	213.000.000
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	213.000.000
03:32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	178.000.000
3.31.2.07.3.32.05.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	178.000.000
3.31.2.07.3.32.05.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	178.000.000
03:32:03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	178.000.000
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	178.000.000
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	43.000.000
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	45.000.000
3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	25.000.000
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
04:01	SEKRETARIAT DAERAH	58.348.078.251
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	58.348.078.251
4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN PEMERINTAHAN	583.910.000
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	239.767.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.258.500
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	20.000.000
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.560.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.698.500
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.432.500
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.500.000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.932.500
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.076.000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.506.000
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.230.000
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.340.000
04:01:02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	344.143.000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	247.143.000
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	15.000.000
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100.700.000
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	131.443.000
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	97.000.000
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	75.000.000
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	10.000.000
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
4.01.0.00.0.00.01.000 2	BAGIAN HUKUM	1.116.480.000
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	312.240.000
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.300.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.500.000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.000.000
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.500.000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.440.000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.350.000
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.090.000
04:01:02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	804.240.000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	804.240.000
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	313.000.000
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	309.240.000
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	182.000.000
4.01.0.00.0.00.01.000 3	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.892.770.875
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	631.554.496
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.520.000
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.520.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.751.496
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.686.496
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.895.000
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.084.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.150.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.936.000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.000.000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	24.000.000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.653.000
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.440.000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.000.000
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.460.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.753.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.630.000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.630.000
04:01:02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.261.216.379
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.261.216.379

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.096.802.379
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.116.895.000
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	47.519.000
4.01.0.00.0.00.01.000 4	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	7.126.352.000
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	93.150.188
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.390.188
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.390.188
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.760.000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.780.000
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.980.000
04:01:03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	7.033.201.812
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2.357.000.000
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	90.000.000
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	177.000.000
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2.090.000.000
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.676.201.812
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4.616.201.812
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	60.000.000
4.01.0.00.0.00.01.000 5	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	508.550.000
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	207.153.000
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.920.000
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.920.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.973.000
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.476.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.497.000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.000.000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.400.000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.600.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.260.000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.760.000
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.500.000
04:01:03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	301.397.000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	301.397.000
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	19.788.800
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	210.767.200
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	70.841.000
4.01.0.00.0.00.01.000 6	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	780.920.000
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	224.315.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.650.000
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.650.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.545.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.045.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.000.000
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.120.000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.120.000
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
04:01:03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	556.605.000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	556.605.000
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	405.000.000
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	110.000.000
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	41.605.000
4.01.00.0.00.01.000 7	BAGIAN UMUM	36.237.305.376
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.237.305.376
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.587.000
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.587.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.252.518.376
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.992.278.376
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.000.000
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.240.000
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.550.100.000
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	300.000.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42.000.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.023.100.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	520.063.000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	286.313.000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.750.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.909.500.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95.000.000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.948.500.000
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	480.000.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.386.000.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.631.790.000
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	409.500.000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.300.000.000
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	40.000.000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.290.000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.049.747.000
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174.747.000
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150.000.000
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	175.000.000
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.550.000.000
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.250.000.000
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.510.000.000
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	740.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN ORGANISASI	574.320.000
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	574.320.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.963.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.072.000
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.084.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.807.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.000.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.237.000
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.237.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.220.000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.880.000
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.340.000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	453.900.000
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	109.300.209
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	125.335.148
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	203.399.943
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15.864.700
4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	3.527.470.000
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.527.470.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.000.000
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.000.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.350.144
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.203.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.147.144
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	25.000.000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.000.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.000.000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.000.000
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.117.119.856
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	381.080.000
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.034.999.856
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	701.040.000
04:02	SEKRETARIAT DPRD	58.901.688.979
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	58.901.688.979
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	58.901.688.979
04:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.599.169.979
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.968.272.848
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.904.438.848
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.834.000
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	805.194.000
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.935.000
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.450.000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.470.000
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	92.866.000
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	177.939.000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467.534.000
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	497.237.000
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	249.700.000
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	247.537.000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.490.501.131
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.536.000
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.216.131
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.840.000
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	846.909.000
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.254.586.000
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.350.000
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.900.000
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	61.319.000
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	330.000.000
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	473.017.000
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	31.301.346.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	30.868.922.000
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	378.564.000
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	53.860.000
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.262.033.000
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	66.320.000
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	731.567.000
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	464.146.000
04:02:02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.302.519.000
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.378.688.000
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	692.710.000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.092.034.000
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.513.944.000
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	80.000.000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.164.912.000
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	1.164.912.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.689.077.000
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.272.356.000
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.112.365.000
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.126.346.000
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.178.010.000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.477.293.979
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.880.915.979
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	297.378.000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.000.000
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.892.340.000
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	30.000.000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	2.862.340.000
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	247.216.000
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	247.216.000
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	2.452.992.021
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	139.389.021
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	947.906.000
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.365.697.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
05:01	PERENCANAAN	7.691.117.249
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7.691.117.249
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7.691.117.249
05:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.469.295.249
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.000.000
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.000.000
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.462.788.928
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.451.458.928
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.010.000
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.320.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.801.321
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.911.321
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.890.000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.105.000
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.250.000
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.855.000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.000.000
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.000.000
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.600.000
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.390.000
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.600.000
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.570.000
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.040.000
05:01:02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.221.822.000
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	866.822.000
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	50.000.000
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	50.000.000
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	91.684.000
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	75.000.000
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	100.000.000
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	15.000.000
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	485.138.000
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30.000.000
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	30.000.000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	325.000.000
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	210.000.000
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	115.000.000
05:01:03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.000.000.000
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	400.000.000
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.000.000
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.000.000
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25.000.000
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.000.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	300.000.000
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65.000.000
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.000.000
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.000.000
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100.000.000
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.000.000
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.000.000
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.000.000
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	10.000.000
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	300.000.000
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65.000.000
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20.000.000
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15.000.000
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	10.000.000
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.000.000
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.000.000
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.000.000
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	100.000.000
05:02	KEUANGAN	654.980.281.932
5.02.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	654.980.281.932
5.02.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	654.980.281.932
05:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.488.989.156
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.214.000
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.607.000
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.607.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.466.775.156
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.350.321.156
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116.454.000
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.000.000
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	411.000.000
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000
5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.000.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	189.830.000
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.830.000
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.170.000
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.170.000
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	806.000.000
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700.000.000
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.000.000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
05:02:02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	631.177.325.931
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.311.610.000
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	235.000.000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	235.000.000
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	35.000.000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	50.000.000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	10.000.000
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	15.000.000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	131.610.000
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	500.000.000
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	439.806.000
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	45.000.000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	19.000.000
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	72.500.000
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.306.000
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	25.000.000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100.000.000
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	22.000.000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	89.000.000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	805.668.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	65.577.000
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100.000.000
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	53.440.000
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	551.651.000
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	35.000.000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	628.620.241.931
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	597.743.906.592
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	16.000.000.000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	14.876.335.339
05:02:03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.804.656.645
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.804.656.645
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	92.344.000
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	82.570.000
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	250.000.000
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.000.000
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	742.261.345
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	79.900.000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	527.581.300
05:02:04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.509.310.200
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.509.310.200
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	460.653.100
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	643.050.000
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	48.700.000
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	430.163.852
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	253.600.900
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	645.626.348
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	16.300.000
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	11.216.000
05:03	KEPEGAWAIAN	7.633.773.806
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.633.773.806
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.633.773.806
05:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.644.459.906
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.969.340.656
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.950.890.656
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.450.000
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.199.250
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.199.250
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.000.000
5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	66.500.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.500.000
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.920.000
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.920.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.000.000
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.000.000
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.000.000
05:03:02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.989.313.900
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	995.183.100
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	693.392.550
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	57.456.650
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	7.724.500
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	47.757.200
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	188.852.200
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	369.621.479
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	183.641.400
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	185.980.079
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	469.668.321
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	381.309.600
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	41.057.179
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	47.301.542
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	154.841.000
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	39.752.500
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	21.073.500
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	49.388.000
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	19.870.000
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	24.757.000
05:04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.594.671.100
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.594.671.100
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.594.671.100
05:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.594.671.100
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	562.012.650
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	562.012.650
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.032.658.450
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.032.658.450
05:05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	755.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	755.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	755.000.000
05:05:02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	755.000.000
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	130.000.000
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	60.000.000
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	38.000.000
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	32.000.000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	355.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	40.000.000
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	275.000.000
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	40.000.000
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	140.000.000
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100.000.000
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	40.000.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	130.000.000
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	80.000.000
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	30.000.000
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	20.000.000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
06:01	INSPEKTORAT DAERAH	15.733.801.826
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	15.733.801.826
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	15.733.801.826
06:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.259.846.288
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.320.000
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.200.000
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.060.000
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.060.000
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.173.510.904
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.079.973.904
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.537.000
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.000.000
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.000.000
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000
6.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.000.000
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.000.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	717.400.000
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.400.000
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.000.000
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	924.028.000
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.268.000
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	86.664.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.096.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653.587.384
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.400.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.187.384
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	703.000.000
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
06:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	772.557.604
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	581.357.000
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	56.100.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	55.257.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	80.000.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	150.000.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	120.000.000
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	20.000.000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100.000.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	191.200.604
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	36.458.604
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	154.742.000
06:01:03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.701.397.934
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.233.381.934
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	633.381.934
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	600.000.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.468.016.000
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	350.000.000
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	200.000.000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	628.016.000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	290.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN	
07:01	KECAMATAN	83.745.972.343
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN PRAMBANAN	3.227.769.808
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN PRAMBANAN	3.227.769.808
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.757.241.808
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.493.269.808
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.488.769.808
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.000.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.500.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	9.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.500.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.842.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.942.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.630.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.630.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	62.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.000.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	106.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	95.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	183.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	183.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	180.000.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	115.528.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	115.528.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18.000.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	67.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2.000.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.528.000
7.01.0.00.0.00.02.000 0	KECAMATAN GANTIWARNO	2.622.275.856
7.01.0.00.0.00.02.000 0	KECAMATAN GANTIWARNO	2.622.275.856
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.169.110.208
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.898.276.208
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.883.276.208
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.600.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.500.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.100.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.999.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	999.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.235.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.985.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.250.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72.965.648
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.965.648
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.965.648
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	109.500.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94.500.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	87.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.500.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	171.500.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	171.500.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	170.000.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	94.200.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	94.200.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.500.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.500.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.000.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1.700.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.500.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN WEDI	3.074.336.545
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN WEDI	3.074.336.545
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.586.239.545
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.262.336.184
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.260.336.184
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.610.361
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.310.361
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	4.500.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.100.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.700.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.003.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.403.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.290.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.690.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.800.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.600.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.200.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.500.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78.500.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.500.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	71.000.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	147.500.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	140.500.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	123.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17.500.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.500.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.500.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	238.597.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	238.597.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.645.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.500.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19.355.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	193.097.000
7.01.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BAYAT	2.783.252.847
7.01.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BAYAT	2.783.252.847
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.345.601.847
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.892.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.892.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.996.593.112

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.994.253.112
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.340.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.744.495
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.900.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.670.395
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.794.100
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.900.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.480.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.450.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	23.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.450.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.397.240
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.397.240
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.525.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.050.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	8.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.290.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.185.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.076.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.076.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.319.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.757.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	256.969.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	84.969.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.356.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.613.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	172.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	172.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.162.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.162.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9.162.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	107.444.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	107.444.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.530.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.896.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.138.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.886.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.146.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56.848.000
7.01.0.00.0.00.05.000 0	KECAMATAN CAWAS	3.099.539.246
7.01.0.00.0.00.05.000 0	KECAMATAN CAWAS	3.099.539.246
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.639.629.612
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.273.499.112
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.260.539.112
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.960.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.772.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.640.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.492.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.640.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.770.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	18.900.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.870.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.599.500
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.162.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.800.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.637.500
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.989.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.414.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.525.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.170.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.119.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.119.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.119.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.099.134
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78.099.134
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.350.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.749.134
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	109.705.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	99.705.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	89.705.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	170.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	170.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	165.000.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	98.986.500
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98.986.500
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.100.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.216.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.100.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.700.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.870.500
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2.000.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.000.000
7.01.0.00.0.00.06.000 0	KECAMATAN TRUCUK	2.588.473.335
7.01.0.00.0.00.06.000 0	KECAMATAN TRUCUK	2.588.473.335
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.139.583.700
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.804.973.200
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.799.473.200
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.360.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.740.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.540.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.580.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.532.500
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	34.750.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.782.500

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.100.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.200.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.900.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.618.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.280.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.720.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.468.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.150.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.180.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.180.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.180.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	104.222.135
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	104.222.135
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90.222.135
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	247.981.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75.981.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	68.130.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.851.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	172.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	172.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.875.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.875.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8.875.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	83.631.500
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.631.500
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.924.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.515.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.440.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15.000.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.752.500
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KEBONARUM	2.522.797.112
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KEBONARUM	2.522.797.112
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.158.847.112
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.934.796.864
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.933.796.864
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.934.648
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.674.648
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.300.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.960.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.185.600
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.185.600
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.930.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.950.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.280.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.700.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.800.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.800.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.800.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	89.400.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89.400.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	86.400.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	165.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	165.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	165.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32.750.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.750.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.750.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.000.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.000.000
7.01.0.00.0.00.08.000 0	KECAMATAN JOGONALAN	2.744.450.607
7.01.0.00.0.00.08.000 0	KECAMATAN JOGONALAN	2.744.450.607
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.312.295.641

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.957.449.872
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.955.449.872
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.326.869
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.008.800
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.277.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.541.069
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	48.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.855.900
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.855.900
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.663.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.100.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.563.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.500.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.500.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.500.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72.965.916
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.965.916
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.643.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	61.322.916
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	119.026.750
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	119.026.750
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	107.336.750
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.690.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	154.400.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	154.400.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	152.400.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	84.262.300
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84.262.300
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8.000.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.262.300
7.01.0.00.0.00.09.000 0	KECAMATAN MANISRENGGO	3.041.728.344
7.01.0.00.0.00.09.000 0	KECAMATAN MANISRENGGO	3.041.728.344
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.661.998.344
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.307.728.384
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.302.728.384
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.942.580
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.892.580
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.050.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.807.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.000.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.807.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.060.380
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.060.380
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.460.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.880.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.580.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	147.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	142.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	140.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.500.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	198.730.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	198.730.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.550.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.560.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.300.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.000.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	500.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168.820.000
7.01.0.00.0.00.10.000 0	KECAMATAN KARANGNONGKO	2.918.561.093
7.01.0.00.0.00.10.000 0	KECAMATAN KARANGNONGKO	2.918.561.093
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.455.061.093
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.233.941.093
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.229.560.480
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.380.613
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.090.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.320.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.600.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.970.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.030.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.030.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.000.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	140.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	30.000.000
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	110.000.000
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	176.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	176.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	175.000.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75.500.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.500.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19.500.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.500.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.500.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2.000.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN CEPER	3.315.836.664
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN CEPER	3.315.836.664
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.830.448.154
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	800.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.522.736.104

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.511.836.104
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	900.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.662.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.550.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.112.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.500.050
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.500.050
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.750.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.750.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.000.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	166.885.500
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	166.885.500
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	166.885.500
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80.603.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.900.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.900.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	54.703.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	54.703.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.000.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	231.900.010
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	231.900.010
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	175.192.450
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36.707.560
7.01.0.00.0.00.12.000 0	KECAMATAN PEDAN	2.550.536.610

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN PEDAN	2.550.536.610
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.036.537.610
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.861.536.936
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.861.536.936
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.674
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.674
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.000.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	106.999.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	106.999.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	96.999.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	314.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	149.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	128.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	21.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	165.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	165.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	88.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88.000.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	50.000.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN KARANGDOWO	3.132.317.848
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN KARANGDOWO	3.132.317.848
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.583.817.848
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.322.067.848
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.319.067.848
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.500.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.750.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.750.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.000.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	339.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	339.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	324.000.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	126.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	126.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	96.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	68.500.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.500.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.06.2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	28.500.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000
7.01.0.00.0.00.14.000 0	KECAMATAN JUWIRING	3.158.072.809
7.01.0.00.0.00.14.000 0	KECAMATAN JUWIRING	3.158.072.809
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.818.698.509
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.344.072.448
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.344.072.448
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165.000.000
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	165.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.330.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.080.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	75.750.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.500.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.756.700
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.187.700
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.383.400
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.185.600
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.539.361
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.539.361
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.836.500
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	13.836.500
7.01.02.2.02.02	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13.836.500
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	138.074.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	138.074.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	54.477.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.597.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	121.330.800
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	121.330.800
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	121.330.800
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.375.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.375.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.375.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	58.758.000
7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.758.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13.658.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23.100.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000
7.01.0.00.0.00.15.000 0	KECAMATAN WONOSARI	3.407.812.752

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN WONOSARI	3.407.812.752
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.915.302.472
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.627.812.312
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.618.812.312
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.490.160
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.490.160
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.000.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	341.510.280
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	341.510.280
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	329.510.280
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	83.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	77.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	72.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.000.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.000.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19.000.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.000.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.000.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.000.000
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN DELANGGU	2.824.259.979
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN DELANGGU	2.824.259.979
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.397.640.479
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.094.260.192
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.085.260.192
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.500.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.741.230
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.988.230
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.453.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.800.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.400.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.700.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.932.500
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.932.500
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.523.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.523.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.183.557

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.880.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.763.557
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.510.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.030.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.017.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.017.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.017.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	81.377.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	81.377.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.245.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.132.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	273.646.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.646.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	83.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17.646.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	173.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	173.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.584.500
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.584.500
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.584.500
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.995.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.995.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.995.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.000.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.000.000
7.01.00.0.00.17.0000	KECAMATAN POLANHARJO	2.873.113.673
7.01.00.0.00.17.0000	KECAMATAN POLANHARJO	2.873.113.673
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.328.185.512
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.085.253.112
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.084.114.112
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.139.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.532.400
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	9.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.032.400
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.400.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.000.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.458.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.500.000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.500.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.958.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.958.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	169.033.161
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	169.033.161
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	154.033.161
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	96.400.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96.400.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	86.400.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	175.177.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	175.177.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	171.677.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	88.860.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88.860.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.000.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.820.000
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.520.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.520.000
7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN KARANGANOM	2.748.656.771
7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN KARANGANOM	2.748.656.771
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.232.659.184
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.260.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.260.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.942.983.184
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.934.656.184
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.506.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.240.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.581.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.835.400
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.297.400
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.052.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.486.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.700.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.700.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.057.360
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.800.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.257.360
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.823.240
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.160.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.620.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.219.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.550.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.274.240
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.805.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	54.805.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	54.805.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	151.310.587
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	151.310.587
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.489.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	136.821.587
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	148.550.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	143.550.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	130.420.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13.130.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.540.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.540.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34.540.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	121.792.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	121.792.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.965.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.801.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	41.445.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.036.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.545.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8.000.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.495.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.500.000
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	5.000.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	19.005.000
7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN TULUNG	3.242.455.700
7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN TULUNG	3.242.455.700
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.750.133.515
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.331.450
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.681.250
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.650.200
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.440.808.800
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.438.454.800
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.354.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.800.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.900.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.900.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.500.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	26.500.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.223.265

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.576.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.647.265
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.470.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.630.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.837.400
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.837.400
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.837.400
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	104.827.070
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	104.827.070
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.481.070
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90.346.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	88.175.500
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.393.750
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.702.250
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.691.500
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.781.750
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.781.750
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	188.345.200
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	188.345.200
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	178.345.200
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	109.137.015
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	109.137.015
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.090.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.180.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.747.950
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	21.000.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.416.215
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72.514.000
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.188.850
7.01.0.00.0.00.20.000 0	KECAMATAN JATINOM	3.630.018.739
7.01.0.00.0.00.20.000 0	KECAMATAN JATINOM	3.330.018.739
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.727.868.739
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.546.018.040

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.541.018.040
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.500.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.519.119
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.833.519
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.185.600
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.331.580
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.331.580
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	253.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	252.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	230.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.000.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	90.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	35.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	35.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	192.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	192.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	189.000.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	47.150.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.150.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.400.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.500.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.500.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.750.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.000.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.000.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.000.000
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2.000.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.000.000
7.01.0.00.0.00.20.000 1	KELURAHAN JATINOM	300.000.000
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	192.050.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.550.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.550.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	107.950.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	107.950.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.950.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000
7.01.0.00.0.00.21.000 0	KECAMATAN KEMALANG	2.789.622.082
7.01.0.00.0.00.21.000 0	KECAMATAN KEMALANG	2.789.622.082
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.380.345.208
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.165.891.808
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.125.621.808
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.270.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.592.400
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.592.400
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.500.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.361.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.361.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.950.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.950.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.950.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.925.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.925.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.925.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	128.175.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	128.175.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	125.175.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	175.500.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	175.500.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	171.000.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	63.726.874
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.726.874
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.500.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12.900.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.826.874
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4.500.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.0.00.0.00.22.0000	KECAMATAN NGAWEN	2.590.928.753
7.01.0.00.0.00.22.0000	KECAMATAN NGAWEN	2.590.928.753
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.156.525.192
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.926.928.592
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.926.928.592
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.100.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.100.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.996.600
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.407.600
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.589.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.500.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.500.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.916.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.916.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9.916.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	54.300.061
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.300.061
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.300.061
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	320.840.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	99.497.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	94.497.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	221.343.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	221.343.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.975.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.975.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.975.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.372.500
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.372.500
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.373.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.999.500
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.0.00.0.00.23.0000	KECAMATAN KALIKOTES	2.957.859.938
7.01.0.00.0.00.23.0000	KECAMATAN KALIKOTES	2.957.859.938
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.575.459.938
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.375.159.552
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.368.859.552
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.300.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.390.498
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.800.498
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.590.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.450.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	22.450.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.219.888
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.694.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.720.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.805.888
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.240.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.950.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.260.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.030.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65.000.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	92.400.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89.400.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	86.400.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	168.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	168.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	168.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	57.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.000.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16.500.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.500.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.000.000
7.01.0.00.0.00.24.0000	KECAMATAN KLATEN UTARA	4.507.048.081

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.0.00.0.00.24.000 0	KECAMATAN KLATEN UTARA	3.907.048.081
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.501.048.081
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.268.047.904
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.268.047.904
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.000.177
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.140.337
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.859.840
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	120.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	120.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	120.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	165.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	165.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	165.000.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13.000.000
7.01.0.00.0.00.24.000 1	KELURAHAN BARENGLOR	300.000.000
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.610.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.913.040
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.113.040
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.800.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.696.960
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.696.960

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	184.390.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	184.390.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.590.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	182.800.000
7.01.0.00.0.00.24.000 2	KELURAHAN GERGUNUNG	300.000.000
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	137.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.529.384
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	195.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.086.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	423.384
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.825.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.720.616
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.720.616
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.750.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	163.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	163.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	157.000.000
7.01.0.00.0.00.25.000 0	KECAMATAN KLATEN TENGAH	8.057.761.991
7.01.0.00.0.00.25.000 0	KECAMATAN KLATEN TENGAH	6.237.761.991
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.886.929.491
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.649.673.491
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.648.762.112
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	911.379
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.756.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.756.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.500.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.500.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.500.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.500.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80.700.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.700.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.700.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	91.500.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	89.000.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.500.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.500.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.500.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.077.500
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.077.500
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	38.077.500
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	135.555.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	135.555.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	40.385.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90.170.000
7.01.0.00.0.00.25.000 1	KELURAHAN BARENG	300.000.000
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.990.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.537.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.550.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.357.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.630.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.503.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.503.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.950.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.950.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	191.010.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	191.010.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	181.010.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.0.00.0.00.25.000 2	KELURAHAN KABUPATEN	300.000.000
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	139.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.927.384
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.327.384
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.600.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.220.616
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.500.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.720.616
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.852.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.212.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.640.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	161.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	161.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150.000.000
7.01.0.00.0.00.25.000 3	KELURAHAN KLATEN	300.000.000
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	177.345.250
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.321.602
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.666.302
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.255.300
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.400.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.038.648
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.038.648
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.985.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.225.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.760.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	122.654.750
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	122.654.750
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.345.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117.309.750
7.01.0.00.0.00.25.000 4	KELURAHAN TONGGALAN	300.000.000
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.402.400
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.592.400
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.810.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.400.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.200.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.200.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.197.600
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.997.600

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.200.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	145.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.256.500
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	138.743.500
7.01.0.00.0.00.25.000 5	KELURAHAN BUNTALAN	320.000.000
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.853.960
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.674.350
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.924.350
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	240.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.150.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.757.610
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.027.340
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.730.270
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.422.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.422.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	197.146.040
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.459.760
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.459.760
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	188.686.280
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	188.686.280
7.01.0.00.0.00.25.000 6	KELURAHAN MOJAYAN	300.000.000
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	145.880.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.541.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.782.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.024.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.375.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.151.500
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.033.464
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.350.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.768.036
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.187.500
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.187.500
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	154.120.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	154.120.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	144.120.000
7.01.0.00.0.00.26.000 0	KECAMATAN KLATEN SELATAN	3.336.485.160
7.01.0.00.0.00.26.000 0	KECAMATAN KLATEN SELATAN	3.036.485.160
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.616.806.160
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.050.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.050.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.397.485.160
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.397.485.160
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.350.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	4.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.350.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.524.540
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.524.540
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.396.460
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.446.460
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.950.000
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53.200.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.200.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.200.000
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94.400.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89.400.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	86.400.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	171.899.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	171.899.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	171.899.000
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95.180.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.180.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.280.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	22.000.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.000.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.900.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.000.000
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	5.000.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.000.000
7.01.000.000.26.000 1	KELURAHAN GAYAMPRI	300.000.000
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.200.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.897.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.897.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.556.550
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.977.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.579.550
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.246.450
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.246.450
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	126.800.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	126.800.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	126.800.000
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
08:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.637.638.718
8.01.8.01.000.01.000 0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.637.638.718
8.01.8.01.000.01.000 0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.637.638.718
08:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.629.709.218
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.164.139.264
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.075.358.976
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.780.288
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.820.742
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.132.242
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.575.000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.603.100
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.502.400
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.250.000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.758.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.700.288

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.440.000
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.260.288
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.048.924
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.048.924
08:01:02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	46.400.000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	46.400.000
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.000.000
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41.400.000
08:01:03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.347.779.500
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.347.779.500
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.347.779.500
08:01:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	280.000.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	280.000.000
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	280.000.000
08:01:05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	41.750.000
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	41.750.000
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.000.000
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30.000.000
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4.750.000
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.000.000
08:01:06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	292.000.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	292.000.000
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	292.000.000